

**PERAN ORGANISASI ISLAM
MODERAT DALAM
MENANGKAL EKSTREMISME
KEKERASAN:**

**Sudi Kasus Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah**

Oleh

Ahmad Zainul Hamdi
Moh.Shofwan
Agus Muhammad

Kata Pengantar

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan berkah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan penelitian ini. Laporan penelitian ini sejak awal diabdikan untuk menghadirkan sebuah laporan yang bisa menjadi “cermin” untuk mengaca diri daripada bercanggih-canggih dengan diskusi teoretis ala penelitian akademis, sekalipun sisi akademik penelitian ini tetap terjaga. Karena itu, penelitian lebih berkarakter “kaya data” daripada “kaya teori”.

Penelitian yang mengangkat tema peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menangkal gerakan ekstremisme-kekerasan ini berangkat dari sikap positif bahwa arus utama Islam Indonesia adalah Islam *wastahiyah* (moderat). Berbagai kasus intoleransi dan kekerasan agama hanyalah percikan api yang sekalipun membahayakan kemanusiaan dan ke-Indonesia-an, namun sama sekali tidak mencerminkan wajah ramah Islam Indonesia yang direpresentasikan oleh dua organisasi ke-Islam-an besar di Indonesia: Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dukungan apa yang dibutuhkan NU dan Muhammadiyah dalam meneguhkan dirinya sebagai organisasi Islam moderat dalam memperkuat moderasi ke-Islam-an di Indonesia dalam konteks menguatnya pengaruh kelompok-kelompok Islam intoleran-radikal di masyarakat. Lebih dari 100 orang pengurus dan aktivis Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mulai pusat hingga desa telah diwawancarai secara mendalam. Para peneliti yang terlibat di sini juga berasal dari kedua organisasi tersebut. Puluhan aktivis senior dan junior dari kedua organisasi tersebut terlibat, baik langsung maupun tak langsung, dalam penelitian ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberi dukungan pada penelitian ini: PBNU beserta badan otonom dan lembaganya; PP Muhammadiyah beserta organisasi otonom dan lembaganya; PWNU Jawa tengah dan Jawa Timur beserta badan otonom dan lembaganya; PW Muhammadiyah Jawa Tengah dan Jawa Timur beserta organisasi otonom dan lembaganya; PCNU Situbondo dan Sragen beserta badan otonom dan lembaganya; Pengurus Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo, Malang, dan Lamongan beserta organisasi otonom dan lembaganya. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Hasnan Bachtiar, Khelmy K. Pribadi, Azaki Khoirudin, Maman Abdurrahman, Khoirul Anwar, Ahmad Yadi, Helmi Suhaimi, M. Dawud, serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebut satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati, kami sadar bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan. Sekalipun demikian, di atas segalanya, kami sungguh berharap laporan penelitian ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. Bagi NU dan Muhammadiyah, penelitian ini bisa menjadi “cermin” untuk melihat diri sendiri. Bagi pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, laporan penelitian ini bisa menjadi bahan untuk membangun kerja-kerja bersama serta berbagai dukungan dalam menangkal berbagai sikap dan perilaku kekerasan, terutama yang berangkat dari keyakinan keagamaan.

Jakarta, 25 Oktober 2019
Peneliti

DAFTAR ISI

			Hal
Bagian Pertama			
Bab I	:	Pendahuluan	
		A. Latar Belakang	
		A.1 Menguatnya Intoleransi dan Kekerasan Agama	
		A.2 Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai “ <i>The Guardian of the Moderate Indonesia Islam</i> ”	
		B. Tujuan	
		C. Penelitian Terdahulu	
		D. Klarifikasi Metodologis	
		E. Kerangka Konsep	
		F. Sistematika Penulisan	
Bagian Kedua			
Bab II	:	Nahdlatul Ulama	
		A. Pendahuluan	
		B. Peran Nahdlatul Ulama dalam Menghadapi Radikalisme.....	
		B.1 Respon Nahdlatul Ulama.....	
		B.2 Upaya-upaya Nahdlatul Ulama.....	
		B.3 Daya Tahan Nahdlatul Ulama.....	
		B.4 Tantangan-tantangan Nahdlatul Ulama.....	
		C. Kesimpulan.....	
Bab III	:	Muhammadiyah.....	
		A. Pendahuluan	
		B. Peran Muhammadiyah dalam Menghadapi Radikalisme.....	
		B.1 Respon Muhammadiyah.....	
		B.2 Upaya-upaya Muhammadiyah.....	
		B.3 Daya Tahan Muhammadiyah.....	
		B.4 Tantangan-tantangan Muhammadiyah.....	
		C. Kesimpulan	
Bagian Ketiga			
Bab IV	:	Penutup	
		A. Kesimpulan	
		B. Kebutuhan Dukungan dan/atau Rekomendasi	
Daftar Pustaka			

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

A.1 Menguatnya Intoleransi dan Kekerasan Agama

Sebagian sarjana berpendapat bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yang mampu terus-menerus mempertahankan dan melestarikan gagasan dan praktik kebhinnekaan.¹ Realitas multikulturalisme yang ada di negara ini telah menjadi perhatian banyak kalangan dan membuat mereka mengakui Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim yang mampu menjadikan dirinya terjauhkan dari segala bentuk konflik keagamaan yang merusak dan teror.²

Meskipun Indonesia diakui sebagai negara yang dihuni mayoritas Muslim yang secara relatif memiliki pemikiran, sikap dan praktik keagamaan yang moderat, inklusif dan toleran, terutama dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya seperti yang ada di Timur Tengah,³ sejarah di era pasca-Reformasi menunjukkan realitas yang sedikit berbeda, khususnya terkait dengan tingginya kasus-kasus intoleransi dan kekerasan agama.

Intoleransi

Intoleransi keagamaan adalah setiap aksi intoleran yang mengatasnamakan agama. Hal itu dipertimbangkan sebagai salah satu bentuk manifestasi dari radikalisme keagamaan. Intoleransi keagamaan yang ada di Indonesia dapat berupa kasus-kasus, seperti, *sweeping* yang dilakukan di pelbagai tempat yang dianggap melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, menyerang rumah ibadah penganut keagamaan lainnya (yang berbeda dengan dirinya), aksi massa atau demonstrasi dalam rangka menentang kelompok keagamaan tertentu yang dianggap mencemarkan kesucian Islam, dan aktif dalam pelbagai kelompok yang secara eksplisit mengupayakan formalisasi syariat Islam.⁴

¹ K.A. Steenbrink, "The Pancasila ideology and an Indonesian Muslim theology of religions," *The Muslim World*, Vol. 85, No. 3-4 (1998); D.E. Ramage, *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the ideology of tolerance* (London; New York: Routledge, 2002); B.F. Intan, *Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis* (New York: Peter Lang, 2006).

² Irwan Abdullah, "Politik Bhinneka Tunggal Ika dalam keragaman budaya Indonesia," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 5, No. 2 (2003): 1-13; Parsudi Suparlan, "Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan?," *Antropologi Indonesia*, Vol. 72 (2003); Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: Wahid Institute, 2009); Farid Masdar Mas'udi, *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam* (Ciputat: Pustaka Alvabet, 2010).

³ Nurholish Madjid, "Islamic Roots of Modern Pluralism: Indonesian Experience," *Studia Islamika*, Vol. 1, No. 1 (1994); Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2001); Jeremy Menchik, *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016).

⁴ The Wahid Foundation, *A Measure of the Extent of Socio-Religious Intolerance and Radicalism within Muslim Society in Indonesia* (Jakarta: Wahid Foundation and Lembaga Survei Indonesia, 2017), h. 10.

Sebelum tahun 2008, kasus-kasus intoleransi di Indonesia perkembangannya tidak berubah karena masih di bawah 50 kasus.⁵ Jumlah kasus yang ada berfluktuasi dari 55 hingga 93 kasus di sepanjang tahun 2008-2010.⁶ Para aktor intoleransi di antaranya adalah aparat negara, organisasi Islam, kelompok Muslim garis keras dan lainnya. Sementara itu, korban intoleransi ini terutama adalah kelompok-kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, Syiah, Kristen dan para penganut agama atau kepercayaan lokal. Di tahun 2011, jumlah kasus yang ada meningkat dua kali lipat, yakni 185 kasus terjadi.⁷ Pada 2012, kasus yang ada menurun menjadi 110,⁸ tapi meningkat menjadi dua kali lipat, yakni 245, pada 2013.⁹ Jumlah kasus yang ada meningkat secara berangsur-angsur yakni dari 158, 190, 204 hingga 213, berturut-turut di sepanjang tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017.¹⁰

Di tahun 2018, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Convey Indonesia menyelenggarakan penelitian mengenai isu intoleransi dan hubungannya dengan wacana jihad dan terorisme. Penelitian tersebut melibatkan 1859 siswa dan mahasiswa, serta 322 guru dan dosen di 34 propinsi dan 68 kota di Indonesia.¹¹ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 86% di antara siswa dan mahasiswa, dan 87.89% dari guru dan dosen yang menjadi responden, setuju bahwa pemerintah harus melarang keberadaan kelompok-kelompok keagamaan minoritas yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam.¹² Di antara seluruh responden yang ada, 91.23% di antaranya setuju bahwa syariat Islam harus diterapkan pada level negara, 37.71% setuju bahwa jihad bermakna "*qital*" atau mengangkat senjata berperang melawan non-Muslim, 37.71% setuju bahwa bom bunuh diri adalah bagian dari ajaran jihad di dalam Islam, dan 61.92% memahami bahwa sistem kekhalifan merupakan sistem pemerintahan yang diakui di dalam Islam.¹³

Berdasarkan penjelasan data-data tersebut di atas, jelas bahwa kasus intoleransi keagamaan, meningkat terus-menerus. Hal ini berimplikasi bahwa, sesungguhnya tingkat radikalisme keagamaan yang disertai dengan kekerasan di Indonesia masalah tinggi dan hal tersebut sangat memungkinkan memberikan dampak yang negatif bagi negara dan masyarakat.

⁵ The Wahid Institute, *Laporan Tahunan The Wahid Institute 2008: Pluralisme Beragama/Berkeyakinan di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2008).

⁶ Ibid.; The Wahid Institute, *Annual Report Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2009* (Jakarta: The Wahid Institute, 2009); The Wahid Institute, *Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi 2010* (Jakarta: The Wahid Institute, 2010).

⁷ The Wahid Institute, *Laporan Kebebasan Beragama dan Toleransi di Indonesia 2011* (Jakarta: The Wahid Institute, 2011).

⁸ The Wahid Institute, *Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Intoleransi 2012* (Jakarta: The Wahid Institute, 2012).

⁹ The Wahid Institute, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2013* (Jakarta: The Wahid Institute, 2013).

¹⁰ The Wahid Institute, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2014* (Jakarta: The Wahid Institute, 2014); The Wahid Institute, *Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2015); The Wahid Foundation, *Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2016); The Wahid Foundation, *A Measure of the Extent of Socio-Religious Intolerance and Radicalism within Muslim Society in Indonesia* (Jakarta: Wahid Foundation and Lembaga Survei Indonesia, 2017).

¹¹ PPIM UIN Jakarta dan Convey, *Api dalam Sekam: Keberagaman Muslim Gen-Z, Survei nasional tentang Keberagaman di Sekolah dan Universitas di Indonesia* (Jakarta: PPIM UIN Jakarta and Convey Indonesia, 2018).

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

Terorisme

Ketika rezim otoritarian Soeharto jatuh pada 1998, pelbagai konflik keagamaan yang didorong oleh kontestasi politik muncul ke permukaan. Beberapa huru-hara meledak di berbagai wilayah, antara lain, Ambon, Sulawesi dan Poso, Maluku.¹⁴ Di tahun 2002, Indonesia harus berhadapan dengan kasus Bom Bali.¹⁵ Kasus itu sendiri memakan korban 202 orang dan Jamaah Islamiyah (JI) sebagai cabang al-Qaeda di Asia Tenggara mengklaim bertanggungjawab atas peristiwa tersebut. Hal yang sungguh keji ini kemudian disusul oleh pelbagai kasus terorisme besar lainnya, hingga tahun 2009.

Di tahun 2003, aksi klandestin JI telah menyebabkan meledaknya bom di Hotel J.W. Marriot, Jakarta. Bom ini membunuh 11 orang dan melukai 152 lainnya secara serius.¹⁶ Di tahun 2004, 5 orang meninggal dan ratusan lainnya mengalami luka berat, oleh karena bom berdaya-ledak tinggi yang diledakkan di Kedutaan Besar Australia, Jakarta.¹⁷ Setahun kemudian, bom terbesar kedua telah meluluh-lantakkan Kuta, Bali, dan menghilangkan nyawa sekurang-kurangnya 22 orang, serta melukai lebih dari seratus orang.¹⁸ Itulah bom para teroris yang dianggap paling traumatis karena secara signifikan telah mengganggu keamanan nasional Indonesia.

Pelbagai kasus tersebut di atas, telah melibatkan pelbagai jaringan teroris JI. Indonesia tidak menghadapi pelbagai kasus terorisme sampai tahun 2009, yang mana, sepasang bom telah diledakkan di Hotel J.W. Marriot dan Ritz Carlton, Jakarta.¹⁹ Kedua bom tersebut membunuh 7 orang dan melukai 50 lainnya. Segala destruksi dan trauma yang disebabkan oleh terorisme tersebut telah menunjukkan adanya periode yang paling kelam yang harus dihadapi Indonesia pada dekade pertama Pasca Reformasi.

Pada dekade kedua Reformasi (2010-2017), kasus-kasus teror yang dimotivasi oleh ideologi keagamaan ekstrem secara berangsur-angsur menurun, meskipun beberapa kasus kecil muncul terutama merupakan dampak dari adanya persoalan politik global yang melibatkan *The Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Pada 14 Januari 2016 misalnya, salah satu jaringan ISIS di Indonesia menyerang masyarakat

¹⁴ K.E. Schulze, "Laskar Jihad and the conflict in Ambon," *The Brown Journal of World Affairs*, Vol. 9, No. 1 (2002): 57-69; Rizal Sukma, "Ethnic Conflicts in Indonesia: Causes and the Quest for Solution," dlm. Kusuma Snitwongse (ed.), *Ethnic Conflicts in Southeast Asia* (Singapore: ISEAS-Yusuf Ishak Institute, 2005), h. 1-41; K.E. Schulze, "The 'Ethnic' in Indonesia's Communal Conflicts: Violence in Ambon, Poso, and Sambas," *Ethnic and Racial Studies*, Vol. 40, No. 12 (2017), h. 2096-2114.

¹⁵ K. Ramakrishna, dan S.S. Tan, *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia* (Singapore: World Scientific and Institute of Defence and Strategic Studies, 2003); B. Singh, "The Challenge of militant Islam and Terrorism in Indonesia," *Australian Journal of International Affairs*, Vol. 58, No. 1 (2004): 47-68; J. Magouirk, S. Atran, dan M. Sageman, "Connecting Terrorist Networks," *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 31, No. 1 (2008): 1-16; B. West, "Collective Memory and Crisis: the 2002 Bali Bombing, National Heroic Archetypes and the Counter-Narrative of Cosmopolitan Nationalism," *Journal of Sociology*, Vol. 44, No. 4 (2008): 337-353; F. Galamas, "Terrorism in Indonesia: an Overview," *Research Papers*, Vol. 4 (2015): 215; A.S. Zora, "Terrorism in Indonesia: A review on Rehabilitation and Deradicalization," *Journal of Terrorism Research*, Vol. 6, No. 2 (2015): 36-56.

¹⁶ G.S. Oak, "Jamaah Islamiyah's Fifth Phase: the Many Faces of a Terrorist Group," *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 33, No. 11 (2010): 989-1018.

¹⁷ M. Subhan, "Pergeseran Orientasi Gerakan Terorisme Islam di Indonesia (Studi Terorisme Tahun 2000-2015)," *Journal of International Relations*, Vol. 2, No. 4 (2016): 59-67.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.; Rizal Sukma, J. Ma'ruf, dan K. Abdullah, "The Attitude of Indonesian Muslims Towards Terrorism: an Important Factor in Counter-Terrorism?," *Journal of Human Security*, Vol. 7, No. 1 (2001): 21.

umum di Jalan Thamrin Jakarta dan mengakibatkan hilangnya nyawa 8 orang.²⁰ Kasus yang lebih kecil terjadi di Surabaya pada 8 Juni, di Surakarta pada 5 Juli, di Medan pada 28 Agustus dan di Samarinda pada 13 November di tahun yang sama.²¹ Tercatat, tidak ada korban jiwa dari kasus-kasus tersebut. Akan tetapi di tahun 2018, terdapat tiga kasus yakni penyerangan gereja oleh para teroris pada 13 dan 16 Mei, serta 3 Juni. Kasus yang pertama terjadi telah membunuh 11 orang dan melukai 50 lainnya.²² Di tahun ini (2019), hanya ada satu kasus di Sukoharjo, pada 3 Juni.²³ Tidak ada korban jiwa pada kasus yang disebutkan terakhir tersebut. Dari kasus-kasus yang ada, cabang organisasi teroris ISIS di Asia Tenggara seperti misalnya Jamaah Anshar al-Daulah (JAD) dan Jamaah Anshar al-Tauhid (JAT) mengklaim bertanggungjawab atas segala yang terjadi di sepanjang dekade kedua Pasca Reformasi.

Akan tetapi, ada kasus penting lainnya yang dipicu oleh karena adanya fenomena ISIS. Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes POLRI) di Jakarta telah merilis dokumen resmi yang bersisi daftar para pimpinan teroris dan aktor internasional lainnya.²⁴ Di saat yang sama, Mabes POLRI melalui Kepala Humas, Setyo Wasisto, menyatakan bahwa terdapat 671 warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS dan berangkat ke Irak dan Suriah.²⁵ Dari data termutakhir yang datang dari Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyatakan bahwa para jihadis Indonesia yang berangkat ke Suriah sejumlah 590 orang; 103 di antaranya telah meninggal, 86 kembali ke tanah air, dan 539 lainnya telah dideportasi.²⁶ Selain itu, 57 Islamis radikal asal Indonesia telah berangkat ke Filipina; 5 masih hidup, 32 telah terbunuh, dan 7 lainnya dideportasi.²⁷

A.2 Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai “*The Guardian of the Moderate Indonesia Islam*”

²⁰ A. Fenton dan D. Price, “ISIS, Jihad and Indonesian Law: Legal Impacts of the January 2016 Jakarta Terrorist Attacks,” *Issues in Legal Scholarship*, Vol. 14, No. 1 (2016): 1-26; Y.P. Suratman, “The Effectiveness of De-radicalization Program in Southeast Asia: Does It Work? The Case of Indonesia, Malaysia, and Singapore,” *Journal of Asian Studies*, Vol. 5, No. 2 (2017): 135-156; H.F. Sundoko, R. Akbar, D. Zulkaidi, dan T.A. Argo, “Toward a Defensive Global City: Urban (In)security in an Age of Terror—The Case of Jakarta, Indonesia,” in *Metropolitan Governance in Asia and the Pacific Rim* (Singapore: Springer, 2018), h. 33-56; Gary van Klinken, *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars* (London; New York: Routledge, 2007).

²¹ Subhan, “Pergeseran Orientasi Gerakan Terorisme”.

²² I.A. Irawan, “Pergeseran Orientasi Terorisme di Indonesia 2000-21018,” *kumparan.com* 17 Mei 2018, <https://kumparan.com/erucakra-garuda-nusantara/pergeseran-orientasi-terorisme-di-indonesia-2000-2018> (Diakses 7 Juni 2019).

²³ The Jakarta Post, “Central Java Police Investigate Failed Suicide Bombing in Kartasura,” [thejakartapost.com](https://www.thejakartapost.com/news/2019/06/04/c-java-police-investigate-failed-suicide-bombing-in-kartasura.html) 4 Juni 2019, <https://www.thejakartapost.com/news/2019/06/04/c-java-police-investigate-failed-suicide-bombing-in-kartasura.html> (Diakses 7 Juni 2019).

²⁴ POLRI, *Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris* (Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar, 2017).

²⁵ A.N.K. Movanita, “671 orang WNI bergabung dengan kelompok teroris di Irak dan Suriah,” *nasional.kompas.com* 20 September 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/20/07582791/671-orang-wni-bergabung-dengan-kelompok-teroris-di-irak-dan-suriyah?page=all> (Diakses 7 Juni 2019).

²⁶ Kumparan, “Moeldoko: 590 WNI masih berada di Suriah untuk gabung ISIS”, *kumparan.com* 22 Mei 2018, <https://kumparan.com/@kumparannews/moeldoko-590-wni-masih-berada-di-suriyah-untuk-gabung-isis> (Diakses 7 Juni 2019).

²⁷ Kumparan, “Moeldoko: 590 WNI masih berada di Suriah untuk gabung ISIS”, *kumparan.com* 22 Mei 2018, <https://kumparan.com/@kumparannews/moeldoko-590-wni-masih-berada-di-suriyah-untuk-gabung-isis> (Diakses 7 Juni 2019).

Banyak kalangan yang menyatakan bahwa karakter penting dari Islam Indonesia adalah moderatismenya. Islam Indonesia sendiri selama ini dikenal sebagai Islam yang mampu hidup beriringan dengan ide-ide pluralisme dan toleransi. Islam Indonesia diyakini sebagai Islam toleran sejak mula dia datang ke Indonesia. Ide-ide Islam yang sangat menghargai keragaman masuk ke Indonesia, sebuah wilayah yang telah memiliki sejarah panjang dalam hal toleransi. Posisi moderat ini terutama direpresentasikan oleh dua organisasi Islam besar: Nahdlatul Ulama (NU) yang bercorak tradisional dan Muhammadiyah yang bercorak modernis.²⁸

NU dan Muhammadiyah diakui sebagai organisasi keislaman paling penting dalam mengembangkan Islam moderat di Indonesia. Moderatisme keduanya secara langsung lahir dari formula keislaman yang mereka kembangkan dari sumber normatif Islam. Ajaran yang dikembangkan dua organisasi ini akhirnya menjadi panduan bagi pengikutnya dalam mengembangkan pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan keagamaan yang moderat.

Dua organisasi ini diklasifikasikan sebagai moderat setidaknya karena ajaran teologisnya yang bercorak non-kekerasan. Di samping itu, dua organisasi ini juga menyepakati ide Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), salah satu isu penting yang selalu ditolak oleh kalangan Muslim garis keras di Indonesia. Bagi kedua organisasi ini, NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika sesungguhnya adalah manifestasi prinsip-prinsip dasar Islam moderat, yaitu Islam sebagai *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi alam semesta).²⁹

Dalam konteks nilai-nilai modern, kedua organisasi ini tidak menolak demokrasi dan hak asasi manusia, dua nilai utama modernitas. Demokrasi dipandang bukan saja nilai universal yang hanya bisa tumbuh di dunia Barat, tapi juga sesuai dengan ajaran Islam. Menurut mereka, ajaran Islam sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM modern, dua pilar penting bagi kemanusiaan dan kebangsaan di era modern. Islam sendiri bersifat demokratis, oleh karenanya tidak ada alasan menolak demokrasi.³⁰

NU yang lahir pada 31 Januari 1926 di Surabaya ini sejak awal tidak hanya didorong oleh motif agama. Setidaknya ada tiga motif penting di balik lahirnya NU: agama, nasionalisme, dan mempertahankan paham *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah* (Aswaja).³¹ Secara literal, Aswaja adalah pengikut Sunnah Nabi dan jama'ah, yang merupakan ajaran kesalehan dan kebenaran yang dicontohkan oleh Nabi, para Sahabat, dan generasi awal (*al-salaf al-shalih*) yang dianggap sebagai garansi kebenaran Islam.

Sebagaimana organisasi yang pendiriannya didorong oleh para kiai, NU banyak dihuni oleh kelompok ahli agama yang mendapatkan didikan pesantren. Mereka memiliki posisi penting di dalam komunitasnya dan menempati peran kunci dalam melakukan transformasi sosial. Mereka berperan sebagai pemimpin keagamaan umatnya. Mereka adalah para kiai atau alumni pesantren yang sangat ahli dalam keilmuan Islam klasik.³²

²⁸ Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamics in a Global Context* (Jakarta: Equinox Publishing, 2006), 60-64.

²⁹ Masdar Hilmy, "Whither Indonesia's Islamic Moderatism? A Reexamination on The Moderate Vision of Muhammadiyah and NU," *Journal Of Indonesian Islam*, Vol. 07, No. 01 (June 2013), 32.

³⁰ *Ibid.*, 32-33.

³¹ Baca Choirul Anam, *Pertumbuhan & Perkembangan NU* (Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010).

³² Abdurrahman Mas'ud (2004), *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi*, Yogyakarta: LKiS, hlm. 9.

Setelah menerima Pancasila sebagai ideologi negara pada Mukhtamar 1984 di Situbondo, sebuah peristiwa yang selanjutnya banyak dikenal dengan istilah “Kembali ke Khittah 1926”, orientasi keagamaan NU semakin jelas menuju ke arah moderatisme Islam. Untuk mendukung landasan Islam moderat, NU memaknai ulang doktrin *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama’ah* (Aswaja). Aswaja sendiri memiliki beragam corak pemikiran dan gerakan, termasuk kelompok-kelompok Islam yang bisa diidentifikasi sebagai radikal, namun Aswaja di tangan NU dimuati dengan pesan-pesan ke-Islaman yang moderat.³³ Tidak mengherankan jika NU secara sadar membedakan Aswaja-nya dengan istilah *Aswaja al-Nahdliyyah*.

Teologi moderatisme NU ditopang oleh tiga prinsip penting: *tawassuth* (moderat), *i’tidal* (tengah-tengah), dan *tawazun* (seimbang). Konsep *tawassuth* diturunkan dari al-Qur’an surah al-Baqarah; 143; *i’tidal* dari al-Qur’an surah al-Ma’idah; 8; dan *tawazun* dari al-Qur’an al-Hadid: 25. Ketiga prinsip ini sepenuhnya meletakkan NU dalam posisi sebagai organisasi Islam moderat. Manifestasi dari prinsip ini selanjutnya diaplikasikan ke dalam seluruh aspek kehidupan sosial-keagamaan: akidah, syari’ah, tasawwuf, akhlaq, sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara, budaya dan peradaban, dakwah, dan lain-lain.³⁴

Penerapan prinsip moderatisme ini terlihat jelas dalam sikap NU terhadap budaya. Bagi NU, mempertahankan tradisi memiliki makna penting dalam kehidupan keagamaan. Suatu tradisi tidak bisa dihapus seluruhnya, juga tidak bisa diterima seluruhnya. Prinsip NU dalam memperlakukan tradisi termaktub dalam kaidah ‘*al-muhafadlat ala al-qadim al-shalih wa al-akhdhu bi al-jadid al-ashlah*’ (mempertahankan tradisi lama yang baik dan mencipta tradisi baru yang lebih baik).³⁵

Sikap moderat NU dalam dakwah biasanya disandarkan pada cara-cara dakwah Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Apa yang dilakukan Wali Songo adalah akulturasi antara Islam dan budaya. Cara inilah yang menjadikan Islam diterima masyarakat Nusantra saat itu. Kehadiran Islam tidak mengusik budaya yang telah ada.³⁶

Dalam membicarakan moderatisme NU, penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana NU mendekati sumber ajaran Islam, al-Qur’an dan hadits. Sekalipun tidak mungkin memahami moderatisme NU tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal non-agama, namun seluruh upaya menformulasikan konsep moderatisme Islam pada akhirnya ditentukan oleh bagaimana umat Islam mendekati dan memahami al-Qur’an dan hadits. Bagaimana pun juga al-Qur’an dan Hadits adalah sumber utama ajaran Islam.

Dalam memahami kedua sumber primer Islam tersebut, NU membangun keseimbangan antara penggunaan wahyu (*naqliyah*) dan rasio (*’aqliyah*) sehingga mampu merespon berbagai perubahan di masyarakat secara kreatif tanpa kehilangan pijakan normatifnya. Perangkat metodologis yang digunakan NU antara lain *ushul al-fiqh* (prinsip-prinsip hukum Islam), *al-maslahah* (kebaikan umum), *istihsan* (kebaikan), dll.³⁷ Penggunaan perangkat metodologis ini memberi peluang

³³ KH. Achmad Siddiq, *Khittah Nahdliyyah* (Surabaya: Khalista & LTN-NU Jawa Timur, 2006), 27.

³⁴ KH. Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah & Ajaran: Refleksi 65 Th. Ikut NU* (Surabaya: Khalista, 2007), 69-73.

³⁵ Zamakhsyari Dhofier (1994), *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, hlm. 65.

³⁶ Abdul Mun’im DZ (2007), “Pergumulan Pesantren dengan Kebudayaan”, dalam Badrus Sholeh (ed.), *Budaya Damai Komunitas Pesantren*, Jakarta: LP3ES, hlm. 41.

³⁷ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 170.

bagi berbagai eksperimen dan artikulasi pemikiran yang dapat membawa kreativitas dan kebebasan berpikir. Tradisi intelektual NU banyak dibentuk dari cara-cara berpikir seperti ini, terutama dalam merespon isu-isu aktual. Tendensi progresivitas dan bahkan liberal di tubuh NU bisa dijelaskan dalam kerangka ini.

Organisasi yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta ini hadir dengan slogan “Kembali kepada al-Qur’an dan Hadits”. Memang, slogan seperti ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, slogan ini bisa memainkan peran pembaharuan di tengah kejumudan umat Islam, dengan cara kembali kepada elan vital Islam sesungguhnya. Namun di sisi lain, ketika reformasi Islam telah terinstitusionalisasi, slogan tersebut dapat menggiring ke arah kemapanan orotodoksi dan membuat Muhammadiyah menjadi kelompok puritan.³⁸ Ini adalah jebakan epistemologis slogan ‘Kembali kepada al-Qur’an dan Hadits’.

Sekalipun demikian, perlu dicatat bahwa Muhammadiyah lahir dengan DNA kemajuan yang sangat kuat. Muhammadiyah sejak awal menggaungkan reformasi Islam. Aspek *tajdid* (pembaharuan) adalah ruh yang dengannya Muhammadiyah lahir dan tumbuh hingga saat ini. Karakter moderatisme keislaman Muhammadiyah karena kemampuannya menggabungkan antara puritanisme dan modernisme. Dengan kata lain, Muhammadiyah mampu menangkap rasionalitas kehidupan modern melalui pemurnian pemahaman keislaman.³⁹ Karena itu, tidak mengherankan jika Muhammadiyah biasa disebut sebagai Islam modernis⁴⁰ atau reformis atau progresif.⁴¹

Muhammadiyah memang bertujuan untuk memurnikan Islam dan secara terbuka menentang berbagai manifestasi *bid’ah* dan takhayul yang telah meresap dalam masyarakat Jawa, seperti makanan dalam ritual (*slametan* atau *kenduren*), kunjungan ke kuburan dan pemujaan orang-orang kudus, kepercayaan pada jimat dan pusaka sebagai kekuatan magis dan energi suci, dan relik keagamaan yang berasal dari periode Hindu dan Budha di Indonesia. Sekalipun demikian, sejak era Ahmad Dahlan hingga kini, Muhammadiyah menunjukkan sikap keberagamaan yang moderat. Misalnya, meskipun anti-TBC (Tahayul, Bid’ah Churafat), tetapi Muhammadiyah tidak pernah membuat pernyataan resmi mengutuk perayaan ritual Garebeg Maulud oleh Sultan Yogyakarta sebagai *bid’ah* atau *takhayul*.⁴²

Seperti setiap gerakan pembaharuan dalam Islam, kelahiran Muhammadiyah dilatarbelakangi oleh keprihatinan para elit Muslim terhadap keterbelakangan umat

³⁸ James L. Peacock *Purifying the Faith: the Muhammadiyah Movement in Indonesian Islam* (California: The Benjamin/Cumming Publishing Company, 1978), 110.

³⁹ James L. Peacock, *Muslim Puritan: Reformist Psychology in Southeast Asian Islam*, (Berkeley and London: University of California Press, 1978), 18.

⁴⁰ Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1980); Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas dan Eksistensi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015); Irwan Abdullah, *The Muslim Businessmen of Jatinom: Religious Reform and Economic Modernization in a Central Javanese Town* (Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 1994); M. Amin Abdullah “Paradigma Tajdid Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam Modernis-Reformis,” Makalah Seminar Satu Abad Gerakan Tajdid Muhammadiyah Menuju Peradaban Utama: Paradigma, Model, dan Strategi Tajdid, Universitas Muhammadiyah Malang, 21-22 November 2009; Fauzan Saleh, *Modern Trends in Islamic Theological Discourse in Twentieth Century Indonesia* (Leiden: Brill, 2001).

⁴¹ Achmad Jainuri, “The Formation of the Muhammadiyah’s Ideology 1912-1942,” (Ph.D. Dissertation, McGill University, 1997); Ahmad Najib Burhani, *Muhammadiyah Pergeseran dari Puritanism ke Kosmopolitanisme* (Bandung: Mizan, 2015).

⁴² Herman L. Beck, “Islamic Purity at Odds with Javanese Identity: the Muhammadiyah and the Celebration of the Garebeg Maulud Ritual in Yogyakarta,” In Jan Platvoet and Karel van der Toorn (eds.). *Pluralism and Identity: Studies in Ritual Behaviour* (Leiden: E.J. Brill, 1995), 261-284.

Islam Indonesia saat itu. Keprihatinan ini mengilhami gerakan pembaharuan Islam di seluruh penjuru dunia Islam. Dalam konteks Indonesia, tanpa gerakan pembaharuan yang dilakukan Muhammadiyah, mustahil kita bisa melihat wajah Islam Indonesia moderat seperti saat ini. Dari Muhammadiyahlah umat Islam Indonesia mengenal ide pembaharuan Islam.

Gelar Muhammadiyah sebagai kelompok modernis salah satunya karena pandangan positifnya terhadap ide-ide dan nilai-nilai modernitas. Melalui perangkat metodologisnya, *tajdid* (pembaharuan), Muhammadiyah mulai memperkenalkan serangkaian gerakan pembaharuan ke dalam tubuh umat Islam Indonesia. Sekalipun menghadapi perlawanan dari kelompok Muslim tradisional, pembaharuan Muhammadiyah terus berjalan hingga pada titik tidak mungkin kembali. Bahkan pelan namun pasti, ide-ide pembaharuan Muhammadiyah banyak mendapat simpati dan dukungan dari kelompok penentangannya, terutama dari kalangan Muslim tradisional. Salah satu dari gerakan pembaharuan Muhammadiyah yang awalnya ditolak Muslim tradisional namun sekarang diterima bersama adalah perubahan bahasa dalam khutbah jum'at maupun Idul Fitri dan Idul Adha, dari Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia atau Bahasa daerah.⁴³

Karakter moderat Muhammadiyah bisa dilihat dari berkembangnya Muhammadiyah di tengah masyarakat Jawa yang kental dengan tradisi heterodoks. Muhammadiyah mampu bernegosiasi dengan kultur masyarakat Jawa, bahkan di wilayah pedesaan, dengan baik. "Islam Murni" ala Muhammadiyah di daerah pedesaan bisa bertahan setelah melakukan berbagai "modifikasi" dan "adaptasi" dengan realitas sosial politik setempat. Masyarakat petani menerima Islam murni setelah disesuaikan dengan pola hidup petani. Sebaliknya, pihak Islam murni melalui peran elite di tingkat lokal melakukan modifikasi (pelonggaran) untuk memperoleh massa yang lebih banyak.⁴⁴

Berdasarkan studinya di Desa Wuluhan Jember-Jawa Timur, Mulkhan mendapatkan empat kategori warga Muhammadiyah. *Pertama*, Muhammadiyah "Ikhlas" (Mukhlas), yaitu warga Muhammadiyah yang memiliki tendensi puritan yang kuat. *Kedua*, warga Muhammadiyah "Ahmad Dahlan", (Muda) yang memiliki karakter moderat-inklusif dalam berinteraksi dengan kelompok lain namun tetap berpegang kuat pada landasan keagamaan dan norma organisasi Muhammadiyah. *Ketiga*, "Muhammadiyah-Nahdlatul Ulama" (Munu), yaitu warga Muhammadiyah yang tetap menjalankan berbagai tradisi sinkretik dan peribadatan kaum tradisional. *Keempat*, "Marhaenis-Muhammadiyah" (Marmud), yaitu warga Muhammadiyah yang memiliki pandangan politik yang "ke-kiri-kirian", pengagum Soekarno, dan simpatisan partai nasionalis, dan juga punya orientasi politik nasionalis sekular yang kuat.⁴⁵

Burhani menilai bahwa karakter keislaman Muhammadiyah adalah moderat pragmatis. Muhammadiyah itu moderat dalam praktik sekalipun konservatif dalam keyakinan.⁴⁶ Atau dalam bahasa Mu'ti, Muhammadiyah itu "Puritan yang Pluralis".

⁴³ W. Sairin, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995); Abdul Munir Mulkhan, *Kiai Ahmad Dahlan: Jejak Pembaruan Sosial dan Kemausiaan, Kado Satu Abad* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 236.

⁴⁴ Abdul Munir Mulkhan, *Islam Murni dan Masyarakat Petani* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000); Abdul Munir Mulkhan, "Gerakan Pemurnian Islam di Pedesaan", *Disertasi* (Yogyakarta: UGM, 1999); Mitsuo Nakamura, *The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town 1910-2010* (Singapore: ISEAS, 2012).

⁴⁵ *Ibid.*, 355.

⁴⁶ Ahmad Najib Burhani, "Pluralism, Liberalism and Islamism: Religious Outlook of Muhammadiyah", *Studia Islamika*, Vol. 25, No. 3 (2018), 457-458.

Secara teologis, Muhammadiyah itu puritanis dan berkomitmen menegakkan akidah Islam yang murni, Tauhid yang jauh dari kemusyrikan. Sekalipun demikian, Muhammadiyah memiliki sikap pluralis yang jelas. Sikap pluralis di dalam Muhammadiyah memiliki tiga landasan. *Pertama*, dalam bidang keagamaan Muhammadiyah tidak terikat kepada salah satu mazhab. *Kedua*, Muhammadiyah meyakini paham relativisme pemikiran di mana kebenaran suatu pemikiran atau hasil ijtihad bersifat subyektif-relatif dan terbuka untuk dikaji ulang. *Ketiga*, dalam bidang muamalah-duniawiyah (sosial-kemasyarakatan) Muhammadiyah memiliki prinsip terbuka untuk belajar dari berbagai sumber.⁴⁷

Terlepas dari berbagai dinamika yang ada, adalah tidak mungkin mengingkari peran kunci NU dan Muhammadiyah dalam mengembangkan kehidupan keislaman yang moderat di Indonesia. Sejak dari awal, kedua organisasi ini telah dikembangkan dalam kerangka moderatisme Islam yang jauh dari nilai-nilai kekerasan.

Mempertimbangkan bahwa NU dan Muhammadiyah adalah organisasi keislaman dengan jumlah anggota yang sangat besar, tingginya angka kekerasan dengan sentimen agama di Indonesia saat ini bisa dikatakan adalah sebuah ironi. Tidak pernah ada data konkret berapa jumlah anggota NU dan Muhammadiyah. Namun jika pengakuan orang per orang dijadikan sebagai acuan, data Indikator Politik Indonesia bisa menjadi referensi betapa besarnya pengikut kedua organisasi tersebut. Berdasarkan survey Indikator Politik Indonesia pada Pilpres 2019, dari 207,2 juta (87,2%) Muslim Indonesia, 52,8% mengidentifikasi dirinya berafiliasi dengan NU dan 6,1% berafiliasi dengan Muhammadiyah.⁴⁸ Itu berarti pengikut kedua organisasi tersebut sebesar 58,9% atau sekitar 122,04 juta.

Jika moderasi ke-Islaman NU dan Muhammadiyah mampu mewarnai kehidupan keagamaan (ke-Islaman) di Indonesia, maka bisa dipastikan intoleransi dan kekerasan agama hanya menjadi kasus pinggiran dalam kehidupan keagamaan di Indonesia. Namun, angka intoleransi dan kekerasan keagamaan terbilang tinggi.

B. Tujuan

Dari berbagai pertimbangan di atas, penelitian ini bisa dikatakan hendak mengukur jarak antara Islam moderat yang dikembangkan oleh NU dan Muhammadiyah (idealita) dengan kenyataan di bawah (realita). Penelitian ini berangkat dari data bahwa ruang publik keagamaan (Keislaman) semakin dipenuhi dengan wacana dan gerakan yang didorong oleh agenda-agenda kelompok radikal. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa bahwa NU dan Muhammadiyah mulai kehilangan pengaruh dibanding dengan kelompok-kelompok radikal, baik dalam hal pewacanaan maupun gerakan.

Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dukungan apa yang dibutuhkan NU dan Muhammadiyah dalam meneguhkan dirinya sebagai organisasi

⁴⁷ Abdul Mu'ti, "Akar Pluralisme dalam Pendidikan Muhammadiyah", *Afkaruna*, Vol. 12 No. 1 (Juni 2016).

⁴⁸ "Indikator Politik: NU Kunci Kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019," <https://nasional.sindonews.com/read/1421990/12/indikator-politik-nu-kunci-kemenangan-jokowi-maruf-amin-di-pilpres-2019-1563550867>, diakses pada 22 Juli 2019.

Islam moderat dalam memperkuat moderasi keagamaan di Indonesia dalam konteks menguatnya pengaruh kelompok-kelompok Islam intoleran-radikal di masyarakat. Untuk itu, yang harus diketahui terlebih dahulu adalah pandangan NU dan Muhammadiyah tentang situasi kehidupan keagamaan di Indonesia saat ini dan dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari sini, penelitian ini melangkah pada identifikasi apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah dalam menangkai radikalisme dan berbagai hambatan yang dihadapi.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang mengangkat tema NU dan Muhammadiyah dalam kaitannya dengan fenomena radikalisme di Indonesia telah banyak dilakukan oleh beberapa ahli. Setidaknya, penelitian-penelitian itu bisa dibagi menjadi dua kelompok besar: radikalisasi di dalam tubuh NU dan Muhammadiyah serta upaya yang dilakukan dua organisasi tersebut dalam menangkai radikalisme.

Buku *Ilusi Negara Islam* adalah salah satu buku yang secara lugas menyoroti fenomena infiltrasi kelompok Islam radikal ke dalam NU dan Muhammadiyah, dua organisasi keislaman yang selama ini dikenal sebagai pilar utama Islam moderat Indonesia. Di dalam buku ini, kedua organisasi tersebut menjadi target dari upaya radikalisasi kelompok-kelompok Islam garis keras. Kelompok garis keras ini tidak hanya menyusup ke dalam organisasi NU dan Muhammadiyah, tapi juga “mengambil alih” masjid dan sekolahan, bahkan sudah masuk ke pesantren-pesantren.⁴⁹

Fenomena radikalisasi di internal NU dan Muhammadiyah secara lugas disorot oleh Hilmy.⁵⁰ Ditemukan fenomena di mana pengikut NU dan Muhammadiyah, sekalipun memiliki landasan teologis Islam moderat, cenderung bersikap dan bertindak yang kurang lebih tipikal Islam radikal. Fenomena ini akan terlihat jelas jika pandangan kita didekatkan pada kasus-kasus spesifik. Kajian Hamdi menunjukkan rapatnya relasi NU dengan FPI di Pulau Madura yang notabene adalah basis NU di Jawa Timur.⁵¹

Fenomena ini jelas meresahkan kalangan NU dan Muhammadiyah. Suara internal Muhammadiyah jelas menunjukkan keresahan itu. Melalui tulisan pendek, “Muhammadiyah dan Terorisme”, Benni Setiawan, Anggota Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menuliskan berbagai hal yang seharusnya dilakukan Muhammadiyah untuk membentengi kadernya dari jeratan radikalisme dan terorisme.⁵²

Beberapa penelitian yang melihat peran kedua organisasi tersebut juga telah dilakukan, salah satunya adalah yang ditulis Taufiqurrahman.⁵³ Studi ini menunjukkan berbagai upaya NU dalam memperkenalkan moderatisme Islam ala

⁴⁹ Abdutrrahman Wahid (Ed.), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, Maarif Institute, 2009).

⁵⁰ Masdar Hilmy, “Whither Indonesia’s Islamic Moderatism? A Reexamination on The Moderate Vision of Muhammadiyah and NU,” *Journal Of Indonesian Islam*, Vol. 07, No. 01 (June 2013).

⁵¹ Ahmad Z. Hamdi, “Radicalizing Indonesian Moderate Islam from Within: The NU-FPI Relationship in Bangkalan, Madura,” *Journal Of Indonesian Islam*, Vol. 07, No. 01 (June 2013).

⁵² Beni Setiawan, “Muhammadiyah Dan Terorisme,” *Koran Republika*, 17 November 2015.

⁵³ Taufiqurrahman, “Peran Nahdlatul Ulama Dalam Menangkai Gerakan Radikalisme Global di Indonesia,” Skripsi pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang 2017.

NU ke dalam masyarakat Muslim dunia. Tulisan Siregar juga menyoroti upaya NU dalam membentengi umatnya dari ideologi radikalisme. Studi ini melihat kiprah dakwah NU di Medan dalam melawan Islam radikal.⁵⁴ Sementara deradikalisasi NU di dunia pendidikan Islam diungkap oleh Shidqi.⁵⁵

Berbagai upaya Muhammadiyah dalam menghadang radikalisme dan terorisme bisa dilihat dalam kumpulan tulisan yang diterbitkan oleh Jurnal Maarif. Di salah satu edisinya, jurnal ini secara khusus membincang tentang berbagai upaya Muhammadiyah dalam membendung arus radikalisme. Setidaknya, ada tiga tulisan yang perlu diperhatikan, yaitu tulisan Zuhri yang menyoroti strategi deradikalisasi Muhammadiyah;⁵⁶ Rosviana yang memaparkan berbagai upaya Aisyiah, organisasi perempuan Muhammadiyah, dalam membendung radikalisme-terorisme;⁵⁷ dan Qibtiyah yang mengulas eksperimen Madrasah Perempuan Berkemajuan yang melaluinya Islam damai disebar.⁵⁸

Yang tidak kalah penting untuk disebut adalah tulisan Biyanto yang menyoroti pengalaman Muhammadiyah dengan ide Pluralisme.⁵⁹ Menurutnya, Muhammadiyah berkomitmen terhadap Islam moderat dan ramah terhadap keanekaragaman agama dan kultur. Selain melalui kiprah tokoh-tokohnya, komitmen Muhammadiyah juga ditunjukkan melalui berbagai lembaga pendidikannya yang melayani anak-anak dari berbagai etnis, golongan, dan agama. Kiprah Muhammadiyah bidang ini terutama sangat terasa di daerah-daerah yang berpenduduk minoritas Muslim.

Yang membedakan dari berbagai studi di atas, penelitian ini sekalipun melihat arus radikalisme di tubuh NU dan Muhammadiyah serta melihat berbagai upaya yang telah dilakukan kedua organisasi tersebut, namun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkuat berbagai upaya kedua organisasi tersebut melalui berbagai dukungan yang dibutuhkan. Penelitian ini tidak melakukan analisis perbandingan terkait dengan efektivitas dan massivitas upaya-upaya kedua organisasi, karena, sekali lagi, yang menjadi titik tekan di sini adalah menemukan berbagai dukungan untuk memperkuat kedua organisasi tersebut dalam menghadapi arus radikalisme keagamaan di Indonesia saat ini.

D. Klarifikasi Metodologis

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap para pengurus dan/atau aktivis Muhammadiyah dan NU, dari pengurus pusat hingga level terbawah. Diskusi kelompok juga menjadi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Sebanyak 133 responden telah diwawancarai.

⁵⁴ Raja Inal Siregar, "Strategi Dakwah Nahdlatul Ulama dalam Membentengi Warga Nahdliyin dari Radikalisme (Studi Kasus Penu Kota Medan)," Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2017.

⁵⁵ Ahmad Shidqi, Respon Nahdlatul Ulama (NU) Terhadap Wahabisme dan Implikasinya bagi Deradikalisasi Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. II, No. 1 (Juni 2013).

⁵⁶ Saefuddin Zuhri, "Muhammadiyah dan Deradikalisasi Terorisme di Indonesia: Moderasi sebagai Upaya Jalan Tengah," *Maarif*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2017), 73-82.

⁵⁷ Sri Rosviana, "Muhammadiyah-Aisyiah Membendung Radikalisme dan Terorisme," *Maarif*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2017), 94-108.

⁵⁸ Alimatul Qibtiyah, "Madrasah Perempuan Berkemajuan (MPB): Upaya Menyebarkan Agama Damai," *Maarif*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2017), 109-127.

⁵⁹ Biyanto, Pengalaman Muhammadiyah Membumikan Nilai Membumikan Nilai-Nilai Pluralisme, *Islamica*, Vol. 7, No. 2 (Maret 2013).

Data-data juga dikumpulkan melalui literatur review, baik terkait dengan dokumen resmi yang dikeluarkan NU dan Muhammadiyah, karangan yang ditulis oleh para elit NU dan Muhammadiyah, dan berbagai berita media. Karena penelitian ini ingin melihat “jarak” antara wacana keislaman resmi yang dikembangkan NU dan Muhammadiyah dengan realitas empiris di lapangan, data-data juga dikumpulkan melalui observasi. Observasi terutama dilakukan di beberapa kegiatan keagamaan warga NU dan Muhammadiyah di akar rumput untuk melihat kesesuaian wacana keislaman yang disebarkan dengan gagasan keislaman resmi organisasi.

Penelitian ini dilaksanakan dari Maret hingga Agustus 2019. Untuk menghindari bias Pilpres 2019 yang sarat dengan isu-isu keagamaan terkait dengan permainan politik identitas, wawancara dilakukan setelah 17 April 2019 (hari pencoblosan Pileg dan Pilpres). Sekalipun demikian, data-data dokumen telah dikumpulkan sejak Maret 2019. Data-data media yang dikumpulkan terutama yang terkait dengan berita-berita keterlibatan NU dan Muhammadiyah (kelembagaan maupun personal) dalam isu-isu intoleransi dan radikalisme.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yang ingin melihat seberapa kuat pengaruh Muhammadiyah dan NU di masyarakat dalam membendung arus radikalisasi, penelitian ini mengumpulkan data-data berjenjang sesuai dengan struktur organisasi, dari pusat hingga tingkat terbawah. Dalam penjenjangan data ini, penelitian ini tidak mungkin mengelak dari pilihan wilayah ketika harus mengumpulkan data-data tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga komunitas. Sekalipun demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membuat laporan wilayah, namun kecenderungan umum yang ada di Muhammadiyah dan NU. Untuk menghindari kekeliruan dalam penarikan kesimpulan, maka jenjang provinsi dan kabupaten/kota yang dipilih ditentukan berdasarkan penilaian subjektif kedua organisasi tersebut bahwa wilayah terpilih adalah daerah basis NU atau Muhammadiyah. Dalam konteks pilihan ini, baik Muhammadiyah maupun NU menjadikan Jawa Tengah (dan Yogyakarta bagi Muhammadiyah) dan Jawa Timur sebagai provinsi yang menjadi lokus penelitian.

Sekalipun bersifat subjektif, namun pemilihan kedua provinsi tersebut memiliki beberapa alasan. Tokoh-tokoh penting kedua organisasi ini banyak berasal dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. NU dan Muhammadiyah memiliki pengikut yang cukup banyak di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pesatnya perkembangan NU dan Muhammadiyah di kedua wilayah ini juga bisa dilihat dari banyaknya lembaga pendidikan yang dimiliki oleh kedua organisasi ini. Jawa Timur dan Jawa Tengah dipenuhi oleh ratusan pesantren yang berafiliasi ke NU. Sementara, sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah juga berkembang pesat di dua provinsi ini.

Di Jawa Timur, Muhammadiyah memilih Surabaya, Malang dan Lamongan sebagai wilayah penelitian. Ketiga kota tersebut dipilih sebagai lokus penelitian berdasarkan pada pertimbangan bahwa ketiga kota tersebut merupakan basis struktural, intelektual dan kultural Muhammadiyah. Sedangkan di Jawa Tengah, kota yang dipilih sebagai lokus penelitian Muhammadiyah adalah Surakarta dan Sukoharjo. Solo adalah salah satu kota di Jawa Tengah di mana warga Muhammadiyah cukup banyak dan memiliki sejarah perjuangan yang sangat panjang.⁶⁰

⁶⁰ Abdul Basit Adnan dalam Muhammad Ali, *SATV, Cikal Bakal Muhammadiyah Surakarta (Catatan Tambahan untuk Muarif*, <http://solo-kota.muhammadiyah.or.id/id/artikel-satv-cikal-bakal-muhammadiyah-surakarta-catatan-tambahan-untuk-muarif-detail-317.html> , diterbitkan tanggal 06 Desember 2012, diakses tanggal 22 Juni 2019 pukul 15.32 WIB.

Sementara, wilayah penelitian NU di Jawa Timur adalah Kabupaten Situbondo, dengan pertimbangan besarnya massa NU. Diperkirakan, massa NU Situbondo di atas 90% dari seluruh penduduk di wilayah tersebut. Sedangkan lokus penelitian NU di Jawa Tengah adalah Kabupaten Sragen karena dianggap sebagai cabang NU yang cukup baik pengorganisasiannya, terutama dalam keberhasilannya dalam melakukan eksperimen donasi sosial sosial melalui program Koin NU. Pilihan Kabupaten Sragen juga didasarkan pada wilayahnya yang berbatasan dengan wilayah Solo Raya yang dikenal sebagai menjadi basis dari kelompok-kelompok intoleran.

E. Kerangka Konsep

Definisi

Kata radikal secara harfiah berarti berakar atau mendasar, menyeluruh, reformasi politik atau sosial total, atau berpandangan ekstrem.⁶¹ Sebagai istilah netral, istilah radikal tidak hanya merujuk pada gerakan atau kelompok sosial-keagamaan tertentu. Istilah radikal pernah digunakan oleh Nakamura dalam melabeli NU secara positif. Menurut Nakamura, NU adalah tradisionalis-radikal, dalam arti bahwa secara keagamaan NU tetap sebuah ormas Islam tradisionalis, namun sikap dan tindakan politiknya terhadap negara tergolong radikal. Radikal di sini diartikan sebagai sikap kritis yang mendasar, yang dilawankan dengan oportunistik yang selama ini dianggap sebagai sikap dan tindakan politik NU.⁶²

Terkait dengan merebaknya berbagai kekerasan agama dan meledaknya terorisme di mana-mana, istilah radikal mendapatkan makna tambahan. Ia tidak semata-mata diartikan sebagai sebuah sikap dan tuntutan akan perubahan yang mendasar dan menyeluruh, tapi juga disertai dengan tindakan kekerasan.

Istilah 'Islam radikal' yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah **kelompok atau gerakan ke-Islaman yang berjuang melakukan reformasi atau perubahan atas tata kehidupan sosial-budaya-politik secara mendasar dan menyeluruh (termasuk menuntut berdirinya negara Islam, berlakunya shari'ah Islam sebagai hukum negara, dipatuhinya ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat), dan mereka menyetujui kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya, baik mereka melakukan kekerasan atau tidak.** Dalam kaitannya dengan penggunaan kekerasan, istilah 'radikal' bisa berarti sinonim dengan militan yang secara harfiah bermakna "*using force or strong pressure to achieve one's aims*" (menggunakan kekuatan atau tekanan untuk mencapai tujuan).⁶³ Istilah 'militan' dalam pengertian ini juga digunakan Saeed ketika dia melabeli kelompok jihadis seperti Osamah bin Laden sebagai *militant extremist*.⁶⁴

The International Republican Institute (IRI) membagi radikal menjadi dua: *cognitive radical* dan *behavioural radical*. *Cognitive radical* merujuk pada orang yang menyetujui kekerasan tapi tidak mengambil bagian dalam tindakan kekerasan. Sedangkan *behavioral radical* adalah mereka yang menyetujui tindakan kekerasan

⁶¹ AP. Cowie (ed.), *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Ed. IV (Oxford: Oxford University Press, 1994), 1032.

⁶² Mitsuo Nakamura, "The Radical Traditionalism of the Nahdlatul Ulama in Indonesia: A Personal Account of the 26th National Congress, June 1979, Semarang", *Southeast Asian Studies*, Vol. 19, No. 2 (September 1981), 200-201.

⁶³ Cowie (ed.), *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, 784.

⁶⁴ Abdullah Saeed, "Trends in Contemporary Islam: A Preliminary Attempts at a Classification", *The Muslim World*, Vol. 97 (Juli 2007), 398.

dan terlibat dalam atau melakukan aksi kekerasan atas atas ideologi radikal yang diyakininya.⁶⁵

Sekalipun demikian, ada juga yang membedakan antara radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Radikalisme beranasir literalisme, intoleransi, anti-sistem, dan revolusioner. Ketika empat indikator ini ditambahkan dengan kekerasan ia menjadi ekstremisme, dan jika kekerasan itu ditujukan sebagai teror, ia telah bertransformasi menjadi terorisme. Dengan menggunakan cara pandang ini, radikal dalam pengertiannya sebagai tindakan kekerasan yang lahir dari sikap intoleran sama dengan ekstremisme atau terorisme.

Mendefinisikan Islam moderat tidak kalah peliknya, karena istilah ini juga tidak merujuk kepada kelompok tertentu. Dia bisa berwujud pada seorang Muslim konservatif maupun Muslim liberal. Konservatisme dan liberalisme dalam pemahaman keagamaan sama sekali tidak berkonsekuensi pada tindakan kekerasan. Oleh karena itu, istilah 'Muslim moderat' tidak harus mengeluarkan Muslim konservatif dan hanya memasukkan Muslim liberal. Satu hal yang menandai Islam moderat adalah bahwa kelompok ini tidak menyetujui kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan.

Dalam tulisan ini, istilah 'Islam moderat' dimaknai sebagaimana penjelasan Esposito, yaitu:

“Minimal, Muslim moderat adalah mereka yang hidup dan bekerja dalam masyarakat, mengusahakan perubahan dari bawah, menolak ekstremisme agama, dan menganggap kekerasan dan terorisme sebagai sesuatu yang haram. ...[Muslim] moderat merupakan kelompok masyarakat yang sangat beragam dan bermacam-macam yang...bisa menjangkau spektrum dari kelompok konservatif hingga reformis liberal”.⁶⁶

Jadi, Islam moderat merujuk pada kelompok atau gerakan Islam yang melakukan perubahan dari bawah sebagai konsekuensi dari misi dakwah, namun cara-cara yang dilakukan tidak ekstrem dan menolak kekerasan sebagai sarana mencapai tujuan.

Radikalisasi

Tidak ada seorang pun yang langsung menjadi radikal. Ada tahap-tahap radikalisasi. Misalnya, ini bisa dilihat pada proses radikalisasi al-Ikhwân al-Muslimûn (selanjutnya disebut Ikhwân) di Mesir. Radikalisme pengikut Ikhwân berakar pada ajaran atau doktrin Ikhwân itu sendiri. Sekalipun al-Bannâ lebih menyukai pendekatan dari bawah, namun tuntutanannya untuk melakukan reformasi politik total, di mana Islam dijalankan sebagai hukum negara, akhirnya mengarahkan para pengikutnya untuk melakukan upaya-upaya politik yang langsung berhadapan dengan kekuasaan politik yang sah. Kekerasan antara kelompok Ikhwân dengan pemerintah Mesir inilah yang membawa pada kematian al-Bannâ di tahun 1949.⁶⁷

Sementara ada upaya-upaya untuk lebih menekankan pada aktivitas dakwah setelah kematian al-Bannâ, radikalisasi para pengikut al-Ikhwân al-Muslimûn justru mendapat darah segar dari Sayyid Quthb. Quthb adalah ideolog Islamisme–radikal

⁶⁵ Team, *Violent Extremism in Indonesia* (Washington: The International Republican Institute, 2017), 4.

⁶⁶ John L. Esposito, “Muslim Moderat: Arus Utama Kelompok Modernis, Islamis, Konservatif, dan Tradisionalis”, dalam Suaidi Asyari (ed.), *Siapakah Muslim Moderat?* (Jakarta: Kultura, 2008), 78-79.

⁶⁷ Don Peretz, *The Middle East Today*, second edition (Hinsdale, Illinois: Dryden Press, 1971), 207.

para pengikut Ikhwân. Melalui bukunya yang sangat terkenal, *Ma'âlim fi al-Tharîq*, Quthb mengelaborasi ide al-Maududi tentang *hâkimîyah* (kedaulatan Tuhan) dengan menyatakan bahwa negara Islam adalah negara yang mengikuti hukum Allah, bukan negara yang membuat hukum sendiri. Hukum Allah adalah ketetapan yang tidak bisa diubah oleh persetujuan manusia. Dari sini kemudian analisis Quthb mengarah pada perbedaan antara tatanan sosial-politik *Islâmî* dan *jâhilî*, di mana yang terakhir adalah tatanan yang tidak disandarkan pada hukum Tuhan. Quthb meyakini bahwa tatanan Islam dan tatanan *jâhilî* adalah dua entitas yang saling bertentangan dan bermusuhan di mana pilihannya adalah menang secara total atau kalah secara total. Dengan tegas dia menyatakan bahwa masyarakat *jâhilî* harus dihancurkan. Dakwah dengan lisan saja tidak cukup, tapi harus juga jihad dengan kekerasan.⁶⁸

Proses-proses radikalisasi itu bisa digambarkan berjalan sebagai berikut: Pada mulanya memiliki kesadaran atau pikiran akan persepsi ketidakadilan atau kesenjangan terhadap suatu keadaan ideal. Pikiran ini diikuti oleh rasa marah terhadap mereka yang dipersepsikan sebagai pelaku ketidakadilan. Selanjutnya, merasa memiliki keterlibatan moral membenarkan terorisme. Tahap lebih lanjut adalah bergabung dengan suatu kelompok ekstrem. Akhirnya, melakukan dehumanisasi terhadap musuh demi membenarkan target kekerasan mereka.⁶⁹

Proses dari radikal secara pikiran hingga radikal menjadi tindakan ekstrem seperti di atas dapat diuraikan juga pada tingkatan-tingkatan radikal seperti berikut: Pertama, **level simpatisan**, yakni mereka yang setuju (meski tidak ikut melakukan kekerasan) dengan tujuan atau alasan kelompok yang menggunakan kekerasan. Kedua, **level pendukung**, yaitu memberi membenaran atau justifikasi atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh mereka yang hendak mencapai tujuan-tujuannya. Ketiga, **level aktivis**, yakni mereka yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Mereka menyediakan hal-hal yang diperlukan oleh mereka yang hendak mencapai tujuan dengan tindakan ilegal (melakukan rekrutmen, memberi dukungan politik atau finansial dll). Keempat, **level radikal**, yakni mereka yang tidak saja yakin tapi bersedia melakukan tindakan kekerasan dan tindakan ilegal lainnya.⁷⁰

F. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini secara sistematis disusun menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang mengapa penelitian penting dilakukan. Yang tidak kalah penting dalam bagian ini adalah klarifikasi konsep dan metodologis yang dioperasikan dalam penelitian ini.

Bagian kedua berisi laporan penelitian tentang peran NU dan Muhammadiyah dalam menangkal menguatnya kekerasan agama. Sekalipun kedua penelitian ini mengambil wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, namun keduanya dikerangkai sebagai gambar NU dan Muhammadiyah secara umum. Sekalipun ada sedikit perbedaan gaya penulisan, namun kedua bagian disusun ke dalam beberapa sub-bab yang sama.

Bagian keempat berisi beberapa rekomendasi dalam rangka memperkuat peran NU dan Muhammadiyah dalam melawan kekerasan agama di Indonesia. Rumusan-rumusan rekomendasi di bagian ini disusun berdasarkan wawancara

⁶⁸ Anthony Bubalo dan Greg Fealy, *Joining the Caravan?: The Middle East, Islamism and Indonesia* (New South Wales: Lowy Institute, 2005), 15-18.

⁶⁹ Mogadhan (2005) "The Staircase to Terrorism"

⁷⁰ McCauley & Moskalenko (2009) *Measuring Political Mobilization: The Distinction between Activism and Radicalism*.

mendalam dengan berbagai tokoh atau pengurus atau aktivis NU dan Muhammadiyah dari tingkat pengurus pusat hingga level yang paling bawah.[]

BAB II

NAHDLATUL ULAMA

A. Pendahuluan

Di tengah maraknya fenomena radikalisme, Nahdlatul Ulama (NU) menghadapi tantangan serius sebagai ormas Islam moderat. Sejak kran kebebasan terbuka bersamaan dengan runtuhnya rezim Orde Baru, fenomena radikalisme menunjukkan kecenderungan yang makin kuat. Salah satu instrumen yang dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan paham keagamaannya adalah masjid. Riset P3M (2017) menunjukkan bahwa dari 100 masjid pemerintah yang diriset di Jakarta, 41 masjid di antaranya terindikasi radikal.¹

Tidak ada satu pun organisasi kemasyarakatan yang bisa mengklaim tidak terpengaruh oleh situasi ini, termasuk NU. Setidaknya, fenomena munculnya NU Garis Lurus oleh beberapa kalangan dianggap sebagai simptom dari keterpaparan beberapa kalangan di dalam NU dari sikap keberagamaan yang keras dan intoleran. Kelompok yang diidentifikasi sebagai NU Garis Lurus ini oleh beberapa kalangan dinilai cenderung ke arah sikap intoleran dalam beragama, baik kepada kelompok-kelompok Muslim minoritas maupun kepada non-Islam.

Sekalipun demikian, secara umum, NU menunjukkan konsistensi yang sangat kuat terhadap sikap moderat dalam beragama. Pemaknaan doktrin Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah (Aswaja) dalam kerangka keislaman yang moderat (tawassuth/moderat, tawazzun/seimbang, tasammuh/toleran, dan ta'addul/adil atau seimbang) berhasil menjadikan NU sebagai ormas keislaman yang secara kuat menjaga moderatisme keagamaannya.

Moderatisme keislaman NU ini menggiringnya pada sikap yang tegas terhadap fenomena radikalisme keagamaan yang semakin menguat di Indonesia. Sikap NU ini tidak hanya dinarasikan oleh para elitnya, namun juga diwujudkan dalam berbagai kebijakan organisasi yang sampai saat ini terkonsolidasi dengan baik.

B. Peran Nahdlatul Ulama dalam Menghadapi Radikalisme

B.1 Respon Nahdlatul Ulama

Bagi NU, radikalisme bertentangan dengan paham keagamaan yang dianutnya. Kekerasan dalam beragama dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Orang yang mengajarkan kekerasan dengan dalih jihad dinilai tidak sungguh-sungguh memahami Islam.²

Dalam salah satu kesempatan, KH. Said Aqil Siraj, Ketua Umum PBNU, menyatakan,

¹Laporan penelitian "Survey 100 Masjid Kementerian, Lembaga Negara dan BUMN", Jakarta: P3M, 2017.

²<https://tirto.id/ketua-pbnu-said-aqil-kutuk-keras-aksi-napi-terorisme-di-mako-brimob-cKa4> Diakses pada 20 Maret 2019 pukul 11.23 WIB

Segala macam tindakan menggunakan kekerasan, apalagi yang mengatasnamakan agama dengan cara menebarkan teror, kebencian, dan kekerasan, bukanlah ciri ajaran Islam yang Rahmatan lil Alamin. Islam mengutuk segala bentuk kekerasan. Bahkan tidak ada satu pun agama di dunia ini yang membenarkan cara-cara kekerasan dalam kehidupan. Apapun motifnya, kekerasan, radikalisme, dan terorisme tidak bisa ditolerir. Apalagi dibenarkan. Sebab ia mencederai kemanusiaan.³

Sikap radikal diyakini tidak akan melahirkan apapun kecuali masalah.⁴ Radikalisme dan terorisme menjadi ancaman bagi seluruh umat manusia, tidak peduli agamanya apa. Ideologi di balik radikalisme dan terorisme adalah ideologi yang menafikan semua yang tidak sependapat.⁵ Dalam skala nasional, mereka ini tidak memiliki komitmen kebangsaan.⁶ Karena itu, sikap yang diambil NU sangat tegas, yaitu menghadapinya secara langsung karena yang dipertaruhkan adalah keutuhan negara.⁷

Sikap resmi NU terhadap radikalisme bisa dilihat dari dokumen-dokumen kebijakan yang dikeluarkan oleh PBNU. Pada Mukhtamar NU ke-33 di Makasar, NU secara tegas mengambil sikap terhadap fenomena radikalisme. Mukhtamar ini bisa dikatakan sebagai langkah awal gerakan perlawanan NU terhadap fenomena radikalisme.

Di sini diputuskan, bahwa: *Pertama*, sebagian dari kelompok-kelompok konservatif radikal telah mengarah kepada sikap intoleran, kekerasan dan ekstrimisme dan bahkan terorisme dengan legitimasi jihad. Penyebaran ideologi kekerasan dan ekstremisme ini dilakukan melalui berbagai cara, tidak hanya melalui masjid, tetapi juga melalui jalur pendidikan formal. Sebagaimana diketahui, kelompok siswa/mahasiswa merupakan salah satu kelompok yang paling rawan dipengaruhi oleh ideologi kekerasan dan ekstremisme tersebut. Hal ini tentu saja telah mengganggu kehidupan yang harmonis, kerukunan umat beragama dan bahkan integrasi bangsa.⁸

Kedua, kelompok-kelompok konservatif radikal memperjuangkan untuk menggantikan NKRI menjadi Negara Agama. Perdebatan tentang hal ini sebenarnya sudah terjadi pada masa-masa persiapan kemerdekaan dan sidang-sidang Konstituante, tetapi perdebatan itu selalu macet dan akhirnya dicarikan jalan keluar dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini terjadi karena Indonesia adalah negara yang majemuk dengan perbedaan agama, etnik,

³<https://infonawacita.com/pasca-ledakan-gereja-di-surabaya-ketum-pbnu-instruksikan-ini-kepada-nahdliyin/> Diakses pada 20 Maret 2019 pukul 11.28 WIB

⁴<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/09/17/nut7al346-kiai-maruf-ingin-nu-menjaga-umat-islam-dari-radikalisme>

⁵<http://www.suaraislam.co/k-h-yahya-cholil-staquf-radikalisme-dan-terorisme-jadi-ancaman-bagi-umat-manusia/> Diakses pada 29 Maret 2019 pukul 10.10 WIB

⁶<https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/03/27/onhbgc318-kiai-maruf-amin-radikalisme-sekuler-ingin-agama-tak-berkontribusi-di-kehidupan>. Diakses pada 22 Maret 2019 pukul 9.20 WIB

⁷ <https://www.merdeka.com/peristiwa/maruf-amin-radikalisme-jangan-sampai-tumbuh-dan-berkembang-di-indonesia.html> Diakses pada 22 Maret 2019 pukul 9.23 WIB; <https://news.detik.com/berita/4307280/maruf-amin-masjid-terpapar-radikalisme-harus-dibersihkan> Diakses pada 22 Maret 2019 pukul 9.13 WIB; <https://nasional.tempo.co/read/871809/ketua-pbnu-lebih-ringan-pornografi-dibanding-radikalisme/full&view=ok> Diakses pada 20 Maret 2019 pukul 11.06 WIB

⁸ Abdul Mun'im DZ, *Hasil-hasil Mukhtamar 32 Nahdlatul Ulama*, (Letjen PBNU: Jakarta, 2011), hlm. 120.

dan golongan. Kemajemukan ini adalah kekayaan bangsa Indonesia yang dapat mengancam kohesi sosial jika tidak dikelola dengan baik. Bahkan sebagian dari radikalisme tersebut sudah mengarah kepada bentuk terorisme yang diklaim sebagai bentuk jihad, sehingga sebagian umat Islam di Indonesia ada yang bersimpati dan memberi dukungan kepada para pelaku terorisme sebagai pejuang agama. Padahal, Islam menentang dan menolak aksi terorisme, dan aksi ini bahkan mencederai Islam itu sendiri.⁹

Dalam muktamar inilah sejumlah rekomendasi dikeluarkan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemegang otoritas, para tokoh agama, muballigh dan pendidik: (1) menyadari bahaya dari berkembangnya paham Islam radikal terhadap kehidupan bangsa, (2) berupaya untuk makin mengintensifkan penyebaran ajaran Islam yang sejalan dengan misinya sebagai rahmatan lil 'âlamîn, yakni dengan mengedepankan prinsip-prinsip tasamuh (toleransi), tawassuth (moderasi), dan tawazun (seimbang) sesuai dengan kondisi objektif kemajemukan, (3) mewaspadaai munculnya radikalisme dan ekstremisme keagamaan ini, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
2. Pemerintah dan semua pihak yang memiliki komitmen dengan NKRI harus senantiasa waspada terhadap berkembangnya paham yang mengancam eksistensi NKRI dan Pancasila. Dalam konteks ini para tokoh dan organisasi keagamaan memiliki tugas besar untuk memberikan pencerahan tentang wawasan keagamaan dan kebangsaan secara moderat.¹⁰
3. Pemerintah perlu bersikap dan bertindak tegas untuk mengatasi persoalan radikalisme yang semakin mengoyak ikatan kebangsaan Indonesia. Diperlukan sebuah strategi untuk menangani persoalan ini secara komprehensif dari berbagai aspek, yaitu politik, keamanan, kultural, dan sosioekonomi.
4. Pemerintah termasuk Kementerian Agama perlu mengambil peran lebih aktif sebagai leading sector dalam strategi nasional penanganan radikalisme agama, terutama mengawasi perkembangan aliran keagamaan dan mengembangkan sistem respons dini terhadap aliran keagamaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Muktamar NU di Makasar menghasilkan dokumen penting mengenai sikap NU terhadap radikalisme. Dari sini, berbagai kebijakan melanggulangi radikalisme terus bergulir. Dalam Rapat Pleno PBNU di Yogyakarta 27-28 Maret 2011, diputuskan untuk menyelenggarakan pelatihan kader kepada pengurus NU agar pengurus steril dari paham dan ideologi radikal.

Munas Alim Ulama NU di Pesantren Kempek Cirebon Jawa Tengah 15-17 September 2012 menghimbau agar semua pihak berkontribusi untuk menyelamatkan NKRI dari ideologi radikal. Pada Muktamar NU ke-33 di Jombang Jawa Timur 1-5 Agustus 2015, radikalisme mendapat sorotan kuat. Salah satu keputusan pentingnya adalah membuat program pencegahan radikalisme secara sistematis, yaitu melalui kaderisasi yang menjadi syarat mutlak untuk menjadi pengurus NU. Keputusan penting lain adalah menolak menggunakan istilah kafir untuk menyebut warga negara non-Muslim.

Seakan tak pernah surut isu radikalisme terus-menerus mendapat perhatian NU. Munas Alim Ulama NU di Nusa Tenggara Barat 23-25 November 2017, mengangkat tema "*Menguatkan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Gerakan*

⁹ Ibid.

¹⁰ Abdul Mun'im DZ, *Hasil-hasil Muktamar 32 Nahdlatul Ulama*, (Setjen PBNU: Jakarta, 2011).

Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga”. Salah satu yang dibahas serius adalah revisi UU Terorisme dan masalah ujaran kebencian. Radikalisme masih mendapat perhatian serius dalam Munas Alim Ulama NU di Kota Banjar Jawa Barat 27 Februari - 1 Maret 2019, terutama yang berkembang melalui media sosial. Beberapa rekomendasinya antara lain menangkal hoaks dan mendorong literasi digital, perdamaian Papua, mengkampanyekan wawasan Islam Nusantara yang berciri moderat dan toleran.

Menghadapi situasi ini, tidak ada pilihan bagi NU selain secara teguh mengembangkan Islam moderat. Sebagaimana yang dinyatakan KH. Said Aqil Siraj, Ketua Umum PBNU, “Mewujudkan Islam moderat, Islam toleran, Islam yang memberi rahmat bagi seluruh umat manusia. Itu yang kita gagas, bukan Islam yang ekstrim, radikal, apalagi sampai teroris.”¹¹

Sikap NU ini bisa dilacak juga dalam pandangan para pengurusnya terkait dengan fenomena kekerasan agama dengan dalih *amar ma'ruf nahi munkar* (menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Isu ini merupakan salah satu isu kontroversi di masyarakat saat ini, karena banyaknya kelompok yang main hakim sendiri dengan dalih amar ma'ruf nahi munkar.

KH. Ubaidullah Shodaqoh, rois Syuriah PWNU Jawa Tengah, menegaskan bahwa menjalankan amar ma'ruf nahi munkar harus mempertimbangkan dampaknya-dampak yang ditimbulkannya. Menurutnya, “Amar ma'ruf itu untuk mencari kema'rufan atau kebaikan. Kalau amar ma'ruf dampaknya banyak kemungkaran ya tidak boleh. Syarat amar ma'ruf nahi munkar kan tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar”.¹²

Pendapat ini bisa dikatakan nyaris diamini oleh hampir semua informan dalam penelitian ini. KH. Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur, secara analogis mengatakan bahwa melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara kekerasan sama dengan mencuci najis dengan kencing. Melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara kekerasan hanya akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar.

Kalau dengan cara kekerasan akhirnya orang pada sakit hati kan. Kalau sakit hati kan tidak menerima nasihat, tidak menerima dakwah. Orang melakukan kemungkaran lahiriyah, gara-gara kau salah pendekatan, bisa-bisa hatinya mereka menolak iman. Hati menolak iman itu jauh lebih mungkar, daripada lahirnya melakukan maksiat. Makanya jangan amar makruf dengan cara yang menyakitkan hati orang yang di-amar-ma'ruf-i. Menghilangkan kemungkaran tapi nanti lebih mungkar, seperti mencuci najis dengan air kencing.¹³

Semua narasumber NU yang diwawancarai dalam penelitian ini tidak setuju jika amar ma'ruf nahi munkar diwujudkan dalam tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Main hakim sendiri atas nama amar ma'ruf nahi munkar sepenuhnya tidak bisa dibenarkan.

Toleransi adalah wujud lain dari sikap moderat dalam beragama. Bagi NU, pentingnya toleransi terutama terkait dengan kenyataan bahwa kehidupan ini tidak hanya penuh dengan keragaman, tapi juga karena manusia tidak bisa lagi hidup sendiri. Semua orang saling terkait satu sama lain. Hanya melalui sikap toleran, di

¹¹<https://www.voaindonesia.com/a/article-14-ormas-islam-bersatu-lawan-terorisme-132418008/99820.html> Diakses pada 21 Maret 2019 pukul 12.05 WIB

¹² Wawancara KH. Ubaidullah Shodaqoh di Kantor PWNU Jawa Tengah Selasa, 21 Mei 2019.

¹³ Wawancara KH. Marzuki Mustamar di Kantor PWNU Jawa Timur, Kamis, 9 Mei 2019.

mana masyarakat saling menghargai, kemakmuran dan keadilan sebagai bangsa akan tercapai.¹⁴

Muslimat, sayap organisasi perempuan NU, juga menunjukkan komitmen yang sama. Dalam peringatan Hari Lahir ke-73 Muslimat Nahdlatul Ulama di Gelora Bung Karno, Jakarta, 27 Desember 2019), Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa NU mengajarkan tasamuh (toleransi). Perbedaan harus dimaknai sebagai bagian dari berkompetisi menuju kebaikan, bukan justru menjadi alasan untuk saling menghancurkan. Baginya, moderasi adalah kunci keseimbangan antara kebhinnekaan dengan sikap toleran dalam kehidupan.¹⁵

Gagasan toleransi ini membuat anak-anak muda NU, misalnya, biasa memberi selamat Natal kepada umat Nasrani. Misalnya, Mushonifin, pengurus PW GP Ansor Jawa Tengah, menyatakan,

Toleransi kita ini cukup berat dengan hadirnya kelompok-kelompok yang membawa embel-embel Islam. Bahkan sekarang muncul fenomena bahwa toleransi itu harus ada batasnya, jangan kebablasan. Lah toleransi yang tidak kebablasan itu yang seperti apa? Misalnya, kita menghadiri teman kita yang Nasrani, terus kita mengucapkan 'Selamat Natal' itu disebut toleransi yang kebablasan. Itu kan menjadi hal yang aneh. Banyak orang-orang yang menggunakan nalar yang sangat sempit dalam memandang hal itu.... Mereka tidak mau bertetangga dengan orang Kristen. Ini masalah.... Maka kemudian yang terjadi ada pemberangusan rumah ibadah, ada persekusi terhadap umat agama lain dalam satu kampung, bahkan ada peraturan RT yang melarang hadirnya orang-orang non-Muslim yang bermukim di situ. Jadi saya kira toleransi kita mendapatkan ujian yang sangat berat terkait dengan pemahaman-pemahaman mereka yang sangat terbatas terkait dengan toleransi.¹⁶

Namun bukan berarti masalah ini menjadi pendapat umum di kalangan warga atau pengurus NU. Ada juga pengurus NU yang sepenuhnya melarang mengucapkan selamat Natal. Misalnya, Adib Sulhi Makki, pengurus Ranting NU Desa Sletreng, Kapongan, Situbondo, memandang ucapan selamat Natal berarti membenarkan keimanan Kristen.

Menurut saya, mengucapkan selamat Natal atau semacamnya tidak boleh diucapkan oleh Muslim. Kenapa? Karena dengan mengucapkan selamat itu berarti kita sudah berkeyakinan bahwa hari raya mereka sudah benar. Mengucapkan selamat itu bukan sekedar ucapan hubungan sosial tapi juga berkaitan dengan keyakinan dalam beragama. Makanya menurut saya tidak boleh.¹⁷

¹⁴<http://www.laduni.id/post/read/43660/ketum-pbnu-selalu-tekanan-toleransi-menghormati-kebudayaan-dan-menghargai-perbedaan> Diakses pada 25 Maret 2019 pukul 13. 32 WIB;
<http://www.nu.or.id/post/read/89164/pbnu-nu-akan-terus-kembangkan-ajaran-toleransi> Diakses pada 25 Maret 2019 pukul 13.045 WIB

¹⁵*Media Indonesia*, 27 Januari 2019; <https://mediaindonesia.com/read/detail/213148-muslimat-nu-ajak-anak-bangsa-rawat-toleransi-dan-keberagaman> Diakses pada 21 Maret 2019 pukul 11.35 WIB

¹⁶ Wawancara dengan Mushonifin di Kantor eLSA (Lembaga Studi Sosial dan Agama) Semarang, Sabtu, 25 Mei 2019.

¹⁷ Wawancara dengan Adib Sulhi Makki Ahad, 30 Juni 2019.

Sekalipun ada perbedaan dalam hal boleh-tidaknya mengucapkan selamat Natal, secara umum tidak ada yang menerima kekerasan terhadap kelompok lain. Anggia Erma Rini, Ketua Umum PP Fatayat NU, misalnya, secara tegas menyatakan bahwa umat Islam sebagai mayoritas harus melindungi kaum minoritas dan memberikan kenyamanan bersama.¹⁸ Karena itu, penyerangan terhadap kelompok yang berbeda, termasuk berbeda agama, betul-betul tidak bisa diterima.¹⁹ Apalagi, NU memiliki konsep persaudaraan yang tidak hanya sesama Muslim (*ukhuwah Islamiyah*), tapi juga persaudaraan sesama warga negara (*ukhuwah wathaniyah*), bahkan sesama manusia (*ukhuwah basyariyah*).²⁰

Komitmen kebangsaan NU menjadi bagian tak terpisahkan dari moderatisme dalam ber-Islam.²¹ Dalam kerangka inilah kita harus memahami bahwa di mata NU, Indonesia dengan Pancasila-nya itu sudah final. Sikap NU ini diputuskan forum tertinggi setelah muktamar, yakni Munas Alim Ulama di Situbondo 1983. Dalam Munas Alim Ulama tersebut menghasilkan Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam.

Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam²²

Bismillahirrahmanirrahim

1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syari'ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia.
4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari'at agamanya.
5. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

Musyawahar Nasional Alim Ulama Nahdhatul Ulama Sukorejo, Situbondo 16 Rabi'ul Awwal 1404 H (21 Desember 1983)

Salah seorang kiai yang turut membidani keputusan ini, (alm.) KH As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Asembagus, bahkan mengatakan dengan tegas bahwa "Seandainya Pancasila dirusak, NU harus bertanggung jawab! Umat Islam wajib membela Pancasila! Ini sudah *mujma' alaih* (konsensus ulama)! Umat Islam wajib menerima Pancasila dan haram hukumnya menolak."²³

¹⁸ Wawancara dengan Anggia Erma Rini di Kantor Kemenpora, Rabu, 15 Mei 2019.

¹⁹ Wawancara dengan Savic Ali di Kantor PBNU Jakarta Kamis, 23 Mei 2019.

²⁰ Wawancara dengan KH Syafruddin Syarif di Kantor PWNU Jawa Timur, Rabu, 8 Mei 2019.

²¹ <http://wartakota.tribunnews.com/2016/10/22/ketua-pbnu-tolak-radikalisme-dan-terorisme> Diakses pada 20 Maret 2019 pukul 10.59 WIB.

²² Abdul Mun'im DZ, *Piagam Perjuangan Kebangsaan*, (Jakarta: Setjen PBNU-NU Online, 2011).

²³ <http://www.muslimoderat.net/2017/04/kh-asad-syamsul-arifin-umat-islam-wajib-menerima-pancasila.html> Diakses pada 22 Maret 2019 pukul 10.56 WIB

Keputusan Munas tersebut dikuatkan kembali pada Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo pada 1984. Mukhtamar ini menghasilkan keputusan penerimaan NU terhadap Pancasila. Salah satu tokoh penting di dalam penerimaan NU terhadap Pancasila sebagai asas tunggal adalah KH. Achmad Siddiq. Ia menuangkan buah pemikirannya tentang Pancasila dalam perspektif Islam dengan judul "Norma-Norma Pancasila Menurut Pandangan Islam". Ia memerinci sila-sila Pancasila dan dikaitkan dengan ajaran Islam.²⁴

Komitmen NU terhadap NKRI dan Pancasila memang secara kuat dan terus-menerus disuarakan oleh tokoh-tokoh NU. Pertimbangannya, jika dilihat kembali, sejalan dengan alasan NU melawan radikalisme, yaitu keinginan untuk menegakkan kebaikan bersama (*al-maslahah*). KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berkali-kali menjelaskan bahwa tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak Pancasila. Dengan Pancasila, umat Islam mempunyai hak menjalankan keyakinan agamanya tanpa mendiskriminasi keyakinan agama lain. Bagi Gus Dur, menjalankan Pancasila sama artinya mempraktikkan Syariat Islam dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara.²⁵

Secara tegas, Gus Dur menyatakan,

Tanpa Pancasila, Negara akan bubar. Pancasila adalah seperangkat asas dan ia akan ada selamanya. Ia adalah gagasan tentang negara yang harus kita miliki dan kita perjuangkan. Dan Pancasila ini akan saya perjuangkan dengan nyawa saya, tidak peduli apakah dia akan dikebiri oleh Angkatan Bersenjata atau dimanipulasi oleh umat Islam.²⁶

Dukungan NU terhadap Pancasila terus mendapatkan momentum penguatan. Pada Munas Alim Ulama di Kempek Cirebon Jawa Barat pada 2012 di bahas juga apa yang disebut sebagai Negara Pancasila menurut Islam. Hasil Munas tersebut disebutkan sbb:

1. Kehadiran negara merupakan sebuah keniscayaan, baik secara syar'i maupun 'aqli, karena banyak ajaran syariat yang tak mungkin dilaksanakan tanpa kehadiran negara.
2. Kendatipun eksistensi negara sangat penting dalam Islam, namun ia bukanlah tujuan (*ghayah*), melainkan hanya sebagai sarana (*wasilah*). Oleh karena itu, Islam tidak menentukan bentuk negara dan pemerintahan tertentu bagi umatnya.
3. Tujuan negara adalah terwujudnya kemaslahatan rakyat, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Untuk itu, setiap kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya wajib mengacu kepada kemaslahatan mereka,
4. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah hasil kesepakatan bangsa (*mu'ahadah wathaniyyah*), dengan Pancasila sebagai dasar negara.
5. Meskipun Indonesia bukanlah Negara Islam (*dawlah Islamiyyah*), akan tetapi sah menurut pandangan Islam. Demikian pula Pancasila sebagai dasar negara, walaupun bukan merupakan syari'at/agama, namun ia tidak bertentangan, bahkan selaras dengan Islam.
6. Sebagai konsekuensi sahnya NKRI, maka segenap elemen bangsa wajib mempertahankan dan membela kedaulatannya.

²⁴ Achmad Siddik, *Norma-Norma Pancasila Menurut Pandangan Islam*, (tth), 4.

²⁵ <https://www.gomuslim.co.id/read/news/2016/06/01/514/ternyata-ada-kiai-ini-di-balik-perumusan-lima-sila.html>. Diakses pada 22 Maret 2019 pukul 10.56 WIB

²⁶ Douglas E. Ramage, *Percaturan Politik Di Indonesia: Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), 80.

7. Pemerintah dan rakyat memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Kewajiban utama pemerintah ialah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya secara berkeadilan dan berketuhanan. Sedangkan kewajiban rakyat ialah taat kepada pemerintah, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.²⁷

Sikap NU di atas tampaknya terkonsolidasi dengan baik hingga ke bawah KH Zaini Shonhaji, Ketua PCNU Situbondo, menyebut Pancasila sama dengan Mitsaqa Madinah, Piagam Madinah, sehingga penerimaan atas Poancasila sesungguhnya adalah meneladani nabi Muhammad.²⁸

Sikap tegas NU terhadap Pancasila dan NKRI berimplikasi pada penolakan terhadap upaya apa pun yang akan mengubah Pancasila dan NKRI. Menurut Imron Rosyidi, Wakil Sekretaris (katib) Syuriah MWC NU Panji Situbondo, pembahasan soal Pancasila sudah final oleh para ulama' dulu sebagai pendiri bangsa. Menurutnya, "Siapapun yang hendak mengubah Pancasila dan bentuk-bentuk negara harus dilawan dan aparat wajib menindak tegas karena itu adalah tindakan makar yang sangat berbahaya."²⁹

Karena pandangan seperti itu, maka bagi NU, tidak lagi diperlukan mengganti Pancasila dengan syari'at Islam.³⁰ Sebagai konsekuensi dari penerimaan Pancasila sebagai dasar Negara, formalisasi syariat Islam dengan sendirinya tidak diperlukan lagi.³¹ Menurut Ismail Marzuki,³² sekretaris Lembaga Ta'mir Masjid PWNU Jawa Tengah, syariat Islam sudah berjalan di Indonesia. "Kita sudah bersyariah.... Apa lagi yang mau diperjuangkan? Semuanya sudah selaras dengan Islam. Syariat sudah selesai dan hukum Islam diakui oleh hukum materil."

Nur Rofiah,³³ pengurus pusat Muslimat NU, juga menegaskan bahwa Indonesia memang bukan negara Islam, tapi esensi hukum yang berlaku sudah sesuai dengan Islam, seperti, tidak boleh melakukan kejahatan dan memberikan hukuman bagi yang merugikan orang lain. Bahkan, rois Syuriah PWNU Jawa Tengah, KH. Ubaidullah Shodaqoh,³⁴ merasa aneh dengan sekelompok orang yang memperjuangkan formalisasi syariat Islam karena menurutnya, semuanya sudah sesuai dengan syari'ah Islam.

Sementara itu, Tazkiyatul Muthmainnah, Ketua Fatayat PWNU Jawa Tengah, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap upaya formalisasi syariat Islam akan mencederai kemajemukan bangsa. Secara tegas dia menyatakan, "Kita majemuk, *founding father* kita beragam, yang berjuang tidak Muslim saja. Jadi saya masih sepakat Pancasila. Untuk syariat Islam di konteks kebangsaan tidak tepat."³⁵ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Yeni Lutfiana, Sekretaris PW Fatayat NU Jawa Timur.³⁶

²⁷ Uliil Abshar Hadrawy (ed.), *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU* (Jakarta: LTN PBNU, 2012), 3-5.

²⁸ Wawancara dengan KH Zaini Shonhaji, di Situbondo, Kamis, 9 Mei 2019.

²⁹ Wawancara dengan Imron Rosyidi, di Mimbaan Situbondo, Jum'at, 17 Mei 2019.

³⁰ <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/ketua-nu-terusik-banyak-guru-agama-dukung-hukum-syariat> Diakses pada 28 Maret 2019 pukul 10.38 WIB

³¹ <https://m.merdeka.com/politik/kh-hasyim-muzadi-tidak-perlu-perda-syariah-0nkcazy.html#> Diakses pada 25 Maret 2019 pukul 12.56 WIB

³² Wawancara Ismail Marzuki di kantor Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang Kamis, 16 Mei 2019.

³³ Wawancara di kediaman Nur Rofiah, Jum'at, 17 Mei 2019.

³⁴ Wawancara KH. Ubaidullah Shodaqoh di Kantor PWNU Jawa Tengah Selasa, 21 Mei 2019.

³⁵ Wawancara Tazkiyatul Muthmainnah di Kantor Fatayat PWNU Jawa Tengah Sabtu, 18 Mei 2019.

³⁶ Wawancara Yeni Lutfiana di kantor PWNU Jatim, Rabu, 8 Mei 2019.

Wakil Sekretaris (Katib) Syuriyah MWC NU Panji, Situbondo, Imron Rosyidi, menegaskan hal yang sama. Baginya, Indonesia adalah negara majemuk, di dalamnya ada banyak agama, sehingga menurutnya, implementasi syariat Islam kurang tepat karena justru akan mengakibatkan kecemburuan, kebencian, bahkan permusuhan di antara sesama warga.³⁷

Pada akhirnya, implementasi syariat Islam tidak bisa mengabaikan aspek kebaikan bersama (*al-maslahah*). Inilah yang secara tegas dinyatakan oleh KH Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur. Baginya, hukum pada akhirnya harus melahirkan masalah. Masalah berarti masyarakat semakin baik, semakin rukun, negara tetap utuh. Kalau implementasi syariat Islam justru melahirkan fenomena sebaliknya, maka secara tegas dia menyatakan, “Jangan dipaksakan!”³⁸

Karena inilah bisa dipahami sikap NU yang sangat tegas menolak keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan mendukung pembubarannya oleh pemerintah.³⁹ Sebegitu terkonsolidasinya pandangan NU dalam hal ini, bisa dikatakan NU mendapatkan dukungan sangat luas dari warganya ketika melawan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Semuanya informan dalam penelitian ini menyatakan dukungannya terhadap pembubaran HTI. HTI sendiri secara resmi dibubarkan pemerintah tanggal 10 Juli 2017 saat Perppu Nomor 2/2017 ditandatangani Presiden menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013. Namun HTI mencoba menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Namun pada 7 Mei 2018, PTUN Jakarta menolak gugatan yang diajukan pihak HTI.

Mempertimbangkan itu semua, bisa dipahami mengapa respon NU terhadap fenomena radikalisme terkesan sangat keras. Radikalisme yang didorong oleh ideologi intoleransi dan kekerasan dirasa tidak hanya memberi ancaman langsung terhadap Nunamun juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi NU, menjaga NKRI dan Pancasila adalah sikap keagamaan yang diyakininya.

Berbagai respon NU terhadap fenomena radikalisme bisa dilihat dalam urutan kronologis di bawah ini:

Waktu	Bentuk Respon
21 Desember 1983	Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo: NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Dalam Munas inilah lahir Deklarasi Pancasila yang salah satunya menegaskan Pancasila tidak bertentangan dengan Islam
8-12 Desember 1984	Muktamar NU Ke 27 di Situbondo: Menegaskan kembali komitmen NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal atau landasan dasar organisasi NU.
25 - 28 Nopember 1989	Muktamar NU ke-28 di Pesantren Krapayak Yogyakarta: Menghasilkan “Pedoman Berpolitik

³⁷ Wawancara di kediaman Imron Rosyidi, Mimbaan Situbondo, Jum'at, 17 Mei 2019.

³⁸ Wawancara KH Marzuki Mustamar di Kantor PWNU Jawa Timur, Kamis, 9 Mei 2019.

³⁹ Said Aqil Siradj, *NU: Pembubaran HTI bukan Pembatasan Dakwah Islam*, <http://mediaindonesia.com/read/detail/104506-nu-pembubaran-hti-bukan-pembatasan-dakwah-islam>, Pada 2 April 2019, Diakses 11:50 WIB

Warga NU” yang terdiri atas 9 butir. Butir pertama berbunyi “Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945”.

1-5 Desember 1994

Muktamar NU ke-29 di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat: Salah satu keputusannya adalah bahwa Islam memberikan jaminan dan toleransinya dalam memelihara hubungan bersama dengan meletakkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebersamaan dan kejujuran dalam memelihara kehidupan bersama, dengan tidak mengingkari adanya perbedaan dalam hal tertentu.

21-27 Nopember 1999

Muktamar NU ke-30 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur: Salah satu keputusannya adalah bahwa demokrasi merupakan pilihan ideal dan tidak bertentangan dengan Islam.

28 November - 2 Desember 2004

Muktamar NU ke-31 di Boyolali Jawa Tengah: Salah satu keputusannya adalah mengukuhkan kembali komitmen kebangsaan yang pudar akibat situasi krisis dan semangat reformasi yang berlebihan, hilangnya integritas bangsa dan munculnya gerakan federalisme bahkan separatisme yang mengancam kesatuan nasional RI.

22-28 Maret 2010

Muktamar NU ke-32 di Makasar Sulawesi Selatan: NU secara tegas menunjukkan keprihatinan dan penolakannya terhadap fenomena radikalisme di Indonesia.

15-17 September 2012

Munas Alim Ulama NU di Pesantren Kempek Cirebon Jawa Tengah: Salah satu rekomendasinya adalah meminta Ormas Islam agar memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelamatkan kehidupan bangsa dari ideologi dan gerakan trans-nasional, seperti radikalisme.

13 - 15 Juni 2014

Munas Alim Ulama NU di Jakarta: Munas memutuskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah hasil perjanjian luhur kebangsaan di antara anak bangsa pendiri negara ini. Oleh karena itu,

setiap jalan dan upaya munculnya gerakan-gerakan yang mengancam keutuhan NKRI wajib ditangkal, termasuk ide khilafah.

- | | |
|----------------------------|--|
| 1-5 Agustus 2015 | Muktamar NU ke-33 di Jombang Jawa Timur: Islam Nusantara dicetuskan. Komitmen kebangsaan diteguhkan melalui tidak adanya penyebutan kafir bagi warga negara non-Muslim. |
| 23-25 November 2017 | Munas NU di Mataram Nusa Tenggara Barat: Salah satu eputusan penting adalah mengenai ujaran kebencian yang dianggap sebagai kemungkaran dan pentingnya pencegahan terorisme. |
| 27 Februari - 1 Maret 2019 | Munas NU di Pondok Pesantren Miftahul Huda al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar Jawa Barat: Membahas beberapa isu penting terutama mengenai radikalisme melalui media sosial. Beberapa rekomendasinya antara lain menangkal hoaks dan mendorong literasi digital, perdamaian Papua, dan mengkampanyekan wawasan Islam Nusantara. |

B.2 Upaya-upaya Nahdlatul Ulama

Berbagai pandangan dan respon NU di atas pada akhirnya melahirkan berbagai upaya, baik langsung maupun tidak langsung, menangkal radikalisme. Berbagai upaya itu adalah sebagai berikut:

1 Islam Nusantara: Islam yang Ramah, Toleran, dan Moderat

Islam Nusantara menjadi tema Muktamar NU ke-33 di Jombang Jawa Timur, 1-5 Agustus 2015. Selengkapnya, tema tersebut berbunyi “Meneguhkan Islam Nusantara Untuk Peradaban Indonesia dan Dunia”. Dalam sebuah diskusi di Jawa Timur (27 Juli 2015), Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj, menjelaskan, Islam Nusantara bukanlah sebuah mazhab atau aliran baru dalam Islam. Islam Nusantara adalah konsep yang menggali dan mengangkat kekhasan Islam yang ada di Nusantara. Ia mengembalikan Islam Nusantara kepada praktik dakwah Wali Songo. Sebagaimana Islam yang diteladakan Wali Songo, Islam Nusantara adalah Islam yang jauh dari kekerasan dan melebur dengan budaya Nusantara.⁴⁰

Azyumardi Azra memahami Islam Nusantara sebagai Islam distingtif yang dihasilkan dari interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi dan vernakularisasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya dan agama di Indonesia. Ortodoksi Islam

⁴⁰ <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/08/02/nsfsf2318-ini-penjelasan-kiai-nu-bagi-penolak-islam-nusantara>, Diakses 7 Oktober 2019.

Nusantara (kalam Asy'ari, fikih mazhab Syafi'i, dan tasawuf al-Ghazali) menumbuhkan karakter Islam *wasathiyah* (moderat dan toleran).⁴¹

Islam Nusantara adalah cara memahami dan menjalankan ajaran Islam yang dilakukan oleh bangsa Nusantara sehingga menjadi sistem nilai, tradisi dan budaya Islami yang khas Nusantara. Dalam ungkapan KH Afifuddin Muhajir, pengasuh Ma'had Aly Pesantren Sukorejo Situbondo yang juga Rois Syuriah PBNU, Islam Nusantara adalah pemahaman, pengamalan, dan penerapan Islam dalam segmen fiqih mu'amalah sebagai hasil dialektika antara *nash*, syari'at, dan 'urf, budaya, dan realita di bumi Nusantara.⁴² Dengan kata lain, Islam Nusantara ialah paham dan praktek keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks syariat dengan realitas dan budaya setempat.⁴³

Senada dengan Kyai Afifuddin Muhajir, Zainul Milal Bizawie memaknai Islam Nusantara sebagai Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, adat istiadat di tanah air.⁴⁴ Isom Yusqi menyebutkan bahwa Islam Nusantara merupakan istilah yang digunakan untuk merangkai ajaran dan paham keislaman dengan budaya dan kearifan lokal Nusantara yang secara prinsipil tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam.⁴⁵

Namun, Islam Nusantara tidak hanya praktik dan pemahaman keislaman, tetapi juga metodologi dakwah. Itulah sebabnya, menurut Faris Khoirul Anam, Islam Nusantara adalah metodologi dakwah untuk memahami dan menerapkan universalitas ajaran Islam sesuai prinsip-prinsip Ahlu Sunnah wal Jama'ah, dalam suatu model yang telah mengalami proses persentuhan dengan tradisi di Nusantara.⁴⁶ Sebagai metode dakwah, Islam Nusantara mengikuti pola-pola dakwah yang telah dilakukan Walisongo, yaitu memadukan aspek-aspek spiritual dan sekuler dalam menyiarkan Islam, hadir dengan penuh kedamaian, menoleransi tradisi lokal kemudian memodifikasinya agar sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁷

Kajian Islam Nusantara bukan sekadar kajian terhadap Islam di kawasan Nusantara, tetapi juga terhadap tata nilai Islam yang ada di kawasan ini yang telah tumbuh dan berkembang selama berabad-abad. Peradaban ini dikembangkan oleh para wali dan ulama sepanjang sejarah mulai dari Samudera Pasai hingga Papua.⁴⁸

Islam Nusantara merupakan ijtihad NU untuk memperkanalkan kekhasan Islam Indonesia sekaligus mengembalikan pemahaman dan gerakan Islam pada

⁴¹ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara Jaringan Global dan Lokal* karya (Bandung: Mizan, 2002), 15; Lihat juga Azyumardi Azra, "Ortodoksi Islam Nusantara adalah kalam (teologi) Asy'ariah, fiqh Syafi'i, dan Tasawuf al Ghazali" dalam Ahmad Sahal dan Munawir Aziz (eds.), *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan* (Bandung: Mizan 2015), 172.

⁴² <https://www.nu.or.id/post/read/60458/maksud-istilah-islam-nusantara>, Diakses 11 Oktober 2019.

⁴³ Afifuddin Muhajir, "Meneguhkan Islam Nusantara Untuk Peradaban Indonesia dan Dunia" dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (eds.), *Islam Nusantara dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan* (Bandung: Mizan, 2015), 67.

⁴⁴ Zainul Milal Bizawie, "Islam Nusantara Sebagai Subjek dalam Islamic Studies: Lintas Diskursus dan Metodologis" dalam Ahmad Sahal dan Munawir Aziz, *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, (Bandung: Mizan 2015) hlm. 239. Lihat juga Zainul Milal Bizawie, *Masterpiece Islam Nusantara*, (Tangerang: Pustaka Compass, 2016).

⁴⁵ Yusqi, M Ishom. *Islam Nusantara: Mengarusutamakan Konsep dan Gerakan Islam Nusantara* (Jakarta: STAINU, 2015).

⁴⁶ Faris Khoirul Anam, *Mabadi 'Asyrah Islam Nusantara Memahami Sepuluh Prinsip Tema Peradaban Indonesia dan Dunia* (Malang: Darkah Media, 2015), 22.

⁴⁷ Abdurrahman Mas'ud, *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2006), 54.

⁴⁸ Said Agil Siraj, *Islam sebagai Sumber Inspirasi Budaya Nusantara*, (Jakarta: LTN NU, 2015), 204.

budaya Indonesia yang ramah, toleran dan moderat. Islam Nusantara juga upaya NU untuk membangun model keberagamaan yang lebih membumi sebagai “tandingan” dari kecenderungan Islam transnasional yang mengabaikan, bahkan memusuhi, budaya lokal dan lebih menekankan budaya Arab.

2. Penerbitan Buku

Upaya lain yang dilakukan oleh NU adalah menerbitkan buku-buku yang langsung maupun tidak langsung memberikan pemahaman mengenai pentingnya moderasi beragama dan pencegahan radikalisme di Tanah Air. Sebagian buku-buku ini diterbitkan lembaga resmi NU, sementara yang lain diterbitkan oleh penerbit-penerbit lain.

Berikut ini adalah beberapa buku yang dimaksudkan:

No	Judul Buku	Penulis/ Editor	Penerbit	Tahun Terbit
1	Islam Nusantara	Nasaruddin Umar	Elex Media Komputindo Jakarta	2019
2	Islam Nusantara Inspirasi Peradaban Dunia	Juri Ardiantara dan Munawir Aziz	LTN NU Jakarta	2018
3	Islam Nusantara, Manhaj Dakwah Islam Aswaja di Nusantara	Tim PW LBM NU Jawa Timur	PW LTN NU Jawa Timur-PW LBM NU Jawa Timur	2018
4	Gus Dur, Islam Nusantara dan Kewarganegaraan Bineka	Ahmad Suaedy	Gramedia Jakarta	2018
5	Wahabi Menuduh, NU Menjawab	Sholeh Qosim, dkk	LTM-PBNU	2018
6	Nasionalisme Kaum Sarungan	A. Helmy Faishal Zaini	Penerbit Buku Kompas Jakarta	2018
7	Islam Nusantara Islam Indonesia: Ijtihad Kemaslahatan Bangsa	M. Imdadun Rahmat	LKIS Yogyakarta	2018
8	Meluruskan Pandangan Keagamaan Kaum Jihadis	Khamami Zada	Dirjen Pendis Kemenag RI	2018
9	Mendidik Kader Bangsa Nasionalis Religius “Buah Pemikiran Prof KH Saifuddin	W Eka Wahyudi	Pustaka Tebuireng Jombang	2018

	Zuhri: Tentang Islam, Pendidikan, dan Nasionalisme”			
10	Ideologi Kaum Fundamentalis: Menjawab Kegagalan Persoalan Agama & Negara	A. Dwi Hendro Sunarko Ginting dan Abdul Ghopur	LKSB	2018
11	Menjadi Islam, Menjadi Indonesia	M Zidni Nafi’	Elex Media Komputindo	2018
12	NU Penjaga NKRI	Agus Sunyoto, dkk	Kanisius Yogyakarta	2018
13	Fikih Kebangsaan, Merajut Kebersamaan di Tengah Kehinekaan	KH. Athoillah Sholahuddin Anwar	Tim Bahtsul Masail HIMASAL Lirboyo Kediri	2018
14	Membangun Nalar Islam Moderat: Kajian Metodologis	KH. Afifuddin Muhajir	Tanwirul Afkar Situbondo	2018
15	Moderatisme Fatwa: Diskursus, Teori dan Praktik	Syafiq Hasyim, dkk.	ICIP Jakart	2018
16	Gus! Sketsa Seorang Guru Bangsa	Alamsyah M. Djafar dan Wiwit R. Fatkhurrahman	Elex Media Komputindo Jakarta	2017
17	Buku Pintar Islam Nusantara	Muhammad Sulton Fatoni	Ilman Bogor	2017
18	Fikih Toleransi	Syarif Yahya	Aswaja Pressindo	2016
19	Pedoman Muharrik dan Ta’mir Masjid NU	Abdul Manan Ghani	LTM-PBNU	2016
20	Masterpiece Islam Nusantara	Zainul Milal Bizawie	Pustaka Compass Tengarang	2016
21	Islam sebagai Sumber Inspirasi Budaya Nusantara	Said Agil Siraj	LTN NU Jakarta	2015
22	Berkah Islam Indonesia	Said Agil Siraj	Elex Media Komputindo Jakarta	2015

23	Islam Nusantara: Mengarusutamakan Konsep dan Gerakan Islam Nusantara	M Ishom Yusq	STAINU Jakarta	2015
24	Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan	Akhmad Sahal	Mizan Bandung	2015
25	Ijtihad Politik Islam Nusantara: Membumikan Fikih Siyasah Melalui Pendekatan Maqashid asy-Syari'ah	Yahya Cholil Staqif	Lirboyo Press	2015
26	Meneguhkan Islam Nusantara	Ahmad Musthofa Haroen	Khalista Jakarta	2015
27	Nasionalisme dan Islam Nusantara	Abdullah Ubaid dan Mohammad Bakir	PT. Kompas Media Nusantara Jakarta	2015
28	Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam terhadap Isu-Isu Aktual	Ali Masykur Musa	Mizan Bandung	2014
29	Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Nusantara	Ahmad Baso	Pustaka Afid Tangerang	2014
30	Bekal Pembela Aswaja Menghadapi Radikalisme Wahabi	Muhammad Idrus Ramli,	Aswaja NU Center Surabaya	2013
31	Islam Nusantara Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia	Nor Huda	Arruzz Media Yogyakarta	2013

3 Gerakan Online

Salah satu penyebaran paham radikal adalah melalui media online. Untuk mengimbangnya juga dibutuhkan satu gerakan online yang kuat. Gerakan online ini menjadi pilihan yang secara sungguh-sungguh dilakukan oleh NU, baik melalui media resmi NU maupun dikembangkan oleh pribadi-pribadi yang secara ideologis dan organisatoris berafiliasi ke NU.

Secara jumlah, media online yang dikelola oleh aktivis NU lumayan besar. Mereka sebagian besar berjejaring satu dengan yang lain: berbagi link, sumber

daya, maupun sebagian konten. Bahkan, mereka saling berkalobarasi dan menguatkan.

Savic Ali, Direktur NU-Online, menuturkan,

Lewat dunia online, kita memperbanyak tulisan, artikel atau opini yang memperkuat semangat kebangsaan dan kebhinekaan warga NU. Ada banyak di luar NU online, website-website yang dibikin anak muda NU. Ada islami.co, bincang syariah, alif.id, laduni.id ada banyak website-website NU. Ada rumah fikih. Di Surabaya ada TV9. Banyak juga yang berbicara di forum-forum offline, dan juga di sosial media. Banyak sekali saya kira ada jutaan generasi muda NU di sosial media, di facebook, instagram, twitter yang tidak pernah cape untuk menyuarakan semangat persatuan mengatasi perbedaan sukudan agama. Kami kembangkan apa yang kami sebut sindikasi media NU di mana misalnya temen-temen yang websitenya masih kesulitan konten boleh mengambil dari NU online. Kayak gitu-gitu yang kami kembangkan. Jadi secara konten kami bertukar konten. Agar saling memperkuat dan memperkaya satu dengan yang lain. Hasilnya adalah suara kaum muda NU yang pro kebangsaan dan kebhinekaan semakin kuat. Pandangan Islam yang kebangsaan itu lazim di kalangan anak muda NU, dan anak-anak muda NU sangat percaya diri kalau bicara itu karena pengetahuannya terdistribusi dengan baik.”⁴⁹

Berikut ini adalah daftar media atau website yang terverifikasi dikelola oleh NU maupun warga/lembaga yang berafiliasi ke NU.

No.	Nama Web	Pengelola
1	http://www.nu.or.id	NU Online
2	https://islami.co/	Pribadi
3	https://alif.id/	Pribadi
4	http://www.gusdurian.net/	Komunitas Gusdurian
5	http://banyuwangi.nu.or.id	PCNU Banyuwangi
6	http://jombang.nu.or.id	PCNU Jombang
7	http://www.alfachriyah.org	Ponpes Al Fachriyah
8	http://www.alfikr.co	Ponpes Nurul Jadid
9	http://www.ansor.or.id	PP GP Ansor
10	http://www.ansorjateng.net	Ansor Jateng
11	http://www.ansorjatim.or.id	Ansor Jatim
12	http://www.annahmah.co.id	Tim Arrahmah
13	http://www.aswajacenter.com	Tim Aswaja Center
14	http://www.aswajamuda.com	--
15	http://www.aswajanu.com	PPM Aswaja
16	http://www.aswajanucenterjatim.com	Aswaja Center Jatim
17	http://www.aswajaonline.com	--
18	http://www.aswj-rg.com	Tim Aswaja Research
19	http://www.auleea.com	PWNU Jatim
20	http://www.bersholawat.net	--
21	http://www.cahayanabawiy.com	--

⁴⁹ Wawancara Savic Ali di Kantor PBNU Jakarta Kamis, 23 Mei 2019.

22	http://www.cyberdakwah.com	Tim PP SS Sukorejo, Situbondo
23	http://www.dakwah.web.id	--
24	http://www.dakwahpbnu.id	PP LDNU
25	http://www.dinulqoyim.com	--
26	http://www.dutaislam.com	Tim Duta Islam
27	http://www.elhooda.net	--
28	http://www.fikihkontemporer.com	--
29	http://www.fiqhmenjawab.net	--
30	http://www.gusdurfiles.com	--
31	http://www.habiblutfi.net	Majelis Hb. Lutfi
32	http://www.halaqoh.net	LTN Jatim
33	http://www.hikmahislam.com	PPM Aswaja
34	http://www.ipnu.or.id	PP IPNU
35	http://www.ippnu.or.id	PP IPPNU
36	http://www.islam-institute.com	--
37	http://www.islami.co	--
38	http://www.islamnusantara.com	--
39	http://www.islamsantri.com	--
40	http://www.islamuna.info	Tim Piss KTB
41	http://www.islamynews.com	--
42	http://www.jalansufi.com	--
43	http://www.jazirahislam.com	--
44	http://www.kabarislamia.com	--
45	http://www.kalam-ulama.com	--
46	http://www.kanzunqalam.com	--
47	http://www.lakpesdam.or.id	PP Lakpesdam
48	http://www.ldnu.or.id	PP LDNU
49	http://www.liputanIslam.com	--
50	http://www.lirboyo.net	Ponpes Lirboyo
51	http://www.liriksolawat.com	--
52	http://www.lpbi-nu.org	PP LPBI NU
52	http://www.lptnu.org	PP LPT NU
53	http://www.ltnnu.org	PP LTN NU
54	http://www.maarif-nu.or.id	PP Ma'arif NU
55	http://www.madinatuliman.com	Tim Madinatul Iman Kalimantan
56	http://www.majalahlangitan.com	Ponpes Langitan
57	http://www.majelis.info	--
58	http://www.majelisrasulullah.org	Majelis Rasulullah
59	http://www.matanciputat.com	Matan Ciputat
60	http://www.matancirebon.com	Matan Cirebon
61	http://www.media-islam.or.id	--
62	http://www.mediasantrinu.com	--
63	http://www.metroislam.com	--
64	http://www.moslemforall.com	PPM Aswaja
65	http://www.mosleminfo.com	--
66	http://www.moslemwiki.com	PPM Aswaja
67	http://www.mudimesra.com	Mudi Mesra Aceh
68	http://www.muslimedianews.com	Tim MMN

69	http://www.muslimoderat.net	Tim MM
70	http://www.nahdlatul-ulama.org	LTN PBNU
71	http://www.neverblast.com	--
72	http://www.ngaji.web.id	--
73	http://www.nu-lampung.or.id	LTN Lampung
74	http://www.nucare.id	PP Lazisnu
75	http://www.nujabar.or.id	PWNU Jabar
76	http://www.nujateng.com	PWNU Jateng
77	http://www.nujepera.or.id	PCNU Jepara
78	http://www.nukhatulistiwa.com	PWNU Kalbar
79	http://www.nukita.id	LTN Malang
80	http://www.nukudus.com	--
81	http://www.nutzen.com	Nutzen
82	http://www.nutv.nu	--
83	http://www.pesantrenvirtual.com	--
84	http://www.piss-ktb.com	Tim Piss KTB
85	http://www.pondoktremas.com	PP Tremas
86	http://www.ppmaswaja.org	PPM Aswaja
87	http://www.pppmiftahulKhoir.com	--
88	http://www.pwansorjabar.org	Ansor Jabar
89	http://www.pwnubali.or.id	LTN Bali
90	http://www.pwnudiy.or.id	PWNU Jogja
91	http://www.pwnujatim.or.id	PWNU Jatim
92	http://www.riyadluljannah.org	Ponpes Riyadlul Jannah
93	http://www.rumah-islam.com	--
94	http://www.salafynews.com	--
95	http://www.salamsantri.com	--
96	http://www.santri.net	--
97	http://www.santrigusdur.com	--
98	http://www.santrimenara.com	--
99	http://www.santrinews.net	--
100	http://www.santrionline.net	--
101	http://www.sarkub.com	--
102	http://www.satuislam.org	--
103	http://www.sekolahprogresif.sch.id	--
104	http://www.seputarnu.com	--
105	http://www.serambimata.com	--
106	http://www.soearamoeria.com	--
107	http://www.suara-muslim.com	--
108	http://www.suaradamai.com	--
109	http://www.suarapesantren.net	--
110	http://www.sufinews.com	Tim Cahaya Sufi
111	http://www.sufitube.com	--
112	http://www.syekhhermania.or.id	--
113	http://www.tasamuh.id	--
114	http://www.tebui reng.org	Ponpes Tebui reng
115	http://www.unisnu.ac.id	--
116	http://www.wahidinstitute.org	Wahid Institute
117	http://www.wartaislami.com	--

4. Kaderisasi

Kaderisasi yang saat ini dijalankan dengan gencar oleh PBNU merupakan amanat dari Mukhtar NU ke-33 di Makasar, 22-28 Maret 2010. Dalam laporan Mukhtar yang dikeluarkan PBNU disebutkan bahwa Mukhtar menyadari betul pentingnya kaderisasi. Lemahnya sistem rekrutmen dalam kepengurusan NU tidak lepas dari kurang berkembangnya pengembangan kemampuan fungsionaris NU dalam proses kaderisasi dan tidak tepatnya cara dan perolehan *rekrutmen* personal pengurus pada masa lalu.⁵⁰

Kaderisasi merupakan salah satu dari 16 program strategis yang dicanangkan Mukhtar NU ke-30 di Makasar.⁵¹ Amanat Mukhtar mengenai kaderisasi kemudian dibahas sebagai salah satu topik dalam Rapat Pleno PBNU di Yogyakarta 27-28 Maret 2011. Dari rapat pleno inilah dibentuk Tim Kaderisasi yang diketuai oleh As'ad Said Ali yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PBNU. Tim Kaderisasi kemudian menyusun modul dan membentuk tim teknis untuk pelaksanaan kaderisasi. Program inilah yang kemudian diberi nama PKP-NU (Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama).⁵²

PKP-NU dilaksanakan di Pusdiklat NU Rengasdengklok Karawang sebanyak 12 kali sejak 2012 dan diikuti 270 kader NU dari berbagai daerah di Indonesia. PKPNU angkatan ke-1 sampai ke-12 di Rengasdengklok meng-cover seluruh pengurus wilayah di Indonesia, bahkan sebagian pengurus cabang. PKPNU terus bergulir ke seluruh Indonesia. Hingga mukhtar NU ke-33 di Jombang 1-5 Agustus 2015, pendidikan kader tersebut sudah berlangsung 12 angkatan di tingkat nasional dan 87 angkatan tingkat wilayah dengan keseluruhan peserta sebanyak 2430 kader.⁵³

Pasca mukhtar NU ke-33 di Jombang, format pelatihan kader berubah menjadi Madrasah Kader Nahdlatul Ulama (MKNU). Mukhtar ke-33 merumuskan berbagai ragam kader dan kualifikasinya:

1. Kader struktural NU, yaitu pengurus NU di semua tingkatan (mulai dari tingkat PBNU sampai dengan Ranting), Pengurus Lembaga, Lajnah dan pengurus Banom untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memimpin, menggerakkan warga dan mengelola organisasi/kelembagaan NU.
2. Kader Keulamaan, yaitu menyiapkan calon para syuriah NU di semua tingkatan kepengurusan NU, baik dari lingkungan pesantren maupun luar pesantren, diharapkan daripadanya lahir ulama-ulama muda yang siap menjadi syuriah NU.
3. Kader Penggerak NU, yaitu kader NU yang memiliki tugas khusus memperkuat, mengamankan, mempertahankan dan mentransformasikan nilai-nilai perjuangan dan ideologi NU sebagai jiwa dan perekat dalam menggerakkan NU dan dalam menggerakkan warga dalam menjalankan kehidupan keagamaan, sosial, berbangsa dan bernegara untuk tegaknya Islam Aswaja.
4. Kader Fungsional, yaitu menyiapkan kader yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagai:

⁵⁰ Abdul Mun'im DZ, *Hasil-hasil Mukhtar 32 Nahdlatul Ulama*, (Letjen PBNU: Jakarta, 2011), 97.

⁵¹ *Ibid*, 104 & 108-109.

⁵² Setjend PBNU, *Laporan Tahunan, Annual Report, Nahdlatul Ulama 2010-2012*, 55.

⁵³ Rumadi dkk (ed.), *Hasil-hasil Mukhtar NU ke-33 Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: LTN-PBNU, 2016), 334.

- a. Pelatih/fasilitator/instruktur, dalam kegiatan pelatihan maupun pendidikan untuk kaderisasi.
 - b. Peneliti, yang diharapkan bisa menangani penelitian yang diselenggarakan di lingkungan NU.
 - c. Tim leader untuk kegiatan Bahtsul Masail.
 - d. Tim leader untuk menyelenggarakan & melakukan rukyatul hilal.
 - e. Pendamping / Community Organizer / penyuluh masyarakat / Pemberdayaan masyarakat (berbagai sektor).
5. Kader Profesional, yaitu kader NU yang disiapkan bisa memasuki posisi tertentu yang berada di eksekutif, legislatif, yudikatif, perguruan tinggi maupun di perusahaan negara, baik di tingkat nasional maupun daerah.⁵⁴

Satu hal yang perlu dicatat, seluruh bentuk pengkaderan ini memiliki kekuatan antiradikalisme yang sangat kuat. Bisa dikatakan bahwa ada *mainstreaming* antiradikalisme dalam seluruh kaderisasi di lingkungan NU.

5. Implementasi Program Lembaga dan Banom NU

Dalam satu kesempatan, Sekjen PBNU Faishal Zaini, memastikan bahwa keputusan resmi organisasi terkait dengan radikalisme tertindaklanjuti dalam berbagai program. Badan-badan oronom serta berbagai lembaga yang ada di bawah NU juga didorong untuk mengembangkan program deradikalisi. Bahkan, PBNU secara khusus mengembangkan NCC (*Nusantara Command Center*), salah satunya untuk melakukan analisis data media, termasuk media sosial. Berkaitan dengan ini, PBNU mengembangkan NU Channel, yang sudah memiliki *follower* sekitar lima ratus ribu. Untuk menghadapi perang media, PBNU juga menyiapkan para *buzzer*. Saat ini, PBNU mulai membidik kelompok milenial melalui penyiapan para narasumber yang bisa berdakwah dan berkomunikasi dengan anak-anak muda.⁵⁵

Di luar kegiatan yang diselenggarakan oleh PBNU, terdapat sejumlah kegiatan lain yang diselenggarakan oleh badan-badan otonom dan lembaga-lembaga yang berada di bawah PBNU.⁵⁶ Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga dan Banom NU, khususnya yang terkait dengan isu radikalisme.⁵⁷

Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor)

GP Ansor banyak menyelenggarakan kegiatan yang bertema kebangsaan. Kegiatan yang rutin dilakukan adalah apel pemuda dan apel kebangsaan yang biasanya dilakukan pada hari-hari besar nasional. Selama periode 2017-2019, Ansor telah melakukan sebelas kali kegiatan kaderisasi dalam berbagai bentuk pelatihan di berbagai tempat, mulai dari Pendidikan dan Pelatihan Dasar (total

⁵⁴ Ibid, 346-347.

⁵⁵ Wawancara di kantor PBNU, Rabu, 8 Mei 2019.

⁵⁶ Lembaga atau lajnah berfungsi sebagai pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan PBNU. Kepengurusan mereka dibentuk dan ditunjuk oleh PBNU dan masa kepengurusannya berakhir sesuai dengan masa kepengurusan PBNU. Sedangkan badan otonom adalah organisasi kemasyarakatan milik NU yang dikelola secara otonom. Mereka memilih kepengurusannya sendiri. Berbeda dengan lembaga atau lajnah yang bertanggung jawab pada PBNU, kepengurusan badan otonom bertanggung jawab terhadap anggotanya.

⁵⁷ Kegiatan-kegiatan ini didasarkan pada dokumen *Laporan Banom dan Lembaga PBNU 2019* (Jakarta: Setjend PBNU), 2019. Dokumen ini terdiri dari laporan 32 lembaga (13 Banom dan 29 lembaga).

peserta 5.723 orang) hingga Pelatihan Kepemimpinan Nasional. Di setiap pelatihan, antiradikalisme dan nasionalisme adalah materi yang sangat dominan.

Kegiatan lainnya adalah Global Unity Forum (25-28 Oktober 2018) yang diikuti oleh berbagai kalangan lintas iman untuk mencari solusi atas berbagai tindak kekerasan atas nama agama. Forum ini dimaksudkan untuk menciptakan tata hubungan yang adil dan harmonis yang ditegakkan di atas dasar penghormatan terhadap kesetaraan hak dan martabat manusia.

Ansor juga rutin menyelenggarakan Majelis Dzikir dan Sholawat (MDS) yang diselenggarakan oleh Rijalul Ansor, lembaga semi otonom yang dibentuk oleh GP Ansor sebagai implementasi visi, nilai, tradisi Ahlussunnah Waljamaah An-Nahdliyah. MDS ini menyelenggarakan sejumlah kegiatan dzikir dan sholawat yang memiliki misi dakwah Islam moderat/ *rahmatan lil alamin*. Di luar itu, MDS juga melakukan dakwah ke kampus-kampus yang ditengarai telah disusupi oleh kelompok-kelompok radikal. Sejauh ini telah lima kampus yang bersepakat untuk bekerja sama dengan MDS, yakni UI, STAN, ITB dan IPB.

Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama (LP Maarif)

LP Maarif adalah lembaga di bawah PBNU yang mengurus masalah pendidikan. Selama 2017-2019, terdapat beberapa program yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan isu radikalisme, antara lain:

- a. FGD Penguatan Islam *Wasathiyah* di sekolah-sekolah (5 Juli 2018). Kegiatan ini berusaha merancang konten-konten Islam moderat di sekolah yang diharapkan bisa dijalankan tidak hanya oleh NU tetapi terutama oleh Kemenag dan Kemendikbud.
- b. Penguatan pendidikan karakter di kalangan siswa menengah kerja sama dengan Kemenag RI. Kegiatan ini diselenggarakan di Bogor 16-19 Januari 2019.
- c. Pendidikan Mentor Madrasah Ramadhan yang dimaksudkan untuk membekali para mentor yang akan memberikan madrasah Ramadhan di sekolah-sekolah. Pembekalan dilakukan di PBNU 8 Mei 2018.
- d. Smart school LP Maarif. Program ini berupa pelatihan teknologi dan informasi bagi sekolah-sekolah di lingkungan Maarif NU hasil kerja sama dengan Kominfo. Acara ini diselenggarakan di Jakarta, 19 Mei 2019, dengan total 500 orang peserta yang dibagi menjadi 20 termin.
- e. Penulisan buku ajar kebangsaan, ke-NU-an dan Aswaja yang akan diintegrasikan dalam kurikulum pembelajaran di sekolah-sekolah.

Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu)

Pergunu adalah badan otonom yang merupakan asosiasi para guru NU. Dalam konteks pencegahan radikalisme, beberapa kegiatan telah dilakukan Pergunu, antara lain:

- a. Pelatihan Kader. Pelatihan kader dilakukan dengan sangat massif. Dalam dua tahun ini, Pergunu berhasil melakukan pelatihan kader dengan jumlah peserta mencapai 1.300 orang guru, di berbagai wilayah, antara lain: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung. Di samping penguatan Aswaja, dalam pelatihan kader ini juga disampaikan bahaya radikalisme.
- b. Penerbitan buku Aswaja bagi guru yang ditulis langsung oleh Ketua Pergunu, KH Asep Saifuddin Halim.

- c. Pembuatan Aplikasi Guru Ngaji Private Online. Aplikasi ini dirancang untuk menyediakan guru ngaji dengan metode privat secara online. Aplikasi ini berusaha mengimbangi persebaran aplikasi serupa yang dikelola oleh pihak Wahabi.

Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU)

Lakpesdam adalah lembaga di bawah PBNU yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di dalam NU. Beberapa kegiatannya yang terkait dengan pencegahan radikalisme, antara lain:

- a. Pendidikan dan Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK). Program ini sudah berjalan secara rutin sejak pertengahan 1990-an. Sebagaimana wadah pengkaderan lainnya di NU, tema nasionalisme dan ancamannya – termasuk radikalisme – menjadi salah satu topik yang dibahas dalam PPWK ini.
- b. Penguatan ketahanan ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam menghadapi tantangan radikalisme. Bekerja sama dengan Kemenpan, kegiatan ini dilakukan sejak 2018. Salah satu yang dikerjakan adalah membuat instrumen *Tolerance and Pluralisme Awareness and Attitude Test (TEPAT)*. Dengan instrumen ini, rekrutmen ASN bisa dicegah dari masuknya kelompok-kelompok radikal, termasuk yang berpotensi radikal.
- c. Advokasi Revisi UU Adminduk, sejak 2017 hingga sekarang. Advokasi ini dimaksudkan untuk mendorong keadilan dalam pemenuhan hak identitas legal bagi setiap warga negara, termasuk kelompok minoritas, baik etnis, suku, agama maupun budaya.
- d. Advokasi untuk pengesahan RUU Perlindungan Masyarakat Adat. Program ini dijalankan sejak Agustus 2018-Desember 2019 dengan membangun kemitraan dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
- e. Advokasi warga Syi'ah di Sampang. Ini dilakukan sejak Agustus 2018-Agustus 2019.
- f. Pembuatan film Inklusi tentang Penghayat dan Tionghoa sejak Januari hingga Juli 2019. Tujuannya untuk mendesiminasikan gagasan inklusif dan toleran dengan media sinematografi.

Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU)

RMI NU adalah badan otonom yang mengurus lembaga pendidikan pesantren di lingkungan NU. Pengurus RMI telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan menangkal radikalisme, antara lain:

- a. Mengawal dan terlibat secara intensif pembahasan RUU Pesantren yang sudah disahkan DPR. Dalam UU ini, pencegahan radikalisme diupayakan sedemikian rupa, salah satunya dengan menekankan aspek kebangsaan.
- b. Penyelenggarakan seminar Peta Jalan Islam Wasathiyah untuk Indonesia: Kontribusi Pesantren, bekerja sama dengan Balitbang Kemenag (Oktober 2019), yang melibatkan peserta dari 200 pesantren di wilayah Banten, DKI Jakarta dan Jawa barat.
- c. Penguatan Aswaja di kalangan pesantren yang melibatkan 300 pesantren. Salah satu topiknya adalah mengenai bahaya radikalisme.
- d. Melakukan Apel Santri untuk penguatan wawasan kebangsaan di kalangan pesantren yang dilakukan 20 Oktober 2018.

- e. Dalam periode sebelumnya, 2010-2015, PP RMI NU menjadi pelaksana kerja sama PBNU dengan BNPT yang ditandatangani 11 Agustus 2011 untuk melakukan pencegahan radikalisme. Awalnya di kawasan DKI Jakarta, Jawa barat dan Banten (2012-2013). Pada tahun berikutnya diperluas ke propinsi lain, antara lain: Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Maluku, dan NTB.

Muslimat NU

Muslimat NU bisa dikatakan NU versi perempuan. Banyak sekali kegiatan yang diselenggarakan Pengurus Pusat Muslimat NU yang terkait pencegahan radikalisme:

- a. Penerbitan buku saku Aswaja, dalamnya berisi Islam moderat (dalam proses cetak).
- b. Membuat modul Pengkaderan Muslimat NU, di dalamnya berisi ancaman radikalisme (proses cetak).
- c. Pembinaan dan pembentukan majlis ta'lim di wilayah dalam rangka membendung radikalisme di kampung-kampung.
- d. Melakukan sosialisasi 4 Pilar bagi seluruh pengurus Muslimat NU 20 Februari 2018.
- e. Peningkatan kapasitas da'iyah (da'i perempuan) untuk menyampaikan pesan-pesan Islam moderat, dilakukan di Ternate Maluku Utara (23-27 Juli 2018), Jakarta (3-5 September 2018), NTB (12-16 Oktober 2018), Pekanbaru (19-23 Februari 2019), Palu (4-8 April 2019).
- f. Membentuk Tim 9 untuk Pencegahan dan advokasi terhadap bahaya radikalisme (Mei 2019).
- g. Melakukan serasehan untuk penguatan peran Muslimat NU dalam meningkatkan kualitas bangsa di Nganjuk (10 Maret 2019), Jakarta (13 Maret 2019), Bandung (6 Maret dan 14 Maret 2019), Surabaya (16 Maret 2019), dan Purwokerto (24 Maret).

Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU)

Inilah lembaga yang menjadi ujung tombak dakwah NU untuk mengimbangi dakwah yang begitu massif dari kelompok radikal. Beberapa kegiatan yang diselenggarakan antara lain:

- a. Pendidikan Da'i Penggerak NU (Januari-April 2019). Ini adalah pendidikan intensif yang dilakukan selama 3 bulan (24 kali pertemuan).
- b. Pendidikan Dai'l Millenial (21-22 Mei 2019 dan 27 Juli 2019) yang mampu mengelola medsos baik dari segi konten, disain maupun manajemennya.
- c. Mencetak Kumpulan Khutbah Jumat (Juli 2019).
- d. Mengisi Dakwah Ramadhan di TV9, TV internal NU.
- e. Pelatihan Khatib yang akan diselenggarakan bulan Oktober ini.

Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama (LTM NU)

Sebagaimana LDNU, LTM NU juga memiliki peran penting dalam menghadapi kelompok-kelompok radikal yang banyak bergerak melalui masjid. Dengan menjaga masjid dari pengaruh ideologi radikal, maka umat bisa dijaga.

Itulah yang dikerjakan lembaga ini. Beberapa program yang dilakukan terkait dengan radikalisme adalah:

- a. Pelatihan *Muharrir* (Penggerak) Masjid dan Dakwah. Ini sudah dilakukan sejak lembaga ini aktif kembali setelah Muktamar NU ke-32 di Makasar 2010. Sejak 2015, pelatihan ini semakin diintensifkan dengan lebih terstruktur, dan sudah dilakukan sebanyak 36 kali di berbagai tempat di wilayah Nusantara.
- b. Training of Trainer (ToT) Madrasah Kader NU di Jawa Barat 11-5 November 2016. Pelatihan ini diharapkan bisa menjadi pelatih di tempatnya masing-masing.
- c. Pelatihan pemuda Pelopor Masjid dilakukan sebanyak 6 kali selama 2017.
- d. Pelatihan Ta'mir, Khatib dan Dai dilakukan sebanyak 2 kali yakni di Purwakarta (2-4 Agustus 2019) dan di Sukabumi (23-25 Agustus 2019).
- e. Pendampingan dan pembinaan masjid-masjid di wilayah-wilayah yang diselenggarakan pelatihan.

Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU)

Fatayat adalah sayap organisasi perempuan muda di kalangan NU. Lembaga ini termasuk memiliki peran strategis dalam pencegahan radikalisme karena berhadapan langsung dengan remaja putri yang sering menjadi sasaran dakwah kelompok radikal. Beberapa program yang telah dilaksanakan adalah:

- a. Penyusunan modul dan kurikulum pengkaderan pada tahun 2016. Modul ini sudah diuji coba dalam pelatihan kader tingkat nasional di Bogor Desember 2016.
- b. Latihan Kader Dasar di Bogor dan Bekasi (Agustus 2019).
- c. Pelatihan kepemimpinan nasional melibatkan pengurus pusat, wilayah dan cabang seluruh Indonesia.
- d. Gerakan perlindungan anak dari tindak kekerasan bekerja sama dengan KPAI.
- e. Pembentukan Forum Da'iyah Fatayat NU di tingkat wilayah dan Cabang.
- f. Melakukan workshop anti-radikalisme dan terorisme bagi da'iyah Fatayat NU di Bandung 20-22 April 2017. Kegiatan ini bekerja sama dengan BNPT.
- g. Membuat tayangan interaktif selama 30 menit di channel @Kvision (Kompas TV) dan Dakta TV.
- h. Membuat modul Dakwah Aswaja yang diawali dengan workshop 3-4 Desember 2016.
- i. *Mainstreaming* gender dalam pencegahan ekstremisme kekerasan yang melibatkan pengurus pusat dan wilayah se-zona Jawa, dan tingkat cabang se-Jabodetabek. Kegiatan ini bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice dalam Working Group of Women and C/PVE.

6. Gerakan Kultural

Selama ini dikenal istilah "NU struktural" dan "NU kultural". NU struktural merujuk pada para pengurus NU yang bertanggung jawab menjalankan program-program resmi organisasi. NU kultural merujuk pada organisasi atau warga NU yang tidak masuk ke dalam struktur kepengurusan atau keorganisasian NU, tapi melakukan aktivitas atau gerakan yang sekaligus bukan program resmi NU namun memiliki kesamaan visi dan spirit perjuangan dengan NU.

Dalam konteks pencegahan radikalisme, tidak mungkin mengabaikan peran yang dimainkan oleh kalangan NU struktural. Berikut ini adalah beberapa gerakan NU kultural yang juga bergerak di isu pencegahan radikalisme.

Jaringan Gusdurian

Jaringan ini diketuai oleh Alissa Wahid, putri pertama Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid). Tujuannya adalah merawat dan meneruskan pemikiran, gagasan, dan perjuangan Gus Dur. Gusdurian adalah sebutan untuk para murid, pengagum, dan penerus pemikiran dan perjuangan Gus Dur.

Jaringan ini tersebar di berbagai penjuru Indonesia, bahkan di manca negara. Di beberapa tempat, terbentuk komunitas-komunitas lokal, namun sebagian besar terhubung melalui forum dan dialog karya. Untuk merangkai kerja bersama dalam arena Jaringan Gusdurian, dibentuklah Sekretariat Nasional Jaringan Gusdurian. Di antara berbagai program, isu yang sangat kuat dan dominan adalah penyebaran gagasan-gagasan perdamaian, demokrasi, dan hak asasi manusia.

The Wahid Foundation

The Wahid Foundation merupakan lembaga yang dikelola oleh anak-anak muda NU yang bergerak dalam dalam beragam isu, mulai isu demokrasi, HAM, pluralisme, hingga advokasi kebijakan publik. The Wahid Foundation (sebelumnya dikenal sebagai The Wahid Institute) diluncurkan pada tanggal 7 September 2004, di Four Seasons Hotel di Jakarta, secara tegas meletakkan dirinya sebagai salah satu jawaban dari berbagai tindakan teror dan kekerasan komunal yang dipicu oleh sengketa atas nama agama atau identitas etnis

The Wahid Foundation didirikan untuk memajukan visi kemanusiaan dari KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam hal toleransi, kebhinnekaan, pemberdayaan masyarakat, demokrasi, keadilan, dan penguatan nilai-nilai perdamaian dan non-kekerasan di Indonesia dan di seluruh dunia. Sebagian dari kegiatan The Wahid foundation di tahun 2018, antara lain:

- a. Membentuk 20 sekolah damai yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya, masing masing 5 sekolah damai;
- b. Melibatkan 1.171 perempuan dalam pembentukan Koperasi Cinta Damai yang tersebar di Depok (477 anggota koperasi), Kabupaten Bogor (99 anggota), Solo (78), Klaten (161), Kabupaten Batu dan Malang (77), dan Sumenep (39); (2) kampanye online 670 konten narasi damai termasuk video dan grafis dengan jangkauan 2.8 juta orang;
- c. Kampanye perdamaian: memiliki 24 jaringan media; 3.530 mahasiswa; 1.309 siswa; 500 tokoh agama; 400 pesantren;
- d. Advokasi kemerdekaan beragama dan berkeyakinan, advokasi kebijakan Strategi Nasional Penguatan Nilai dan Praktik Toleransi, dan advokasi Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan yang mengarah pada Terorisme.

Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)

Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) adalah lembaga yang *concern* pada isu pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, dengan menempatkan pesantren sebagai salah satu motor penggerakannya. Didirikan 1983 oleh sejumlah aktivis NGO, tokoh agama dan para pakar yang dimotori oleh K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur), P3M menekankan

pentingnya keberadaan instrumen sosial dalam menggerakkan dan membangun tata kehidupan yang mengedepankan moralitas dan kemaslahatan publik dengan berlandaskan nilai-nilai agama, sosial dan budaya. Pesantren sebagai salah satu instrumen sosial yang concern dalam membangun karakter bangsa melalui pendidikan keagamaan memberikan kontribusi besar dalam menciptakan keberagaman yang berwawasan kebangsaan.

Berangkat dari nilai-nilai di atas, P3M telah melakukan berbagai upaya dan inisiatif untuk membangun pemahaman keagamaan yang membebaskan menuju kualitas tatanan sosial yang berkeadilan. Misalnya, sejak 2002 hingga 2007, P3M mengembangkan wacana Islam Emansipatoris, yaitu pencarian dan pengayaan gagasan keagamaan yang menyemangati pembebasan, perubahan dan pembelaan terhadap kaum lemah.

Sejak 2004 hingga 2016, P3M juga melakukan penguatan wacana demokrasi di lingkungan santri dan pesantren, seperti, pembentukan kepemimpinan santri sebagai laboratorium implementasi nilai-nilai dan praktik demokrasi demokrasi yang sesuai dengan konsep syura. Selama enam tahun (2007-2013), P3M mengembangkan apa yang disebut dengan Fikih Tasamuh (Teologi Toleransi).

Beberapa tahun terakhir ini P3M banyak melakukan riset tentang radikalisme, antara lain: Survei 100 Masjid Kementerian, Lembaga Negara dan BUMN di Jakarta; Riset 20 Masjid BUMN, 5 Masjid Kampus dan 5 Masjid Perumahan; Riset Politisasi SARA di Kampung Sawah; Riset Radikalisme di IPB; Riset Moderasi Beragama dan Potensi Radikalisme di 10 Pesantren yang Berdiri Setelah Tahun 2000.

Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS)

Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) lahir di Yogyakarta. Lembaga ini didirikan oleh sekelompok aktivis mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN Sunan Kalijaga) yang berlatar belakang NU. Komitmen mereka atas Islam moderat dan keterlibatan para pendirinya dalam berbagai aktivitas gerakan prodemokrasi mendorong lembaga ini ke arah gerakan edukasi masyarakat melalui melalui kajian dan penerbitan buku-buku keislaman kritis. Pada tahun 1993 terbit buku pertama LKIS berjudul: *Kiri Islam*, karya Kazhuo Shiogaki. Buku ini merupakan kajian atas pemikiran intelektual Muslim Mesir progresif, Hassan Hanafi.

LKIS terus menerbitkan buku-buku kritis. Seiring dengan kesadaran perlunya mengembangkan diversifikasi usaha, maka tema-tema lain dirasa perlu diterbitkan LKIS yakni: NU dan Pesantren, Pendidikan, Sosial, Budaya, Politik, Satra, Kajian Perempuan, Filsafat, Seri Dialog Agama, Komunikasi, Seri Pendidikan Politik, Pustaka Populer dan Seri Pemberdayaan Perempuan.

Sekalipun demikian, LKIS lebih dari sekadar penerbit buku. LKIS lebih merupakan komunitas di mana pergulatan intelektual, aktivisme sosial, dan advokasi kebijakan menjadi karakter yang khas. Di sinilah LKIS juga masuk ke dalam isu-isu pencegahan radikalisme, melalui program penelitian atau pendampingan sekolah-sekolah.

B.3 Daya Tahan Nahdlatul Ulama

Pertanyaan besar yang penting untuk dijawab adalah seberapa kuat daya tahan NU dari pengaruh gerakan dan ideologi radikal yang berkembang pesat di Indonesia saat ini? Apakah NU sebagai representasi ormas moderat masih konsisten atau sudah mengalami pergeseran?

Di tingkat pengurus, bisa dikatakan daya tahan NU terhadap pengaruh ideologi radikal cukup baik. Ketahanan pengurus salah satunya ditentukan oleh mekanisme perekrutan dan penjagaan pengurus sangat ketat. Keketatan ini salah satunya bisa dibuktikan melalui kewajiban setiap pengurus untuk mengikuti pelatihan kader, di mana di dalamnya wacana antiradikalisme sangat dominan.

Pewajiban untuk mengikuti pelatihan kader ini berlaku kepada semua pengurus mulai pusat hingga tingkat ranting di desa-desa. Bahkan ada pengakuan dari salah seorang pengurus di PCNU Situbondo, bahwa jika ada seorang pengurus yang menyuarakan agenda dan paham lain, yang bersangkutan akan segera diberi sanksi organisasi.⁵⁸ Pengakuan yang sama juga disampaikan oleh Anggia Erma Rini, Ketua Umum Fatayat NU, bahwa NU akan mereaksi dengan keras jika ditemukan ada pengurus yang berpaham radikal.⁵⁹

Apakah sudah pernah ada kasus seorang pengurus diberhentikan karena yang bersangkutan diindikasikan terpapar ideologi radikal? Ada kasus di mana hal itu sungguh-sungguh terjadi, yaitu di kepengurusan NU Cabang Gresik. Ketika ada seorang yang terindikasi berpaham radikal, PWNU Jawa Timur meminta PCNU Gresik untuk mereshuffle orang yang bersangkutan.⁶⁰

Sikap tegas juga disampaikan oleh KH Z. Arifin Junaedi, Ketua Umum Ma'arif NU, lembaga di bawah PBNU yang menangani lembaga-lembaga pendidikan formal, saat lembaganya menemukan ada siswa yang terindikasi terpapar HTI.

Kita kan ada program kemah pramuka Maarif. Ketika kemah untuk tingkat SLTP di Kempek Cirebon tahun 2015 ketika kita akan pawai budaya itu ada anak yang pakai bendera HTI. Kemudian waktu kemah pramuka tingkat SMA di Magelang (2017) itu sama ada yang bawa bendera HTI. Ya tentu saja kita amankan dan kita tanya. Kalau kasarnya kita interogasi. Kemudian yang di Cibubur kemaren tahun 2019 bulan pebruari ada lagi itu. Pawai budaya pakai topi dan kain yang diikatkan. Ya kita tangkap.⁶¹

Pengakuan adanya ketegasan dan penyaringan kepengurusan melalui mekanisme pelatihan kader dinyatakan oleh semua informan dari berbagai level kepengurusan NU. Seperti di Situbondo, di Sragen juga ditemukan hal yang sama, bahwa pengkaderan di berbagai tingkatan menjadi kunci penting dalam menjaga pengurus NU dari pengaruh ideologi radikal.⁶²

Penyaringan rekrutmen kepengurusan di dalam NU bisa dilihat pada pernyataan pengurus Fatayat NU Jawa Timur, Yeni Lutfiana.⁶³

Kita itu kalau mau setiap kepengurusan baru, itu nomor satu ada surat pernyataan kesediaan, yang kedua masukkan CV kemudian juga observasi

⁵⁸ Wawancara Fawaid di Kantor PC. GP Ansor Situbondo, Jum'at, 17 Mei 2019; Mamlu'atul Hasanah Ketua III PC Fatayat NU Situbondo **Ahad, 13 Mei 2019.**

⁵⁹ Wawancara dengan Anggia Erma Rini di Kantor Kemenpora, Rabu, 15 Mei 2019.

⁶⁰ Wawancara KH. Marzuki Mustamar di Kantor PWNU Jawa Timur, Kamis, 9 Mei 2019.

⁶¹ Wawancara KH Z. Arifin Junaedi di PBNU Jakarta Selasa, 3 Juli 2019

⁶² Wawancara Nurwafi Hamdan di kantor PCNU Sragen 12 Mei 2019.

⁶³ Wawancara Yeni Lutfiana di kantor PWNU Jatim, Rabu, 8 Mei 2019.

dari orang lain. Itu misalnya gini dia ngga pernah jadi IPPNU ngga pernah jadi PMII tapi dia anaknya orang NU, kita telusuri lagi apa yang selama ini aktivitas ke-NU-an yang keluarganya lakukan secara kultural maupun struktural. Itu Fatayat mempunyai mekanisme check dan recheck.

Sekalipun demikian, para informan yang sebagian besar adalah pengurus NU mengakui adanya warga NU yang mendukung gagasan-gagasan keislaman intoleran dan radikal. Di sini, yang perlu dipertimbangkan adalah karakter anggota NU yang sangat tergantung pada kiai. Bisa diasumsikan bahwa daya tahan NU, khususnya di tingkat jamaah, dari pengaruh ideologi radikal sangat tergantung pada kiai lokal yang menjadi pemimpinnya. Kalau kiai yang menjadi pusat referensi keislaman umat NU terpapar ideologi radikal, besar kemungkinan jamaah si kiai tersebut memiliki pandangan dan sikap yang sama dengan panutannya.⁶⁴

Radikalisasi di kalangan kiai sendiri terjadi karena beberapa kemungkinan, salah satunya karena pendidikan. Skenario sederhananya bisa dijelaskan sebagai berikut: ada seorang kiai yang menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan tertentu.⁶⁵ Anak seorang kiai yang sudah terpapar ideologi radikal itu kemudian kembali ke rumahnya. Tinggal menunggu waktu baginya untuk memengaruhi umat karena dialah yang akan meneruskan kekiaian ayahnya setelahnya ayahnya wafat.⁶⁶ Radikalisasi di kalangan kiai-kiai tradisional bukan lagi hal aneh. Ditemukan beberapa orang kiai NU yang bahkan menjadi pengurus FPI.⁶⁷

Karena ditemukan adanya radikalisasi di kalangan nahdliyyin inilah yang membuat NU sangat getol melakukan kaderisasi dan mewajibkan semua pengurus ikut dalam petihan kader. Tidak mungkin lagi bagi NU untuk semata-mata mendasarkan kemoderatannya dari sisi ritual peribadatan, karena jelas ada kelompok yang memiliki tata cara peribadatan yang sama, tapi ideologi keagamaannya berbeda. Misalnya NU dan FPI jika dilihat dari cara beribadat, mungkin sama, namun jelas berbeda dalam menyikapi NKRI, Pancasila, dan keragaman bangsa.⁶⁸

Pertanyaan berikutnya adalah, seberapa banyak warga NU yang terpengaruh ideologi radikal? Jelas tidak ada jawaban pasti tentang hal ini. Namun banyaknya pesantren yang tetap tegak dengan Islam moderat ala NU, banyaknya pengajian keagamaan yang diisi oleh para kiai moderat, serta berbagai lembaga pendidikan NU, memungkinkan NU untuk tetap menjaga umatnya.⁶⁹ Berbagai acara yang dilakukan oleh NU dan para banomnya dengan melibatkan massa NU yang sangat besar juga dirasa efektif dalam menjaga warganya.⁷⁰

⁶⁴ Wawancara Helmy Faishal Zaini di kantor PBNU, Rabu, 8 Mei 2019.

⁶⁵ Beberapa informan menyebut Arab Saudi, atau Timur Tengah secara umum, sebagai tempat dari mana ideologi intoleran dan kekerasan masuk ke dalam putra-putra kiai yang mondok di sana.

⁶⁶ Wawancara Helmy Faishal Zaini di kantor PBNU, Rabu, 8 Mei 2019.; Wawancara Nur Rofiah, Jum'at, 17 Mei 2019.

⁶⁷ Baca Ahmad Zainul Hamdi, *Radikalisasi Islam Tradisional: Studi Kasus Radikalisasi Kiai-kiai di Sampang*, Madura, makalah tidak diterbitkan.

⁶⁸ Wawancara Yahya Cholil Staquf, di kantor PBNU, Kamis, 23 Mei 2019; Wawancara Robikin Emhas di kantor PBNU, Jumat, 17 Mei 2019.

⁶⁹ Wawancara Nurwafi Hamdan di kantor PCNU Sragen 12 Mei 2019.

⁷⁰ Wawancara Nurwafi Hamdan di kantor PCNU Sragen 12 Mei 2019; Hj. Masruroh Wahid, Ketua PW Musimat NU Jawa Timur (Selasa, 21 Mei 2019); KH. Zaki Hadzik, Ketua PW RMI NU Jawa Timur (Sabtu, 11 Mei 2019).

B.4 Tantangan-tantangan Nahdlatul Ulama

Dalam menjalankan upaya penguatan moderasi beragama dan sekaligus menjawab fenomena radikalisme yang makin luas, kalangan NU tentu mengalami banyak tantangan. Di bawah ini adalah beberapa tantangan yang dihadapi NU:

1. Kurangnya Kreativitas dalam Berdakwah

Beberapa informan menyatakan bahwa dalam menghadapi kelompok radikal, NU kurang agresif dalam berdakwah.⁷¹ Tidak jelas apa yang disebut dengan NU kurang agresif. Namun, jika dilihat dari berbagai pengakuan informan, tampaknya yang menjadi kendala dakwah NU adalah kurangnya kreativitas dalam mengemas dan memasarkan Islam moderat pada publik.

Ini misalnya bisa dilihat dalam pernyataan Anggia Erma Rini.⁷² Menurut pengakuan Ketua Umum PP Fatayat NU ini, jika dibanding dengan kelompok salafi-Wahabi, NU tidak cukup kreatif dalam meraih dukungan publik, terutama kalangan Muslim urban-terdidik. Kalangan salafi-Wahabi sangat kreatif dalam melakukan dakwah, bahkan ibadah pun bisa dikemas sedemikian rupa sehingga menarik banyak orang dan menjadi gerakan sosial yang cukup efektif.

2. Kurangnya Dukungan Pemerintah

NU merasa bahwa dukungan pemerintah terhadap kerja-kerja moderasi kurang memadai. Dukungan pemerintah di sini ada dua macam: dukungan langsung kepada NU dan dukungan berupa kebijakan yang memungkinkan NU leluasa melakukan kerja-kerja moderasi keagamaan.

Dukungan yang pertama secara eksplisit disampaikan oleh Sekjend PBNU Helmy Faisal Zaini.⁷³ Menurutnya, NU saat ini bisa dikatakan satu-satunya organisasi yang bersuara sangat lantang dalam memerangi radikalisme. Karena itu, nyaris semua kelompok selalu menuntut NU untuk berperan dalam menangkal radikalisme. Hal ini tentu sangat membanggakan bagi NU, namun di saat yang sama juga menempatkan NU sebagai pihak yang seakan-akan paling bertanggung jawab. Parahnya dalah, ketika tuntutan kepada NU sangat besar, hal itu tidak dibarengi dengan dukungan kepada NU.

Memangnya negara ini hanya punya NU? Emangnya penghuni Indonesia itu siapa saja, kok serba NU. Kita bersama. Kita juga tidak mau disebut satu-satunya pihak yang menjaga bangsa ini. Bangsa ini terlalu besar untuk dikelola oleh satu ormas NU. Jadi saya ingin mengajak ke semuanya bahwa ayolah tugas menjaga kebhinekaan, menjaga bangsa ini, ya tugas elemen bangsa kolektif. Saya mempertanyakan BUMN telekomunikasi yang dimiliki negara, mengajak kerjasama dengan NU aja gak. Terus untuk apa kita mempunyai teknologi komunikasi yang canggih-canggih tidak digunakan untuk kontra narasi radikalisme dan terorisme. Kita harus membangun ekosistem pendidikan yang baik sehingga mengajarkan nilai-nilai toleran...sehingga tindakan-tindakan provokasi kebencian yang bisa membahayakan jiwa kelompok lain atau keyakinan lain itu bisa dicegah sekaligus ditindak secara hukum. Jadi kalau kita bisa menciptakan ekosistem pendidikan dan ekosistem

⁷¹ Wawancara KH Z. Arifin Junaedi di PBNU Jakarta Selasa, 3 Juli 2019.

⁷² Wawancara Anggia Erma Rini di Kantor Kemenpora, Rabu, 15 Mei 2019.

⁷³ Wawancara Helmy Faishal Zaini di kantor PBNU, Rabu, 8 Mei 2019.

hukum yang baik mungkin kita bisa berharap lahirnya masyarakat yang toleran”.

NU juga merasa bahwa minimnya dukungan terhadap NU adalah membiarkan NU menghadapi radikalisme tapi pemerintah tidak mengembangkan kebijakan yang tegas untuk memberantas radikalisme dari insitusi-institusi pemerintah.⁷⁴ Misalnya, tidak mungkin bagi NU untuk melakukan moderasi di sekolah-sekolah negeri jika pemerintah tidak membuat kebijakan yang bisa menghendaki radikalisasi di sekolah-sekolah negeri.⁷⁵ Tidak mungkin juga bagi NU untuk memoderasi kehidupan keagamaan publik jika para pengkhotbah kebencian di masjid-masjid dibiarkan begutu saja.⁷⁶

Karena itu, maka tidak mengherankan jika hampir semua informan menyatakan bahwa yang diinginkan adalah kerja sama yang baik antara NU dengan pemerintah.⁷⁷ Misalnya, Buchori Muslim,⁷⁸ Sekjend LDNU, menekankan pentingnya kerja sama antara NU dengan Kementerian dan BUMN, terutama dalam mengelola masjidnya. Sementara Mushonifin menginginkan diberinya NU akses pada media-media besar agar lebih kuat menyuarakan Islam moderat.⁷⁹

3. Kuatnya Konten Radikalisme di Media Sosial

Penyebaran narasi intoleransi, kekerasan, dan kebencian di media sosial adalah salah satu tantangan berat bagi NU dalam melakukan moderasi keagamaan.⁸⁰ Sekalipun media-media NU berkembang dengan sangat baik, namun NU belum memiliki poasukan cyber yang mampu mengimbangi maraknya konten-konten radikal yang disebar melalui media sosial.⁸¹

Cara dakwah NU yang masih manual dan kurang memanfaatkan media sosial adalah salah satu faktor yang menyebabkan kekalahan NU dari kelompok salafi-Wahabi. Jelas sebagian besar kiai-kiai NU yang aktif berdakwah kurang memahami arti penting media sosial dalam membangun narasi publik saat ini.⁸² Secara gamblang, Savic Ali, menyatakan bahwa banyak kiai yang berdakwah secara offline, padahal banyak generasi muda yang belajar Islam secara online.⁸³

C. Kesimpulan

Dari paparan di atas bisa disimpulkan bahwa NU merespons radikalisme dengan sangat kuat. Sikap NU ini berbanding lurus dengan sikap kebangsaan NU, antara lain: pengakuan final atas NKRI dan Pancasila; menolak sistem khilafah dan

⁷⁴ Wawancara KH Hudallah Ridwan, Lc, Sekretaris Syuriah PWNU Jawa Tengah Rabu, 15 Mei dan Selasa, 21 Mei 2019.

⁷⁵ Wawancara KH Z. Arifin Junaedi di PBNU Jakarta Selasa, 3 Juli 2019.

⁷⁶ Wawancara Savic Ali di Kantor PBNU Jakarta Kamis, 23 Mei 2019.

⁷⁷ Muhammad Koderi, MT, Dewan Penasehat PW ISNU Jawa Timur Selasa, 28 Mei 2019.

⁷⁸ Wawancara Buchori Muslim di Kampus UIN Jakarta Selasa, 2 Juli 2019.

⁷⁹ Wawancara dengan Mushonifin di Kantor eLSA (Lembaga Studi Sosial dan Agama) Semarang, Sabtu, 25 Mei 2019.

⁸⁰ Wawancara Ruchman Bashori Ketua Bidang Kaderisasi PP Ansor di Kantor Kantor Kementerian Agama Jl Banteng Jakarta, Jum'at, 10 Mei 2019.

⁸¹ Wawancara KH Z. Arifin Junaedi di PBNU Jakarta Selasa, 3 Juli 2019

⁸² Wawancara KH. Ubaidullah Shodaqoh di Kantor PWNU Jawa Tengah Selasa, 21 Mei 2019; Mushonifin, Koordinator Tim Cyber PW GP Ansor Jawa Tengah (Sabtu, 25 Mei 2019); Rusmadi, Ketua Lakpesdam PWNU Jateng (Sabtu, 25 Mei 2019).

⁸³ Wawancara Savic Ali di Kantor PBNU Jakarta Kamis, 23 Mei 2019.

menolak formalisasi syariat Islam; keharusan toleransi; dan penolakan atas kekerasan dalam berdakwah.

NU telah melakukan berbagai upaya yang secara eksplisit dilakukan untuk melawan radikalisme keagamaan. Upaya NU yang paling terkonsolidasi adalah penjagaan organisasi dari infiltrasi gerakan radikal melalui program pengkaderan. Berbagai program juga dikembangkan oleh lembaga dan badan otonom di bawahnya, mulai dari pengembangan media hingga program-program khusus yang disengaja untuk menghadapi radikalisme. Upaya-upaya NU terkonsolidasi secara baik dari pusat hingga ke level paling bawah. Yang tidak boleh diabaikan juga adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh komunitas NU kultural, seperti Jaringan GUSDURian, The Wahid Foundation, dsb.

Berbagai upaya di atas membuat NU memiliki daya tahan yang cukup baik dari pengaruh ideologi radikal. Sekalipun demikian, hampir semua informan mengakui bahwa ditemukan adanya warga NU di bawah yang terpengaruh ideologi radikal. Sekalipun jumlahnya relatif kecil, namun radikalisasi di warga NU tidak mungkin dipungkiri.

Setidaknya, ada tiga tantangan besar yang dihadapi NU dalam melakukan moderasi keagamaan. Tantangan-tantangan itu antara lain: kurangnya kreativitas dalam berdakwah; kurangnya dukungan pemerintah; dan kuatnya konten radikalisme yang disebar melalui media sosial. Akumulasi dari ketiga tantangan ini membuat kerja-kerja NU terasa kurang efektif, sekuat apapun NU telah melakukan kerja-kerja moderasi keagamaan di Indonesia saat ini.[]

BAB III

MUHAMMADIYAH

A. Pendahuluan

Sebagai organisasi keislaman yang mengusung Islam *wasathiyah* (moderat), Muhammadiyah memandang serius fenomena intoleransi dan radikalisme dalam kehidupan beragama. Tatkala radikalisme dianggap sebagai suatu sikap beragama yang mengabsahkan kekerasan dalam mencapai tujuan, intoleransi ibarat gerbang awal untuk mencapai tahap itu. Radikalisme keagamaan pada tingkatan tertinggi terwujud dalam bentuk aksi terorisme yang mengoyak nilai-nilai kemanusiaan.

Terlepas dari dinamika yang ada, para aktivis Muhammadiyah umumnya menolak radikalisme dalam beragama. Bagi mereka, Islam adalah agama perdamaian yang menolak segala bentuk kekerasan. Dalam konteks keindonesiaan, Muhammadiyah memandang bahwa NKRI bersifat final dan Pancasila adalah ideologi negara yang Islami.

Sekalipun demikian, dijumpai ada orang-orang Muhammadiyah yang merasa tidak puas dengan posisi moderat Muhammadiyah tersebut. Mereka yang merasa tidak puas pada akhirnya memilih keluar dari Muhammadiyah dan merapat ke kelompok-kelompok yang selama ini dianggap sebagai aktor intoleran atau radikal.

Tidak bisa dipungkiri bahwa ada fenomena infiltrasi ideologi radikal ke dalam tubuh Muhammadiyah. Fenomena menguatnya salafi di dalam Muhammadiyah bisa menjadi indikasi awal dari hal ini. Narasi-narasi keislaman yang selama ini dikembangkan oleh kelompok Muslim garis keras juga kerap ditemukan. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang sejak awal menetapkan dirinya sebagai Islam moderat dituntut memberi respon yang tepat terhadap fenomena ini.

B. Peran Muhammadiyah dalam Menghadapi Radikalisme

B.1 Respon Muhammadiyah

Gejala radikalisme keagamaan di Indonesia sepenuhnya disadari oleh para elit Muhammadiyah. Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, mensinyalir bahwa Muhammadiyah pada dekade mutakhir menghadapi dinamika kehidupan keagamaan dan kebangsaan yang luar biasa kompleks. Sejak Reformasi 1998, berkembangluas organisasi dan aliran keagamaan di lingkungan umat Islam dengan beragam ideologi.¹

Menurut Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, ada semacam pertarungan antara kelompok pengusung Islam moderat-toleran dengan kelompok Islam radikal. Saat ini terjadi kontestasi antara kelompok *emerging Muslim* dengan *establishing Muslim*. Di antara kelompok

¹Wawancara Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah (29 Mei 2019).

establishing Muslim ini sudah lama tumbuh dengan karakternya yang moderat, misalnya, Muhammadiyah, NU, Al-Washliyah dan sebagainya. Kelompok ini dinilai berkembang sesuai dengan karakter Indonesia.

Kelompok *emerging Muslim* saat ini sedang tampil mengemuka. Kelompok inilah yang mewarnai iklim keagamaan maupun iklim politik di Indonesia. Jika ditelisik lebih jauh, kelompok ini tumbuh seiring menguatnya interaksi dunia Islam, terutama antara Muslim Indonesia dan Timur Tengah, khususnya para pelajar. Ketika alumni Timur Tengah ini kembali ke Tanah Air, mereka tidak hanya membawa ilmu, tapi juga pengalaman hidup selama di sana.

Para pendiri kelompok *establishing Muslim* sesungguhnya juga alumni Timur Tengah. Tapi Timur Tengah dalam situasi politik yang berbeda dengan Timur Tengah sekarang. Timur Tengah saat ini sedang berubah, baik politik maupun ideologi. Karena itu, karakter keislamannya berbeda. Kelompok *emerging Muslim* ini mencoba mempoisisikan dirinya sebagai representasi umat Islam secara keseluruhan, tidak terkotak-kotak ke dalam ormas. Mereka mengusung Islam saja sebagai solusi atas berbagai ketegangan yang terjadi antarkelompok. Tapi pada akhirnya kelompok ini membangun komunitas eksklusif dengan identitas keislaman dan pemikiran sendiri yang dipengaruhi oleh gerakan-gerakan Islam Timur Tengah.²

Perkembangan baru tersebut selama sekitar dua puluh tahun telah memberi pengaruh tertentu pada pemikirandan gerakan umat Islam Indonesia. Nyaris tidak ada yang tidak terpengaruh angin baru ini, termasuk organisasi-organisasi Islam yang selama ini dikenal sebagai arus-utama Islam Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.³

Situasi ini merembes nyaris ke seluruh aspek kehidupan sosial. Kecenderungan serba konfrontatif kepada siapapun, baik terhadap umat seagama lebih-lebih kepada bukan seagama, cenderung menguat. Umat tidak bisa membedakan wilayah sakral dan wilayah profan. Misalnya, pekik "Allahu Akbar" ketika berada dalam forum-forum pengajian atau merespon pidato yang bersetuju menjadi salah satu ciri dari kecenderungan ini. Melafadzkan *Allahu Akbar* yang sakral kini disuarakan dengan pekik keras dan dalam suasana profan dengan tujuan politik yang sebelum ini tidak pernah terdengar di lingkungan Muhammadiyah.⁴

Situasi ini semakin mengeras pasca Aksi Bela Islam (ABI) 212 dan Pilkada DKI 2017. Peristiwa politik elektoral ini memperkeras politik identitas yang pada gilirannya juga memperkeras benturan masing-masing ideologi. Seiring dengan ini, wacana keislaman di ruang publik bisa dikatakan jauh dari kata sehat. Islam menjadi narasi untuk mengeksklusi pihak lain. Keadaan

²Wawancara Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum Muhammadiyah (13 Juni 2019)

³Wawancara Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah (29 Mei 2019).

⁴Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, melarang pekik "Allahu Akbar" saat pertemuan internal Muhammadiyah. Menurutnya, kalimat Allahu Akbar tidak seharusnya dijadikan alat politik atau untuk kepentingan sendiri dan kelompok. Baca selengkapnya di [Tirto.id](https://tirto.id) dengan judul "Ketum PP Muhammadiyah Larang Pekik "Allahu Akbar" di Acara Internal", <https://tirto.id/ketum-pp-muhammadiyah-larang-pekik-allahu-akbar-di-acara-internal-cE8P>.

semakin kompleks jika dikaitkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Wacana politik berkelindan dengan wacana keagamaan, di mana pilihan yang disediakan seringkali hanya dua: pihakku (Islam) atau pihak mereka (non-Islam). Menempatkan diri dalam situasi ini sungguh tidaklah mudah bagi Muhammadiyah.⁵

Haedar Nashir mengamati adanya perubahan dalam peta dan arus gerakan pemikiran keislaman, setidaknya jika diamati dari dua kelompok yang selama ini diidentifikasi sebagai tradisional (atau neotradisionis) dan modernis (atau neomodernis). Kelompok pertama yang menguasai khazanah tradisi atau *turats*, kini mulai berani berpikir maju, bahkan melampaui kaum modernis. Neotradisionalisme Islam kini tampil progressif dan sampai batas tertentu menjadi liberal. Sementara neomodernisme Islam justru gagap membaca realita dan menjadi kaku. Di sinilah pentingnya Muhammadiyah sebagai pelopor modernisme Islam bangkit kembali melakukan gerakan pencerahan untuk menampilkan pembaruan Islam abad kedua puluh satu yang bertumpu pada purifikasi dan dinamisasi keislaman.⁶

Terkait dengan Islam *wasathiyah* (moderat), Hamim Ilyas, Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, menyatakan bahwa Muhammadiyah adalah Islam moderat yang pro-kemajuan.⁷ Sebagai organisasi moderat, Muhammadiyah memang bisa beririsan dengan paham agama mana pun, termasuk dengan kelompok-kelompok salafi.⁸ Akan tetapi, di sinilah masalahnya. Paham agama kaum modernis seperti Muhammadiyah cenderung gampang goyah. Karena tidak ada kitab yang secara skematis menjadi panduan paham keagamaannya, orang Muhammadiyah bisa rentan terpengaruh ideologi keislaman lain. Akibatnya, banyak muncul paham baru di Muhammadiyah, misalnya, MTA (Majlis Tafsir al-Qur'an) dan Salafi.⁹

Fenomena yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah kemungkinan infiltrasi HTI ke anak-anak muda Muhammadiyah. Menurut Sudarno Shobron, Anggota Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, HTI meskipun telah dibubarkan secara kelembagaan, tapi sebagai gerakan masih ada. Anak-anak muda Muhammadiyah bisa terpengaruh HTI karena mereka masih labil.¹⁰ Usia masa transisi menjadi tantangan internal IPM dalam membentengi kadernya dari pengaruh kelompok radikal.¹¹ Selain itu, kelompok lain yang bisa menggerus Muhammadiyah adalah Jamaah Tabligh. Ada kader Muhammadiyah mengikuti kegiatan *khuruj* Jamaah

⁵Wawancara Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah (29 Mei 2019).

⁶Observasi Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah (9 Mei 2019).

⁷Wawancara Hamim Ilyas, Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah (26 Mei 2019)

⁸Wawancara Tafsir, Ketua PWM Jawa Tengah (18 Mei 2019); Wawancara Ahmad NormaPermata, Ketua LPCR PP Muhammadiyah (26 Mei 2019).

⁹Wawancara Tafsir, Ketua PWM Jawa Tengah (18 Mei 2019).

¹⁰Wawancara Sudarno Shobron, Anggota Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah (27 Mei 2019).

¹¹Wawancara dengan Hafizh Syafaaturrahman, Ketua DPP IPM, pada 13 Juni 2019.

Tabligh karena menganggap Muhammadiyah punya kesamaan model dakwah dengan mereka.¹²

Oleh karena itu, memperteguh paham keislaman Muhammadiyah sangat penting. Muhammadiyah memang tidak membuat program atau membentuk semacam tim khusus untuk menanggulangi radikalisme maupun ekstremisme. Yang dilakukan Muhammadiyah adalah melakukan moderasi keagamaan melalui revitalisasi ideologi dan memahamkan kembali ideologi Muhammadiyah kepada warganya.¹³

Sekalipun demikian, ada beberapa peristiwa yang bisa dianggap sebagai respon Muhammadiyah dalam rangka menanggulangi radikalisme, baik langsung maupun tak langsung. Respon-respon tersebut secara kronologis bisa dirunut sebagai berikut:

Waktu	Bentuk Respon
2000	Pada tahun 2000, Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MTPPI) menerbitkan buku <i>Tafsir Tematik Al-Qur'an tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama</i> . Tafsir ini penting untuk membuka cakrawala dan pemikiran warga Muhammadiyah dan umat Islam umumnya mengenai pluralisme, dialog antariman, koeksistensi damai, perkawinan antaragama, dan murtad. Buku ini dengan eksplisit menyatakan bahwa pluralisme sosial dan pluralisme agama merupakan sesuatu yang tak terelakkan
2002	Muhammadiyah pada 2002 Tanwir di Bali, mulai memperkenalkan konsep "Dakwah Kultural". Setelah melalui berbagai diskusi, akhirnya Muktamar 2005 di Malang menerima secara bulat "Dakwah Kultural" sebagai keputusan resmi organisasi. Dakwah Kultural pada hakikatnya adalah seruan universalitas Islam untuk kesejahteraan seluruh umat manusia tanpa dibatasi oleh perbedaan agama, ras, suku, etnik, warna kulit, bahasa, dan gender.
28 Februari 2003	Lahir <i>The Maarif Institute for Culture and Humanity</i> . Spirit kelahiran Maarif Institute adalah kesadaran akan pentingnya institusi kultural yang memperjuangkan watak dan ciri khas Islam Indonesia sebagai agama <i>rahmat-an li al-'alamin</i> yang inklusif, dan memiliki kompatibilitas dengan ide-ide modern (demokrasi, HAM, dsb).
Oktober 2003	Lahir Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM). JIMM berkomitmen untuk membangun pemikiran keislaman baru dan menjadikan <i>tajdid</i> (pembaruan) sebagai semangat dalam melakukan reinterpretasi Islam yang lebih relevan dengan nilai-nilai modernitas.
2005	Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang 2005, Melahirkan "Pernyataan Pikiran Jelang Seabad Muhammadiyah" (<i>Zhawahir al-Afkar al-Muhammadiyah Abra Qarn min al-Zaman</i>). Di dalamnya antara lain berisi pernyataan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan pencerahan untuk melawan kekerasan dan terorisme.
2007	Din Syamsuddin mendirikan <i>Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations</i> (CDCC) pada tahun 2007. Hingga akhir kepemimpinannya dalam dua periode CDCC bersama dengan PP Muhammadiyah telah menggelar lima kali <i>World Peace Forum</i> (Forum

¹²Wawancara Sudarno Shobron, Anggota Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah (27 Mei 2019).

¹³Wawancara Tafsir, Ketua PWM Jawa Tengah (Sabtu, 18 Mei 2019).

	Perdamaian Dunia) dengan mengundang tokoh agama, pemerintah, intelektual dan aktivis perdamaian.
2009	Tanwir Muhammadiyah di Bandar Lampung 2009 mengeluarkan dokumen <i>Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa: Agenda Indonesia ke Depan</i> . Di dalamnya, Muhammadiyah menawarkan empat karakter bangsa yang salah satunya adalah moderat, yaitu sikap hidup yang tidak radikal dan mampu hidup dan kerjasama dalam kemajemukan.
2010	Muktamar ke-46 di Yogyakarta 3-8 Juli 2010 me-launch "Islam Berkemajuan" dalam Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua (<i>Zhawâhir al-Afkâr al-Muhammadiyah li al-Qarni al-Tsâni</i>) Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta): "Islam berkemajuan menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Islam berkemajuan menjunjung tinggi kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi...antiperang, antiterorisme, antikekerasan, antipenindasan, antiketerbelakangan...."
2013	Tanwir di Bandung 2013 melahirkan dokumen <i>Indonesia Berkemajuan: Rekonstruksi Kehidupan Bernegara yang Bermakna</i> . Indonesia Berkemajuan merupakan aktualisasi dari cita-cita Proklamasi dan tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia. Indonesia Berkemajuan dapat dimaknai sebagai negara utama (<i>al-madinal al-fadhilah</i>), negara berkemakmuran dan berkeadaban (<i>umran</i>), dan negara yang sejahtera. Indonesia yang berkemajuan harus...menjamin kebebasan berpikir, berekspresi, dan beragama; serta menghormati hak asasi manusia.
2015	Muktamar ke-47 di Makassar tahun 2015 menelorkan kosep <i>Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi was Syahadah</i> . Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila merupakan negara perjanjian atau kesepakatan karena dasar-dasarnya dihasilkan dari sebuah konsensus nasional. Indonesia juga dianggap negara persaksian di mana Muhammadiyah harus aktif melakukan kebajikan sebagai bagian dari tanggung jawab bangsa.
2015	Muktamar ke-47 di Makassar tahun 2015 PP Muhammadiyah menerbitkan buku <i>Isu-isu Strategis Keumatan, Kebangsaan, dan Kemanusiaan</i> , yang di antara isinya adalah keprihatinan terhadap gejala ekstremisme dalam ber-Islam serta menjadikan "keberagamaan yang moderat", "dialog sunni-syah" sebagai rekomendasi.
2016	PP Muhammadiyah mengadakan Pengajian Ramadan dengan tema "Negara Pancasila sebagai Darul 'Ahdî Wasy Syahadah: Perspektif Teologis dan Ideologis" tersebut berlangsung pada tanggal 9 hingga 11 Juni 2016 bertempat di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
2017	Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerbitkan buku <i>Negara Pancasila, Darul 'Ahdî Wasy-Syahadah: Perspektif Teologis dan Ideologis</i> . Dalam buku ini diuraikan pandangan Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tentang Negara Pancasila sebagai <i>dar al-ahdi wa al-syahadah</i> .
24 November 2017	Penandatanganan kerja sama antara PP Muhammadiyah dengan Kemenko PMK untuk program sosialisasi nilai-nilai Pancasila sebagai <i>dar al-ahdi wa al-syahadah</i> .
2018	Hasil kerjasama PP Muhammadiyah dan Kemenko PMK, menerbitkan buku Faozan Amar et.al. (eds.), <i>Darul-Ahdî Wasy-Syahadah: Konteks, Makna dan Aktualisasi untuk Indonesia Berkemajuan</i> . Dalam buku itu Haedar Nashir memberi prolog "Muhammadiyah Membangun Integrasi Keislaman dan Kebangsaan Menuju Indonesia Berkemajuan,".

B.2 Upaya-Upaya Muhammadiyah

Berbagai respon di atas pada akhirnya melahirkan upaya-upaya Muhammadiyah dalam menghadapi radikalisme keagamaan. Walaupun secara khusus Muhammadiyah tidak membuat program atau membentuk semacam tim untuk menanggulangi radikalisme maupun ekstremisme. Muhammadiyah melakukan moderasi pemikiran melalui revitalisasi dan memproduksi pemikiran serta kegiatan-kegiatan seperti pengajian-pengajian, pelatihan, pembinaan dll¹⁴.

Beberapa upaya Muhammadiyah bisa dilihat di bawah ini:

1. Islam Berkemajuan: Narasi Tandingan Islam Radikal

Dalam Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (ke-46) di Yogyakarta, 3-8 Juli 2010, Muhammadiyah melahirkan konsep "Islam Berkemajuan", sebuah narasi keislaman yang bertujuan untuk meneguhkan semangat *tajdid* (pembaharuan/reformasi) dalam Muhammadiyah. Dalam rumusan tersebut tertulis sebagai berikut:

Islam yang berkemajuan menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Islam yang menggelorakan misi antiperang, antiterorisme, antikekerasan, antipenindasan, antiketerbelakangan, dan anti terhadap segala bentuk pengrusakan di muka bumi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, eksploitasi alam, serta berbagai kemungkaran yang menghancurkan kehidupan. Islam yang secara positif melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan umat manusia di muka bumi. (Tanfidz Muktamar Seabad 2010: 15).

Dalam rumusan Islam Berkemajuan, Muhammadiyah mengimajinasikan cita-cita sosialnya dengan merujuk pesan al-Quran (QS. Ali Imran ayat 110; al-Baqarah ayat 143). Masyarakat Islam yang diidealisasikan Muhammadiyah adalah perwujudan dari *khaira ummah* (umat terbaik) yang memiliki posisi dan peran *ummatan wasathan* (umat tengahan), dan *syuhada 'ala al-nas* (pelaku sejarah) dalam kehidupan manusia.

Corak keislaman moderat Muhammadiyah terlihat dalam pandangannya yang memposisikan antara akidah, ibadah, akhlak dan muamalah duniawiyah secara proporsional. Hal ini dapat ditemukan dalam kutipan berikut:

¹⁴Wawancara KH Tafsir, Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur (18 Mei 2019).

Dengan pandangan Islam yang berkemajuan dan menyebarkan pencerahan, maka Muhammadiyah tidak hanya berhasil melakukan peneguhan dan pengayaan makna tentang ajaran akidah, ibadah, dan akhlak kaum muslimin, tetapi sekaligus melakukan pembaruan dalam *mu'amalat dunyawiyah* yang membawa perkembangan hidup sepanjang kemauan ajaran Islam. Paham Islam yang berkemajuan semakin meneguhkan perspektif tentang *tajdid* yang mengandung makna pemurnian (purifikasi) dan pengembangan (dinamisasi) dalam gerakan Muhammadiyah, yang seluruhnya berpangkal dari gerakan kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah (*al-ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah*) untuk menghadapi perkembangan zaman. (Tanfidz Muktamar Seabad 2010: 15).

Islam Berkemajuan juga dijelaskan oleh Muhammadiyah dengan istilah "Islam Kosmopolitan":

"Dalam menghadapi perkembangan kemanusiaan universal, Muhammadiyah mengembangkan wawasan keislaman yang bersifat kosmopolitan. Kosmopolitanisme merupakan kesadaran tentang kesatuan masyarakat seluruh dunia dan umat manusia yang melampaui sekat-sekat etnik, golongan, kebangsaan, dan agama. Kosmopolitanisme secara moral mengimplikasikan adanya rasa solidaritas kemanusiaan universal dan rasa tanggungjawab universal kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan dan pemisahan jarak yang bersifat primordial dan konvensional. (Tanfidz Muktamar Seabad 2010: 18).

"Kosmopolitanisme Islam yang dikembangkan Muhammadiyah dapat menjadi jembatan bagi kepentingan pengembangan dialog Islam dan Barat serta dialog antar peradaban.... Dalam kaitan relasi antar peradaban dan perkembangan kemanusiaan universal saat ini sungguh diperlukan *global ethic* (etika global) dan *global wisdom* (kearifan global) yang dapat membimbing, mengarahkan, dan memimpin dunia menuju peradaban yang lebih tercerahkan." (Tanfidz Muktamar Seabad 2010: 19).

Untuk memudahkan, makna Islam Berkemajuan muncul dalam beberapa rekomendasi Muktamar Muhammadiyah ke-47 yang secara lengkap tertuang dalam buku *Isu-isu Strategis Keumatan, Kebangsaan, dan Kemanusiaan* (2015). Ada beberapa rekomendasi yang menempatkan Muhammadiyah dalam posisi yang tegas dalam menghadapi radikalisme keagamaan, di antaranya adalah:

Pertama, Keberagamaan yang Moderat, "Perkembangan mutakhir menunjukkan gejala meningkatnya perilaku keberagamaan yang ekstrim antara lain kecenderungan mengkafirkan pihak lain (*takfiri*). Di kalangan umat Islam terdapat kelompok yang suka menghakimi, menanamkan kebencian, dan melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok lain

dengan tuduhan sesat, kafir, dan liberal. Kecenderungan *takfiri* bertentangan dengan watak Islam yang menekankan kasih sayang, kesantunan, *tawasuth*, dan toleransi. Sikap mudah mengkafirkan pihak lain disebabkan oleh banyak faktor antara lain cara pandang keagamaan yang sempit, miskin wawasan, kurangnya interaksi keagamaan, pendidikan agama yang eksklusif, politisasi agama, serta pengaruh konflik politik dan keagamaan dari luar negeri, terutama yang terjadi di Timur Tengah.

Kedua, Keberagaman yang Toleran, "Usaha memperkuat toleransi tidak cukup dengan memperbanyak aturan formal yang kaku, tetapi menyemai dan menumbuhkan kembali nilai-nilai toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, dan agama berbasis keluarga, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan formal disertai keteladanan para tokoh agama dan elite bangsa."

Berdasarkan penelusuran dokumen, gagasan gerakan pencerahan dalam Muhammadiyah sesungguhnya telah muncul dalam Muktamar ke-45 di Malang 2005. Rumusan "Pernyataan Pikiran Jelang Seabad Muhammadiyah" (*Zhawahir al-Afkar al-Muhammadiyah Abra Qarn min al-Zaman*) banyak diwarnai diksi 'pencerahan'. Baru pada Muktamar ke-46, 2010, Muhammadiyah mendeklarasikan diri sebagai "Gerakan Pencerahan" bersamaan dengan "Islam Berkemajuan" sebagai pandangan keislamannya.

Dalam "Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua" (*Zhawâhir al-Afkâr al-Muhammadiyah li al-Qarni al-Tsâni*) dinyatakan secara tegas:

Muhammadiyah pada abad kedua puluh satu berkomitmen kuat untuk melakukan gerakan pencerahan. Gerakan pencerahan (*tanwir*) merupakan praksis Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan. Gerakan pencerahan dihadirkan untuk memberikan jawaban atas problem-problem kemanusiaan berupa kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan persoalan-persoalan lainnya yang bercorak struktural dan kultural. Gerakan pencerahan menampilkan Islam untuk menjawab masalah kekeringan ruhani, krisis moral, kekerasan, terorisme, konflik, korupsi, kerusakan ekologis, dan bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan. Gerakan pencerahan berkomitmen untuk mengembangkan relasi sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi, memuliakan martabat manusia laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi toleransi dan kemajemukan, dan membangun pranata sosial yang utama. "

Tanwir di Bengkulu, 15-17 Februari 2019, mengangkat tema "Beragama yang Mencerahkan", setidaknya karena dua hal. *Pertama*, Muhammadiyah maupun umat Islam diharapkan menyebarkan pesan-pesan dan praktik Islam yang dapat mencerahkan kehidupan; cerah hati, pikiran, sikap, dan tindakan yang mulia. *Kedua*, dalam kehidupan sehari-hari masih dijumpai pemahaman dan pengamalan Islam yang menimbulkan masalah seperti

kekerasan, *takfiri*, penyebaran *hoax*, intoleransi, ujaran kebencian, dan permusuhan.¹⁵

Dalam Tanwir ini kemudian dirumuskan apa yang disebut sebagai "Risalah Pencerahan". Dalam Risalah Pencerahan tersebut dinyatakan:

Beragama yang mencerahkan mengembangkan pandangan, sikap, dan praktik keagamaan yang berwatak tengahan (*wasathiyah*), membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan laki-laki maupun perempuan, menjunjung tinggi keadaban mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia yang diwujudkan dalam sikap hidup amanah, adil, *ihsan*, toleran, kasih sayang terhadap umat manusia tanpa diskriminasi, menghormati kemajemukan, dan pranata sosial yang utama sebagai aktualisasi nilai dan misi rahmatan lil-'alamin."

Dengan gerakan pencerahan ini, Muhammadiyah menegaskan komitmennya bergerak di bidang dakwah dan *tajdid* untuk menghadirkan Islam sebagai ajaran Islam tengahan (*wasathiyah*), membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan laki-laki maupun perempuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjunjung tinggi akhlak mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia.

Sikap resmi Muhammadiyah yang menolak kekerasan ini tercermin dalam sikap para tokohnya dalam menyikapi perilaku kekerasan beberapa kelompok Islam dengan dalih *amar ma'ruf nahi munkar*. Bagi Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum Muhammadiyah, pemaknaan *nahi munkar* selama ini cenderung *misleading*, karena dimaknai sebagai tindakan merusak. Kalau *nahi* itu bermakna mencegah, maka ia harus hadir sebelum sesuatu itu terjadi. Jadi *nahi munkar* bukan menggrebek tempat hiburan malam ketika sudah dibangun, tapi yang perlu dilakukan adalah sebelumnya, yaitu ketika masih dalam tahap regulasi, bagaimana perda yang mengatur tempat hiburan tersebut.¹⁶

Menurut Saad Ibrahim, Ketua PWM Jawa Timur, *amar ma'ruf nahi munkar* tidak boleh dilaksanakan dengan paksaan, khususnya keyakinan beragama.¹⁷Sementara itu, Najib Hamid, menyebutkan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* tidak boleh dengan kekerasan.¹⁸Masyarakat tidak boleh melakukan penegakan hukum atas nama *amar ma'ruf nahi munkar*.

Bisa dikatakan bahwa semua informan menyatakan bahwa tidak boleh melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan kekerasan. Bahkan, beberapa informan menyatakan dengan tegas bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* ala Muhammadiyah adalah melalui karya nyata, seperti, mendirikan

¹⁵Haedar Nashir, "Beragama yang Mencerahkan dan Memajukan Muhammadiyah ke Depan" *Pidato Iftitah Tanwir Muhammadiyah Bengkulu* Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 215-17 Februari 2019.

¹⁶Wawancara Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum Muhammadiyah (13 Juni 2019).

¹⁷Saad Ibrahim, Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur (10 Mei 2019).

¹⁸Najib Hamid, Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur (13 Mei 2019).

rumah sakit, sekolah, universitas, panti asuhan, dll. Misalnya, tokoh Nasyyiatul Aisyiah, Yenik Kholifatul dan Aini Sukriah, menyebutkan bahwa di NA bentuk *amar ma'ruf*-nya adalah dengan lebih banyak peduli terhadap kelompok ibu-ibu, dan melindungi perempuan dengan edukasi-edukasi yang *ma'ruf*. Sama dengan lainnya, *amar ma'ruf nahi munkar* tidak boleh dengan kekerasan.¹⁹

Kiai Tafsir, Ketua PWM Jawa Tengah, menjelaskan tiga karakter dakwah Muhammadiyah. *Pertama*, karena sifatnya yang tengahan, maka dakwah Muhammadiyah itu pelan tapi pasti. *Kedua*, karakter dakwah Muhammadiyah adalah lembut alias non-konfrontatif, baik dengan pihak pemerintah maupun dengan berbagai kelompok. Muhammadiyah bisa merangkul dan bekerjasama dengan pihak manapun. *Ketiga*, pragmatis, dalam arti sedikit bicara banyak kerja.²⁰

Tokoh Muhammadiyah pada tingkat cabang dan ranting secara umum memiliki pandangan yang hampir sama. Arif Zuhri, misalnya, menyatakan bahwa aktivitas *amar ma'ruf nahi munkar* harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, yaitu dengan bijaksana dan tutur kata yang baik. Hal ini, kata dia, berlaku, baik bagi kalangan Muslim maupun non-Muslim. Jika harus melakukan kekerasan, itu baru dibolehkan sekedar untuk bertahan. Baginya, Islam melarang kekerasan. Dalam konteks ini pula, dia tidak setuju jika ada masyarakat sipil yang melakukan penegakan hukum atas nama *amar ma'ruf nahi munkar*, karena hal itu hanya akan melahirkan kekacauan yang lebih besar.²¹

Sekalipun demikian, ada juga tokoh Muhammadiyah yang menganggap bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* dengan menggunakan kekerasan ala FPI bisa dibenarkan, bahkan dalam konteks tertentu diperlukan. Khozin, misalnya, menyetujui masyarakat sipil melakukan penegakan hukum atas nama *amar ma'ruf nahi munkar*.

Misalnya dalam sebuah negara Pancasila yang dasarnya itu Ketuhanan Yang Maha Esa ... di mana penegakan hukum harus aparat hukum yang bertindak. Dan kalau kemudian aparat hukum itu tidak bertindak sesuai tugas dan wewenangnya, maka umat Islam menurut saya boleh melakukan tindakan kekerasan, kalau aparat hukum pemerintah tidak bertindak. Dan hal ini tidak bisa dibiarkan, bagaimana kita akan membiarkan kezaliman. Karena itu dalam hal tertentu penting ada FPI, jangan dikira tidak penting, karena Muhammadiyah tidak bertindak dan NU juga tidak bertindak, maka keberadaan FPI itu penting, untuk melakukan penegakan terhadap pelanggar hukum, misalnya, minuman keras dan lain sebagainya. Tapi tidak selalu yang dilakukan oleh FPI itu benar, dalam konteks melakukan kekerasan, dan itu harus selektif.²²

¹⁹Yenik Kholifatul, Ketua Nasyyiatul Aisyiah (NA) Kabupaten Malang (6 Mei 2019) dan Aini Sukriah, Ketua Umum PW Nasyyiatul Aisyiah Jawa Timur, (6 Mei 2019).

²⁰Wawancara Tafsir, Ketua PWM Jawa Tengah (18 Mei 2019).

²¹Arif Zuhri, Ketua PCM Dau Malang (8 Mei 2019).

²²KH.Khozin, Saudaranya Amrozi (7 Mei 2019).

Jika membaca pandangan aktivis Muhammadiyah, secara umum punya pandangan yang hampir serupa, bahwa *amar ma'ruf nahi munkar*, harus dijalankan secara damai dan berada dalam kerangka hukum yang berlaku.

2. Darul Ahdi wa al-Syahadah: Peneguhan NKRI dan Pancasila

Salah satu kontekstualisasi terpenting dari gagasan fundamental Islam Berkemajuan yang diupayakan Muhammadiyah adalah konsep *Dār al-'Ahd wa al-Shahādah*. Artinya, Indonesia yang berdasarkan Pancasila dipandang sebagai negara perjanjian (*dār al-'ahd*) dan persaksian (*al-shahādah*). Hal itu bertujuan untuk memberikan pedoman bagi para warga Muhammadiyah mengenai hubungan negara dan persyarikatan, sebagai fondasi pertahanan ideologis, sebagai alat harmonisasi politik, dan manifestasi intelektual dan politik yang menekankan pentingnya nasionalisme kebangsaan.

Menurut dokumen resmi Muhammadiyah, negara Pancasila disebut sebagai *dār al-'ahd* (negara perjanjian atau negara kesepakatan),²³ karena saat didirikan pada 1945, dasar-dasarnya dihasilkan dari sebuah konsensus nasional.²⁴ Penambahan *dār al-shahādah* (negara persaksian) bermakna bahwa implementasi mengenai (nilai-nilai luhur) Pancasila memerlukan peran aktif Muhammadiyah. Muhammadiyah menyaksikan dirinya sebagai bagian dari Indonesia dan menjadi Indonesia itu sendiri (Muhammadiyah adalah Indonesia).²⁵

Pancasila diformulasikan melalui konsensus oleh para tokoh bangsa, termasuk tokoh-tokoh Muhammadiyah, yang membawa aspirasi kaum Muslim. Mereka memahami bahwa Pancasila selaras dan berjalan beriringan dengan ajaran-ajaran Islam.²⁶ Ketika Indonesia secara ideal mengidamkan menjadi negara yang aman, tentram dan damai (yang dalam bahasa Arab lazim dipahami sebagai *dār al-salām*), maju, adil, sejahtera, bermartabat dan berdaulat, sebenarnya ini selaras dengan tujuan Islam. Inilah yang

²³*Dār al-'ahd* secara literal bermakna tanah kesepakatan atau perjanjian. Hal itu dikonseptualisasi oleh al-Shafi'i untuk menengahi teritori antara *dar al-Islam* dan *dar al-harb*. Lihat Halil İnalcık, "Dār al-'Ahd," dalam P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs (eds.), *Encyclopaedia of Islam*, Second Edition, Diakses 6 Juli 2019).

²⁴ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015), 12.

²⁵ Lihat Din Syamsuddin, "Tafsir Islam atas Negara Pancasila," dalam Muamaroh dan Benni Setiawan (eds.), *Negara Pancasila, Darul 'Ahd Wasy-Syahadah: Perspektif Teologis dan Ideologis*, (Yogyakarta: Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2017), 161-162.

²⁶ Haedar Nashir, "Muhammadiyah Membangun Integrasi Keislaman dan Kebangsaan Menuju Indonesia Berkemajuan," dalam Faozan Amar dkk. (eds.), *Darul-Ahdi Wasy-Syahadah: Konteks, Makna dan Aktualisasi untuk Indonesia Berkemajuan* (Jakarta: Al-Wasat Publishing House, 2018), 23; Din Syamsuddin, "NKRI: Negara Perjanjian dan Kesaksian," dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (eds.), *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Konsep Historis* (Bandung: Mizan, 2015), 282; Lukman Hakiem (ed.), *Dari Muhammadiyah untuk Indonesia: Pemikiran dan Kiprah Ki Bagus Hadikusumo, Mr Kasman Singodimedjo, dan KH Abdul Kahar Mudzakkir* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013).

dikenal dengan “*baldatun ṭayyibatun wa rabbun ghafūr*” (negara yang adil, makmur dan sejahtera, yang berada di bawah naungan rahmat dan ampunan Tuhan).²⁷

Menurut Din Syamsuddin, pemikiran dikotomis yang membagi dunia menjadi *dār al-Islām* (negara Islam) dan *dār al-ḥarb* (negara perang) sudah tidak lagi relevan di hadapan konteks globalisasi modern.²⁸ Alasannya adalah Indonesia juga merupakan bagian dari sistem internasional negara bangsa, karenanya secara moral dan politis mesti menghormati realitas keberagaman yang global. Sebagai konsekuensinya, ia menekankan bahwa Indonesia terikat dengan pelbagai kesepakatan atau perjanjian internasional pada level yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan posisi Muhammadiyah yang juga terikat dengan kesepakatan nasional yang memiliki otoritas yang lebih tinggi pula.²⁹

Jika era 1980-an sempat menyoal Asas Tunggal Pancasila, saat ini Muhammadiyah menegaskan wawasan kebangsaannya seperti dalam Tanfidz Muktamar Seabad sebagaimana kutipan berikut:

Muhammadiyah dan umat Islam merupakan bagian integral dari bangsa dan telah berkiprah dalam membangun Indonesia sejak pergerakan kebangkitan nasional hingga era kemerdekaan. Muhammadiyah terlibat aktif dalam peletakan dan penentuan fondasi negara-bangsa yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Muhammadiyah berkontribusi dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara politik Islam yang berwawasan kebangsaan di tengah pertarungan berbagai ideologi dunia. Sejak awal Muhammadiyah memiliki wawasan kebangsaan yang jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan konsensus nasional yang final dan mengikat seluruh komponen bangsa dengan menjadikan Muhammadiyah sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sesuai dengan ayat al-Qur’an Surat al-Hujurat ayat 13. (Tanfidz Muktamar Seabad 2010: 17).

Nasionalisme bukanlah doktrin mati sebatas slogan cinta tanah air tetapi harus dimaknai dan difungsikan sebagai energi positif untuk membangun Indonesia secara dinamis dan transformatif dalam mewujudkan cita-cita nasional di tengah badai masalah dan tantangan zaman. (Tanfidz Muktamar Seabad 2010: 18).

Tanwir di Bandar Lampung tahun 2009 merumuskan konsep “Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa: Agenda Indonesia Ke Depan”.³⁰ Muhammadiyah memandang bahwa perumusan konsep visi dan karakter

²⁷ Haedar Nashir, “Muhammadiyah Membangun Integrasi Keislaman dan Kebangsaan Menuju Indonesia Berkemajuan,” 20-21.

²⁸ Syamsuddin, “Tafsir Islam atas Negara Pancasila,” 161.

²⁹ Ibid.

³⁰ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa: Agenda Indonesia Ke Depan*, Cetakan kelima Edisi Muktamar Ke-47 (Yogyakarta: PPM, 2015).

bangsa merupakan agenda penting dan strategis untuk melihat dan memproyeksikan masa depan Indonesia. Muhammadiyah berpandangan bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki potensi dan peluang untuk menjadi bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat di hadapan bangsa-bangsa lain.

Di sini Muhammadiyah menyoroti realitas kebangsaan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Muhammadiyah menawarkan empat karakter bangsa yang salah satunya adalah moderat, yang dicirikan dengan sikap hidup yang tidak radikal dan tercermin dalam kepribadian yang tengahan antara individu dan sosial, berorientasi materi dan ruhani, serta mampu hidup dan kerjasama dalam kemajemukan.³¹

Dokumen Tanwir 2009 tersebut kemudian direvitalisasi pada Tanwir Muhammadiyah di Bandung (2013), di mana Muhammadiyah merumuskan konsep "Indonesia Berkemajuan: Rekonstruksi Kehidupan Bernegara yang Bermakna". Muhammadiyah menegaskan bahwa medan jihad (wilayah perjuangan) gerakannya ada pada tiga ranah: politik, budaya dan ekonomi yang dikemas dalam sebuah konsep "Indonesia Berkemajuan".

Indonesia Berkemajuan dapat dimaknai sebagai negara utama (*al-madinal al-fadhillah*), negara berkemakmuran dan berkeadaban (*umran*), dan negara yang sejahtera. Negara berkemajuan adalah negara yang mendorong terciptanya fungsi kerisalahan dan kerahmatan yang didukung sumber daya manusia yang cerdas, berkepribadian, dan berkeadaban mulia. Karena itu, negara berkemajuan harus mampu menegakkan kedaulatan (wilayah, politik, hukum, ekonomi, dan budaya); mendatangkan kemakmuran (terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan); mewujudkan kebahagiaan material dan spiritual; menjamin kebebasan berpikir, berekspresi, dan beragama; menghormati hak asasi manusia dan menciptakan keamanan dan jaminan masa depan."³²

Pada Muktamar ke-47 di Makassar tahun 2015, Muhammadiyah secara resmi menegaskan posisi Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wasy-Syahadah* (Negara Perjanjian dan Kesaksian). Dalam dokumen resmi dinyatakan:

Negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional (*dar al-'ahdi*) dan tempat pembuktian atau kesaksian (*dar al-syahadah*) untuk menjadi negeri yang aman dan damai (*dar al-salam*) menuju kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridla Allah SWT. Pandangan kebangsaan tersebut sejalan dengan cita-cita Islam tentang negara idaman "*Baladatun Thayyibatan Wa Rabbun Ghafur*", yaitu suatu negeri yang baik dan

³¹*Ibid*, 42.

³² Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Indonesia Berkemajuan: Rekonstruksi Kehidupan Bernegara yang Bermakna, Cetakan Ketiga Edisi Muktamar Ke-47 (Yogyakarta: PPM, 2015), 11.

berada dalam ampunan Allah.Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia adalah ideologi negara yang mengikat seluruh rakyat dan komponen bangsa. Pancasila bukan agama, tetapi substansinya mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam, yang menjadi rujukan ideologis dalam kehidupan kebangsaan yang majemuk. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pancasila itu Islami karena substansi pada setiap silanya selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Segenap umat Islam termasuk di dalamnya Muhammadiyah harus berkomitmen menjadikan Negara Pancasila sebagai *Dar al-Syhadah* atau negara tempat bersaksi dan membuktikan diri dalam mengisi dan membangun kehidupan kebangsaan yang bermakna menuju kemajuan di segala bidang kehidupan." (h. 12-13).

Apakah kebijakan resmi Muhammadiyah ini diinternalisasi oleh para kadernya? Pertanyaan ini penting untuk dijawab karena jawaban atas hal ini akan menunjukkan seberapa jauh kebijakan-kebijakan Muhammadiyah berfungsi sebagai pemandu bagi warganya. Untuk menjawab ini, kami mendalami dua isu penting: Pancasila dan implementasi syariat Islam.

Secara umum, para aktivis Muhammadiyah berpandangan bahwa Pancasila merupakan suatu kesepakatan bersama di antara para pendiri negara yang di antaranya terdapat wakil-wakil golongan Islam saat itu. Para aktivis Muhammadiyah beranggapan bahwa Pancasila sudah cukup memuat nilai-nilai Islam secara fundamental, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan Pancasila bersifat final sebagai ideologi negara. Formalisasi syariat Islam dengan mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipandang sebagai hal yang tidak dibenarkan.

Muhammadiyah, melalui Ketua Umumnya, Haedar Nashir, menegaskan posisi pemikirannya tentang Negara Pancasila. Dalam sebuah media resmi *Suara Muhammadiyah*, Haedar menyatakan:

Muhammadiyah termasuk para warganya, tidak bersetuju dan tidak memberi ruang untuk adanya ideologi, pemikiran, sikap, dan pandangan yang ingin mewujudkan bentuk dan ideologi lainnya yang bertentangan dengan pandangan Negara Pancasila Darul Ahdi Wa Syhadah. Ideologi atau pandangan tentang negara khilafah sebagaimana halnya untuk negara komunis, negara sekuler, dan lainnya yang bertentangan dengan prinsip Negara Pancasila Darul Ahdi Was-Syhadah tertolak di dalam Muhammadiyah."³³

Dalam memandang relasi Islam dan negara, Muhammadiyah mengambil posisi tengah (moderat). Berdasarkan wawancara dengan Kiai Tafsir, Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah, setidaknya terdapat tiga paham tentang hubungan Islam dan negara, dan itu menjadi wacana yang tidak akan berhenti. Ada yang mengatakan menegakkan Islam berarti

³³<http://www.suaramuhammadiyah.id/2019/04/02/muhammadiyah-berpahaman-negara-pancasila-darul-ahdi-was-syhadah/>

mendirikan negara Islam, ada yang mengatakan menegakkan Islam itu dengan menerapkan syariat Islam di negara dan ada yang mengatakan bahwa Islam harus terpisah dari agama. Sebagai bagian dari upaya mendudukkan Muhammadiyah di posisi tengahan, maka Pancasila menurut Muhammadiyah ialah sebagai ideologi yang paling moderat.³⁴

Berdasarkan keterangan Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, bagi Muhammadiyah implementasi penerapan syariat Islam secara formal untuk menggantikan hukum yang ada, dinilai tidak perlu. Penerapan syariat Islam saat ini cenderung dimaknai kelompok radikal hanya menyangkut *jinayat*, aspek pidana. Pemaknaan ini akan menafikan aspek lain dari syariat. Substansi dari syariat itu sebenarnya keselamatan, kemaslahatan dan kesejahteraan. Ketika hanya dimaknai *jinayat*, maka akan menjadi persoalan bagi bangsa Indonesia yang majemuk.

Kita di Indonesia sudah sepakat, karena kita masyarakat majemuk, maka yang diperjuangkan adalah substansi Syariat, di mana nilai dalam Islam terlembaga dalam produk undang-undang yang berlaku dan terlembaga dalam perilaku sosial masyarakat. Jadi jangan dimaknai bahwa mematuhi rambu-rambu lalu lintas bukan bagian dari Syariat, itu bagian dari *hablum min an-nash*. Demikian pula tentang haji, maka kemudian ada undang-undang haji. Jadi jangan dimaknai bahwa zaman Nabi tidak ada undang-undang dan tidak perlu undang-undang haji, maka tidak perlu. Ini menyangkut hajat banyak orang, relasi antarnegara. Karena itu, dibuatlah undang-undang yang diambil dari ketentuan agama terkait haji.³⁵

Di tingkat PDM, mayoritas pendapat masih cenderung serupa dengan kebijakan organisasi. Khozin menegaskan kebolehan perjuangan penyelarasan Islam dan negara, namun harus relevan dan dalam bingkai Pancasila. Perjuangan formalisasi syariat sebagai dasar negara, menurutnya, hanya akan mencabik-cabik Indonesia. Menurut Khozin, untuk apa negara Islam jika tidak menjamin ketenangan hidup. Yang dibutuhkan adalah moderasi, sebagaimana konsep Muhammadiyah.³⁶

Sukmajayaberpendapat bahwa Indonesia saat ini seperti Madinah zaman Nabi. Menurutnya, Pancasila sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai universal Islam.

Karena yang menggali adalah umat Islam dan tidak main-main. Apalagi kalau *item per item* Pancasila itu kita lihat. Sila pertama itu ketuhanan, artinya kita adalah negara yang mengenal Tuhan. Sila kedua kemanusiaan, sila ketiga *ukhuwah*, persatuan, sila keempat kebijaksanaan dan sila kelima keadilan. Itu hampir sama dengan nilai-nilai universal dalam al-Quran. Kalau kita gali nilai-nilai universal al-Quran

³⁴ Wawancara Tafsir, Ketua PWM Jawa Tengah (Sabtu, 18 Mei 2019).

³⁵ Wawancara Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum Muhammadiyah (13 Juni 2019).

³⁶ Wawancara KH. Khozin, Saudaranya Amrozi (7 Mei 2019).

yaitu keadilan, kemanusiaan, kebersamaan dan kesetaraan, itu sama. Artinya Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Cuma sayang, saudara kita yang baru datang itu kadang tidak tahu sejarah, dianggapnya Pancasila itu *thaghut* dan lain sebagainya.”³⁷

Di tingkat cabang dan ranting Muhammadiyah, sebuah pendapat tegas datang dari Arif Zuhri. Menurutnya, Pancasila tidak bertentangan dan justru malah membantu penguatan nilai-nilai Islam di Indonesia. Pun demikian dengan hukum Islam, tidak berbenturan dengan hukum negara dengan adanya teori “penjenjangan norma” yang mengutamakan pembacaan hukum Islam secara substansial. Kalaupun formalisasi berlangsung lewat Peraturan Daerah (Perda) Syariat Islam, misalnya, ia berpendapat bahwa Perda tersebut harus melihat kemajemukan komunitas.³⁸

Mukayat dari PWPM (Pengurus Wilayah Pemuda Muhammadiyah) Jawa Timur menegaskan keselarasan Islam dan Indonesia. Pun dengan Pancasila, yang menurutnya juga sangat serupa dengan rumusan Islam. Menurutnya:

Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu tauhid. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu juga sejalan dengan al-Quran bahwa kita harus menghormati, menyayangi, tidak boleh membunuh. Keadilan dan permusyawaratan juga demikian. Menurut saya, Pancasila digali dari banyak keyakinan. Tidak hanya Islam, tetapi juga Hindu, Buddha. Konsep Pancasila itu sudah ada jauh sebelum Islam itu ada di sini. Di agama Hindu dan Buddha juga tidak diperbolehkan membunuh, minum minuman keras, memperkosa serta selingkuh. Pancasila dan Islam sudah final.³⁹

Formalisasi syariat yang bermaksud mengganti dasar negara menurut Mukayat berbahaya karena bisa memicu terjadinya perang. Formalisasi syariat di level perundang-undangan disetujui olehnya selama bersifat sinergis dengan agama dan kelompok lain, tidak melukai perasaan dan mengkerdulkan kelompok lain.

Abdul Musawir dari DPP IMM mengingatkan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan persetujuan umat Islam yang harus diikuti, dan ketaatan pada hukum negara merupakan ketaatan kepada hukum Islam. Dengan itu, ia menyatakan ketidaksetujuannya dengan upaya untuk mengubah dasar negara. Implementasi syariat, menurutnya, harus berlangsung dalam bentuk nilai dan spiritnya, sedangkan bentuknya bisa bersifat fleksibel.⁴⁰

Senada dengan Abdul Musawir, Irsyad Majid dari PC IMM Malang menegaskan bahwa Pancasila pekat dengan nilai-nilai Islam. Menjalankan

³⁷Wawancara Sukmajaya, Dai Senior Muhammadiyah Malang Raya (10 Mei 2019).

³⁸Wawancara Arif Zuhri, Ketua PCM Dau Malang (8 Mei 2019).

³⁹Wawancara Mukayat, Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur (14 Mei 2019)

⁴⁰Wawancara Abdul Musawir, Kabid Keilmuan DPP IMM (6 Mei 2019).

Pancasila, menurutnya, berarti menjalankan Islam dalam *basic values*. Dalam implementasi syariat, Irsyad Majid merujuk pada sejumlah pemerintahan Islam awal yang proporsional dalam menerapkan hukum Islam, sehingga ada pula hukum yang tidak diberlakukan sesuai keadaan. Dengan demikian, menurutnya, tidak ada pertentangan antara hukum Islam dan perundang-undangan nasional.⁴¹

Yenik Kholifatul, aktivis Nasyyatul Aisyiah melihat kesesuaian Islam dan Pancasila jika dilihat dari visi humanis keduanya. Ia menolak upaya perubahan dasar negara, namun ia optimis Islam bisa memperbaiki hukum negara yang dianggapnya masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ia menolak pendirian negara Islam namun setuju bila syariat Islam diambil sebagai hukum nasional yang sudah disesuaikan dengan pemikiran keindonesiaan.⁴² Aini Sukriah juga menyatakan persetujuannya secara penuh pada Muhammadiyah yang melihat Indonesia sebagai *Dar al-Ahd wa al-Syahadah*. Ia melihat Pancasila selaras dengan Islam. Ia menganggap instrumen hukum hanya sebagai instrumen teknis yang sesungguhnya tidak perlu diperjuangkan agar berlabel syariah bila pada akhirnya akan memicu pertikaian.⁴³

Secara umum, keseluruhan argumentasi yang diambil dari berbagai representasi kalangan di tubuh Muhammadiyah menunjukkan adanya kesamaan pandangan tentang finalitas Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Ada kecenderungan umum untuk melihat bolehnya implementasi syariat dalam peraturan perundang-undangan sepanjang mekanismenya konstitusional, diterapkan dengan tanpa mengerdilkan minoritas, dan tidak menganggapnya sebagai suatu perjuangan yang bersifat wajib.

3. Sosialisasi Pancasila sebagai Dar al-Ahd wa al-Syahadah

Untuk mengkonsolidasi ideologinya, Muhammadiyah sangat gencar melakukan sosialisasi ke bawah. Untuk memperkuat langkah ini, Muhammadiyah dan Kementerian bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), menjalin kerjasama dalam bentuk Sosialisasi Pancasila sebagai *Darul 'Ahd wa Syahadah*. Kerjasama ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir dan Menteri Koordinator PMK Puan Maharani. Kerjasama ini merupakan bentuk gotong-royong bersama organisasi Islam di Indonesia untuk mensukseskan revolusi mental (24/11/2017).⁴⁴

Hasil kerja sama ini melahirkan dua buku penting. Pertama, *Darul-Ahd Wasy-Syahadah: Konteks, Makna dan Aktualisasi untuk Indonesia Berkemajuan*. Dalam buku itu Haedar Nashir memberi prolog "Muhammadiyah Membangun Integrasi Keislaman dan Kebangsaan Menuju

⁴¹Wawancara Irsyad Madjid, PC IMM Malang Raya (7 Mei 2019).

⁴²Wawancara Yenik Kholifatul, Ketua Nasyyatul Aisyiah (NA) Kabupaten Malang (6 Mei 2019).

⁴³Wawancara Aini Sukriah, Ketua Nasyyatul Aisyiah (NA) Jawa Timur (6 Mei 2019).

⁴⁴<https://damailahindonesiaku.com/menko-pmk-dan-muhammadiyah-implementasikan-revolusi-mental.html>

Indonesia Berkemajuan". Kedua, buku Khutbah Jum'at tentang Darul Ahdi wasy-Syahadah. Buku ini kemudian dibagikan waktu kegiatan sosialisasi dan konsolidasi dalam bentuk seminar-seminar, workshop, pelatihan dll.⁴⁵

Pada saat penelitian ini berlangsung, peneliti sempat melakukan observasi di beberapa tempat. Pada hari Sabtu (3/5) di Hotel Front One Bandara Solo dilaksanakan "Sosialisasi Pancasila sebagai Darul 'Ahdi WaSyahadah bagi Aktivitas Perempuan Muhammadiyah". Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah pembicara seperti Shoimah Kastolani (Ketua PP Aisyiyah), Abu Nasir (Kemenko PMK), Wakhidatul Muflikha dan Zuhriyatun Nurohmah (Nasyiatul 'Aisyiyah).

Dalam materinya, Shoimah mengatakan bahwa di tubuh 'Aisyiyah dan Nasyiatul 'Aisyiyah, Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, telah dipraktikkan dalam kehidupan setiap hari. Praktik kehidupan ber-Pancasila tersebut antara lain dilakukan dengan mendirikan lembaga pendidikan dan kesehatan untuk semua rakyat tanpa melihat suku, agama, ras dan golongannya.⁴⁶

Berdasarkan keterangan Faozan Amar (Koordinator Program) ini, selain dengan Nasyiatul Aisyiyah, kegiatan sosialisasi juga dilakukan dengan Organisasi Otonom, Majelis dan Lembaga Muhammadiyah lainnya di daerah yang berbeda di Indonesia seperti: Majelis Dikdasmen (Pendidikan Dasar dan Menengah), LDK (Lembaga Dakwah Khusus), Majelis Tabligh, MPS (Majelis Pelayanan Sosial), MPI (Majelis Pustaka Informasi), LSB (Lembaga Seni Budaya dan Olahraga), Aisyiyah, IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) serta Pondok Hajjah Nuriyah Shabran Universitas Muhammadiyah Surakarta.

4. Pengajian

Pengajian rutin menjadi bagian dari sarana Muhammadiyah menguatkan ideologi Islam moderat. Misalnya, pada saat penelitian ini dilakukan, sedang gencar dilaksanakan Pengajian Ramadan. Pada level nasional, pengajian ini diadakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan mengangkat tema-tema tertentu. Pengajian ini sering disebut mirip "Tanwir", sebuah permusyawaratan Muhammadiyah tingkat nasional di bawah Muktamar. Tak jarang pengajian ini menghasilkan pemikiran-pemikiran yang kemudian dilembagakan menjadi keputusan resmi organisasi.

Dalam riset ini, peneliti berhasil melakukan observasi pada dua "Pengajian Ramadan". *Pertama*, Pengajian Ramadan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada saat observasi, pengajian dilaksanakan di Aula Seminar Masjid Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dimulai sejak Kamis-Sabtu, 9-11 Mei 2019 M. Tema "Risalah Pencerahan dalam Kehidupan Keumatan dan Kebangsaan: Tinjauan Teologis, Ideologis, dan Praksis". Peserta pengajian ini terdiri dari anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis/Lembaga/Biro

⁴⁵<https://www.gatra.com/detail/news/433113/lifestyle/daws-agar-jadi-rujukan-dai-muhammadiyah-berdakwah>

⁴⁶ Observasi Lapangan "Sosialisasi Pancasila sebagai Darul 'Ahdi Wasy Syahadah bagi Aktivitas Perempuan Muhammadiyah", Sabtu (3/5) di Hotel Front One Bandara Solo.

PPM, anggota Pimpinan Pusat Aisyiyah, Ketua & Sekretaris Organisasi Otonom tingkat Pusat, Ketua dan Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se-Indonesia, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah se-Indonesia, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-DIY-Jateng dan sekitarnya, Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah/'Aisyiyah, Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah/Aisyiyah, dan Majelis Pendidikan Kader PWM Se-Indonesia.⁴⁷

Kedua, Pengajian Ramadhan PW Muhammadiyah. Pengajian ini dilaksanakan setiap tahun. Dalam penelitian ini berhasil mengobservasi pengajian di PW Muhammadiyah Jawa Tengah yang bertempat di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Sabtu, 18 Mei 2019. Pengajian mengangkat tema "Dakwah Beragama yang Mencerahkan" ini meneruskan tema Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu yang baru saja terlaksana 2019. Acara yang dimulai sejak pukul 07.30-18.00 WIB tersebut dibagi menjadi dua sesi panel pengajian. Panel pertama mencakup dua tema pembahasan, yaitu; (1) Paham Agama dan Implementasinya dalam Kultur Keagamaan Muhammadiyah oleh Dr. H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, M.Ag. dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, (2) Implementasi Ideologi Gerakan Muhammadiyah di Tengah Heterogenitas Umat dan Kehidupan Kebangsaan oleh Prof. Dr. KH. Yusuf Suyono sebagai Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Pada Panel kedua terdapat satu tema pembahasan, namun disampaikan oleh dua narasumber. Tema tersebut ialah "Dakwah dan Beragama yang mencerahkan" oleh Drs. Marpuji Ali dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Drs. Tafsir, M.Ag. Sebagai Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.⁴⁸

Selain pengajian Ramadhan yang rutin setiap tahun, Pengajian Ahad Pagi juga telah menjadi tradisi dalam Muhammadiyah. Pengajian ini sebagai wadah bagi warga Muhammadiyah untuk berkumpul dan sebagai wahana penguatan ideologi dan sosialisasi kebijakan organisasi. Pengajian ini bersifat umum dengan tema umum. Kami mengobservasi Pengajian Rutin Ahad Pagi yang merupakan program unggulan Majelis Tabligh Muhammadiyah Cabang Blimbing, Kabupaten Sukoharjo.⁴⁹ Menurut salah satu narasumber, pengajian ini merupakan pengajian paling aktif dan terbesar jamaahnya. Pengajian ini diadakan atas desakan dan masukan dari ranting-ranting. Pelaksanaan pengajian ini bekerja sama dengan semua organisasi otonom Muhammadiyah, mulai dari 'Aisyiyah, KOKAM, dan Pemuda Muhammadiyah. Jama'ah terdiri dari delegasi Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan 'Aisyiyah se-Cabang Blimbing serta masyarakat umum dan simpatisan Muhammadiyah di Kecamatan Polokarto dan sekitarnya. Jumlah jama'ah yang hadir mencapai 2000-3000 orang, bahkan dalam

⁴⁷ Observasi Pengajian Ramadan PP Muhammadiyah (Kamis-Sabtu, 9-11 Mei 2019).

⁴⁸ Observasi Pengajian Ramadan Pimpinan Wilayah Jawa Tengah se-Soloraya (Sabtu, 18 Mei 2019).

⁴⁹ Observasi dilakukan pada Ahad, 19 Mei 2019 dengan Informan Andika (Sekretaris Majelis Tabligh PCM Blimbing di Masjid Pondok Pesantren Muhammadiyah Imam Syuhodo Blimbing, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo).

event tertentu dapat mencapai 8000-10.000 orang. Pengajian Ahad Pagi ini diharuskan bagi pimpinan cabang/ranting serta guru sekolah/madrasah Muhammadiyah yang ada di wilayah cabang Blimbing. Bagi pimpinan dan guru wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia.

Menurut Yenik Kholifatul di tingkat daerah, Nasyyatul Aisyiah (NA) memiliki program penanggulangan radikalisme, meskipun tidak terstruktur. Selama ini, program yang dilakukan menyisipkan nilai-nilai melalui pelbagai kajian dakwah yang ada dicabang, walaupun tidak menyeluruh dan mendalam.⁵⁰

5. Pembinaan Ideologi: Pimpinan, Organisasi Otonom dan Amal Usaha

Ada beberapa pelatihan yang harus diikuti kader Muhammadiyah, salah satunya adalah Baitul Arqom (BA) Muhammadiyah. Ini adalah salah satu pelatihan untuk membina para pemimpin Muhammadiyah, karena di sana berlangsung ideologisasi ke-Muhammadiyah-an. Baitul Arqom adalah suatu bentuk pembinaan di Muhammadiyah yang berorientasi pada pembinaan ideologi keislaman dan kepemimpinan. Setiap warga Muhammadiyah yang berkiprah di Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) harus mengikuti Baitul Arqom terlebih dahulu.

Di samping BA, ada juga *Dar al-Arqom* (DA). DA memiliki tingkatan lebih tinggi. DA adalah kaderisasi satu minggu penuh.

Pentingnya pelatihan/kaderisasi di tubuh Muhammadiyah sebagai upaya menanggulangi radikalisme diungkap oleh Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah, Fatah Santoso. Ia menyatakan bahwa banyak warga Muhammadiyah yang kurang toleran dengan kelompok lain, bahkan sesama warga sendiri, dikarenakan kurangnya wawasan dan sempitnya pengetahuan. Hal ini bisa ditanggulangi salah satunya melalui Baitul Arqom.

Ia menyatakan:

"BA (Baitul Arqom red.) itu, menurut saya, harus luas pandangannya dan luas ilmunya. Dan luasnya pandangan itu tidak terjadi jika ilmu kita itu-itu aja. Jadi juga harus ada penambahan pengetahuan. Jika melalui pengajian kan terlalu umum ya, jadi bisa melalui forum-forum diskusi di Baitul Arqom itu.... yang paling efektif ya melalui Baitul Arqom."⁵¹

Baitul Arqom dilaksanakan untuk membentengi AUM dari infiltrasi kelompok-kelompok radikal. Masalah ini secara terbuka dinyatakan oleh Ketua PWM Jawa Timur, Saad Ibrahim. Menurutnya, seluruh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) harus diurus oleh Muhammadiyah sendiri agar AUM tidak menjadi sarang penyebaran ideologi radikal. AUM harus dijaga dengan baik, terutama dari infiltrasi pelbagai pihak luar, termasuk Islam radikal. Itulah salah satu cara menjaga Muhammadiyah dan sekaligus

⁵⁰Wawancara Yenik Kholifatul, Ketua Nasyyatul Aisyiyah (NA) Kabupaten Malang (6 Mei 2019).

⁵¹Wawancara M. Abdul Fatah Santoso, Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah (22 Mei 2019).

menghadang laju radikalisme keagamaan yang ada. Bagi Saad, Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang memiliki ideologi tersendiri dan memiliki *khittah* yang jelas (moderat, inklusif, dan toleran).⁵²

Upaya menjaga AUM, terutama di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), bisa dilihat pada cara-cara yang Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dalam memoderasi tenaga dosen dan tenaga kependidikannya. Sebagaimana yang dinyatakan Syamsul Arifin selaku penanggung jawab bidang akademik di UMM, dalam menangkal radikalisme keagamaan, Muhammadiyah mengupayakan pelbagai tindakan preventif dari infiltrasi ideologi-ideologi dari luar, khususnya Islam radikal. Di lingkungan UMM, misalnya, berlaku kebijakan bahwa seluruh dosen UMM (terutama dosen AIK) harus berideologi Muhammadiyah.

Secara lebih jauh, Syamsul menjelaskan upaya preventif yang dilakukan UMM. Menurutnya,

Tentu upaya preventifnya berlapis-lapis. Dalam rekrutmen, kalau itu dosen, bidang terpenting adalah kemampuan akademik. Tapi karena ini Muhammadiyah, mereka harus punya militansi Muhammadiyah. Lalu perlu ada pembinaan secara intensif, misalnya pra-jabatan, dalam jabatan, pengajian, konsolidasi, yang itu dilakukan secara terus-menerus. Sehingga jangan ada dosen dan tenaga pendidik yang menggunakan *frame* lain....⁵³

Di Surakarta, pelaksanaan Baitul Arqam berjalan dengan baik. Peneliti sempat observasi BA dengan tema *Refresing Ideologi* yang saat itu dihadiri oleh Prof. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag (Ketua PP Muhammadiyah). Menurut Suyanto (Sekretaris MPK PDM Solo), persoalan ideologi Muhammadiyah di Solo dianggap sudah selesai, karena sentralitas dan otoritas keagamaan Kiai Subari yang mumpuni sebagai Ketua PDM. Di AUM juga tidak ada masalah karena penguatan ideologinya kuat melalui kegiatan Baitul Arqom.⁵⁴

Di tingkatan organisasi otonom Muhammadiyah juga seringkali menyelenggarakan kegiatan kaderisasi. Para aktivis IPM, menurut Maharina Novia, menangkal radikalisme melalui program-program kaderisasi. Materi yang paling utama dalam program tersebut adalah penguatan ideologi. Ia mencontohkan bahwa, hal tersebut diimplementasikan pada kaderisasi Taruna Melati 1-4. Ia menjelaskan bahwa dari tingkatan pusat hingga akar rumput, IPM menekankan pentingnya kesadaran ilmiah yang kritis dan transformatif. Dengan cara ini mereka berharap bisa menangkal ideologi radikal yang bersifat destruktif dan tetap kuat memegang Islam *wastahiyah*.⁵⁵

Di lingkungan NA, Aini Sukriah menyatakan bahwa tidak ada program khusus untuk menangkal Islam radikal, tapi program kaderisasi (*Dar al-Arqom*) digunakan untuk menguatkan pemahaman keislaman Muhammadiyah

⁵²Wawancara Saad Ibrahim, Ketua PWM Jawa Timur (10 Mei 2019).

⁵³Syamsul Arifin, Ahli Sosiologi Agama UMM Malang (7 Mei 2019).

⁵⁴ Wawancara Suyanto, Ketua Pemuda Muhammadiyah Surakarta (15 Mei 2015)

⁵⁵Wawancara Maharina Novia, Ketua PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) (6 Mei 2019).

yang moderat kepada para kader. Hal yang demikian, menurutnya, adalah upaya preventif melindungi ideologi para kader Muhammadiyah.⁵⁶

Hal yang sama juga dilakukan di lingkungan mahasiswa Muhammadiyah. Irsyad Majid menjelaskan bahwa menangkal Islam radikal dilakukan melalui program-program kaderisasi IMM. Materi yang paling penting dalam kaderisasi adalah Islam moderat (*wasathiyah*) yang menekankan pentingnya toleransi dan kebebasan beragama. Kaderisasi yang memuat pelbagai materi penting ini juga dilakukan hingga di tingkat komisariat-komisariat (fakultas), sehingga penyebarannya sedemikian massif.⁵⁷

Di sayap organisasi kepemudaan Muhammadiyah, Mukayat menjelaskan bahwa militansi kader mampu meredam segala tantangan ideologis yang datang dari luar. Yang memungkinkan adanya militansi kader adalah proses perkaderan yang berlapis-lapis dari tingkat pertama yakni Bait al-Arjom hingga tingkat paripurna. Ia memastikan bahwa, dengan demikian, tidak ada kader inti Muhammadiyah yang terpapar ideologi radikal apalagi terorisme.⁵⁸

6. Gerakan Kultural

Untuk mendukung dan terus mendiseminasikan gagasan pluralisme dan multikulturalisme, Muhammadiyah pada 2002 di Bali, mulai memperkenalkan konsep "Dakwah Kultural". Setelah melalui berbagai diskusi, akhirnya Muktamar 2005 di Malang menerima secara bulat "Dakwah Kultural" sebagai keputusan resmi organisasi. Dakwah Kultural pada hakikatnya adalah seruan universalitas Islam untuk kesejahteraan seluruh umat manusia tanpa dibatasi oleh perbedaan agama, ras, suku, etnik, warna kulit, Bahasa dan gender. Dakwah Kultural berpretensi untuk menyebarkan *Islam rahmatan li al-'alamin* melalui pendekatan dan metode yang bijak sesuai dengan kapasitas intelektual dan psikologis manusia dan tanpa paksaan. Melalui cara ini, diharapkan Islam yang universal dapat menyentuh dan bertegur sapa dengan partikularitas-partikularitas ruang dan waktu. Lokalitas menjadi bagian dari modalitas untuk membumikan Islam di bumi Nusantara dan bumi manapun di dunia ini.⁵⁹

Pada periode kepemimpinan Ahmad Syafii Maarif, sedikitnya ada dua komunitas intelektual Muhammadiyah yang muncul mewadahi para pemikir muda progresif Muhammadiyah, yaitu Maarif Institute, dan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM). Lontaran-lontaran pemikiran kritisnya mampu menarik perhatian publik, khususnya warga

⁵⁶Wawancara Aini Sukriah, Ketua PW Nasyiatul Aisyiyah Jawa Timur (6 Mei 2019).

⁵⁷Wawancara Irsyad Majid, Ketua PC IMM Malang Raya (7 Mei 2019).

⁵⁸ Wawancara Mukayat al-Amin, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (14 Mei 2019)

⁵⁹Lihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Dakwah Kultural Muhammadiyah*(Yogyakarta:Suara Muhammadiyah, 2004).

Muhammadiyah. Selain Syafii Maarif, beberapa tokoh senior Muhammadiyah progresif terlibat dalam penyemaian pemikiran kritis di kalangan anak muda Muhammadiyah ini, antara lain: M. Dawam Rahardjo, Moeslim Abdurrahman, M. Amin Abdullah, dan Abd Munir Mulkhan. Merekalah yang banyak memberi inspirasi kepada pemikir muda progresif Muhammadiyah yang mempunyai komitmen kepada gagasan-gagasan pluralisme, demokrasi, toleransi, hak asasi manusia dan kebebasan beragama.

The Maarif Institute for Culture and Humanity

Spirit kelahiran *The Maarif Institute for Culture and Humanity* (atau biasa disingkat Ma'arif Institute) adalah kesadaran akan pentingnya institusi kultural yang memperjuangkan Islam Indonesia yang *grahmatan li al-'alamin*, inklusif, dan kompatibel dengan ide-ide modern, seperti demokrasi dan hak asasi manusia. Kehadiran lembaga ini dirasa relevan disaat kuatnya distorsi pesan Islam oleh kelompok-kelompok anti-kemajuan, anti demokrasi, dan pro-kekerasan.⁶⁰

Lembaga ini didirikan pada 28 Pebruari 2003 di Jakarta atas prakarsa Ahmad Syafii Maarif. Misi pokok Maarif Institute adalah menyosialisasikan gagasan pembaruan Islam, melakukan dialog dan kerjasama antaragama, antarbudaya dan antarperadaban guna mewujudkan keadaban, perdamaian, saling pengertian, dan kerjasama yang konstruktif bagi kemanusiaan. Apa yang kini dikembangkan oleh Maarif Institute tidak lain merupakan ikhtiar untuk merealisasikan gagasan besar Syafii Maarif yang terangkum dalam konsep keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.

Syafii Maarif ingin agar Islam yang dikembangkan di Indonesia adalah Islam yang ramah, terbuka, inklusif dan mampu memberi solusi terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara. Agar bisa mengembangkan Islam seperti itu, umat Islam harus terbuka, semangat untuk maju, optimis dan tidak putus asa, serta tidak bermental minoritas. Syafii Maarif sendiri selama ini dikenal sebagai tokoh Islam yang tak pernah canggung bergaul dan menjalin hubungan baik dengan pemuka dan tokoh-tokoh agama; Kristen, Budha, Hindu, Tionghoa, kalangan nasionalis, NU dan juga tokoh-tokoh dunia. Menurutnya, ini semua merupakan modal yang sangat besar untuk membangun toleransi dan dialog dengan kelompok lain.

Untuk menyebut beberapa kegelisahan Syafii Maarif yang sampai sekarang terus-menerus dipikirkannya adalah, *pertama*, mengentainya budaya Arabisme di masyarakat; *kedua*, anomali kehidupan demokrasi; *ketiga*, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Syafii Maarif tidak setuju dengan pelembagaan hukum atau syariat Islam menjadi sebuah undang-undang negara.⁶¹ Pikiran-pikiran Syafii ini terbukti sangat penting dalam pengembangan pluralisme dan demokrasi di

⁶⁰Fajar Riza Ul Haq, "Gugus Wacana Maarif Institute: Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemanusiaan". Paper Workshop "Pengembangan Islam dan Pluralisme di Indonesia", diselenggarakan oleh Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, Puncak, 7-8 Juni 2007.

⁶¹M. Amin Abdullah, "Intelektual Sekaligus Aktivistis", dalam Abd Rahim Ghazali, *Refleksi 70 Tahun Ahmad Syafii Maarif Cermin Untuk Semua* (Jakarta: Maarif Institute, 2005), 18.

Indonesia. Ia melihat substansi agama sebagai etika dalam demokrasi. Jika negara ini ingin berdasarkan Islam, menurut Syafii, seharusnya yang dikembangkan adalah cita-cita Islam substantif, bukan formalisasi syariah sebagaimana dalam sejarah Islam. Dengan jujur, Syafii mengaku berbahagia ketika Islam tidak menjadi dasar negara di Indonesia.⁶²

Untuk memperkuat dan menyebarkan wacana yang dikembangkannya, Maarif Institute membuat website dengan alamat: www.maarifinstitute.org. Selain membuat website Maarif Institute juga menerbitkan jurnal *Maarif* yang terbit setiap bulan. Sejak didirikan pada tahun 2003, Maarif Institute berhasil membidani lahirnya Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM)—saat itu Maarif Institute dipimpin oleh Moeslim Abdurahman, seorang intelektual Islam Progresif yang sangat peduli pada transformasi masyarakat Islam di Indonesia. Pada masa itu, Maarif Institute memainkan peran sebagai payung dan wadah bagi intelektual muda progresif Muhammadiyah yang gelisah atas realitas intelektualisme yang berjalan kurang dinamis di tubuh Muhammadiyah.⁶³

JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah)

Menurut Zuly Qodir—salah satu pendiri JIMM—JIMM adalah sebuah paguyuban anak-anak muda Muhammadiyah, yang secara resmi kebanyakan sudah tidak lagi menjadi pengurus dalam Muhammadiyah, atau masih sebagai anggota tetapi memiliki gaya berfikir dan metode penafsiran al-Qur'an yang berbeda dengan mereka yang menjadi pimpinan di tingkat wilayah, daerah, maupun pusat.⁶⁴ JIMM sendiri lahir sekitar September 2003. Kehadiran JIMM sebenarnya diberi ruang oleh Ahmad Syafii Maarif—yang waktu itu adalah Ketua Umum Muhammadiyah—namun tidak mendapatkan tempat secara luas di kalangan pengurus Muhammadiyah lainnya, sebab JIMM berada di luar struktur Muhammadiyah.⁶⁵

JIMM telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan seputar diseminasi Islam dan pluralisme di Indonesia. Wacana pluralisme sendiri, adalah salah satu bagian dari isu penting JIMM. Menurut kurikulum yang dibuat dan dicanangkan oleh aktivis JIMM, tiga wacana utama yang dikaji dan menjadi spirit JIMM adalah: pemikiran Islam kontemporer, ilmu sosial kritis, dan gerakan sosial baru.⁶⁶

Moeslim Abdurrahman menegaskan bahwa JIMM mencoba untuk membangun pemikiran baru dan menjadikan *tajdid* (pembaruan) sebagai

⁶²Zuly Qodir, *Pembaharuan Pemikiran Islam: Wacana dan Aksi Islam Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 158.

⁶³Mohamad Ali, *Islam Muda Liberal, Post-Puritan, Post-Tradisional*, (Jakarta: Apeiron Philotes, 2006), 102.

⁶⁴Zuly Qodir, *Islam Syariah vis a vis Negara Ideologi Gerakan Politik di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 198.

⁶⁵Ibid.

⁶⁶Ahmad Fuad Fanani, "Jihad Membumikan Pluralisme, Bersatu Menghadang Fundamentalisme" Paper Workshop "Pengembangan Islam dan Pluralisme di Indonesia", diselenggarakan oleh Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, Puncak, 7-8 Juni 2007.

langkah JIMM menafsir kembali makna Islam yang lebih relevan.⁶⁷ Wacana tentang keislaman, demokrasi, pluralisme, dan hermeneutika yang diwacanakan oleh JIMM inikemudian membawa mereka harus berhadapan dengan kelompok Islam garis keras, semisal, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan organisasi yang segaris dengan mereka—terlebih setelah Syafii menyebut kelompok konservatisme ini sebagai “preman berjubah”.⁶⁸

JIMM sejak awal menggelar berbagai workshop dan Tadarus Pemikiran Islam. Kegiatan itu, menghasilkan buku *Kembali ke Al-Qur'an, Menafsir Makna Zamanyang* yang dihimpun dari makalah-makalah para pembicara pada acara tersebut; . *Muhammadiyah Progresif Manifesto Pemikiran Kaum Muda*. Mereka juga melakukan kegiatan “Diseminasi Wacana Filsafat Pluralisme untuk Guru SMA/K Muhammadiyah se Yogyakarta”. Kegiatan ini menghasilkan buku yang telah diterbitkan oleh JIMM Yogyakarta dengan judul *Belajar Kearifan dari Kisah Sahabat*.⁶⁹

Selain itu, dalam tubuh UMS sendiri, ada sebuah pusat yang bernama *Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSBPS)*. Karena telah menyebarkan pemikiran kaum progresif dan liberal dan mendukung pemikiran-pemikiran JIMM, PSBPS. Yayah Khisbiyah, pendiri pusat tersebut mengakui tengah berada dalam perlawanan kelompok konservatif. Namun, perkembangan menarik terjadi tahun 2014. Untuk pertama kalinya, Universitas Muhammadiyah Surakarta menyediakan tempat bagi JIMM untuk menggelar kegiatan di kampus tersebut. Ini merupakan peristiwa menarik karena UMS yang selama ini dikenal resisten terhadap JIMM, ternyata kini membuka diri. Jika di UMM, “perlindungan” pada JIMM tidak terlepas dari peran Prof. Dr. Muhadjir Effendy yang menaruh perhatian besar pada perkembangan dunia intelektual di kalangan generasi muda Muhammadiyah, maka pergeseran sikap UMS pada JIMM tidak bisa dilepaskan dari sosok Marpuji Ali yang dengan pendekatan persuasifnya bisa meyakinkan publik UMS bahwa JIMM sama sekali bukan bahaya bagi Muhammadiyah.⁷⁰

Di dalam perjalanannya aktivitas JIMM yang terakhir, tahun 2018 telah melaksanakan “Tadarus Pemikiran Islam Nasional” di Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 23-24 Mei dengan membahas tema “*Rebranding Muhammadiyah: Dialektika Otensitas dan Perubahan dalam Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah*”. Tadarus ini pun juga telah diikuti oleh kader-kader muda Muhammadiyah di seluruh Indonesia, terutama dari kader-kader ortom, baik IPM dan IMM di kampus. Segala bentuk aktivitas JIMM berupa tadarus pemikiran Islam, workshop, kolokium, dan seminar yang membahas isu dalam Muhammadiyah *update* merupakan langkah awal kelompok Muhammadiyah progresif untuk saling tukar gagasan, bahkan mereproduksi kembali gagasan yang pernah ada sesuai apa yang di harapkan tokoh Muhammadiyah awal sebagai bentuk gerakan ormas pembaharuan.

⁶⁷Moeslim Abdurrahman, “Menggagas Islam Yang Memihak Sebuah Pengantar”, dalam Ahmad Fuad Fanani, *Islam Mazhab Kritis Mengagas Keberagamaan Liberatif* (Kompas: Jakarta, 2004), xxi.

⁶⁸Lukman Hakim, “Toleransi dan Kemanusiaan: Pengalaman Maarif Institute” dalam *Pluralisme dan Kebebasan Beragama—Laporan Penelitian Profil Lembaga*, 98-119.

⁶⁹Ahmad Fuad Fanani, “Jihad Membumikan Pluralisme”.

⁷⁰Pradana Boy ZTF, *Membela Islam Murni* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), 189.

7. Madrasah Perempuan Berkemajuan

Madrasah Perempuan Berkemajuan merupakan program yang diinisiasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat (LPPA) 'Aisyiyah yang diketuai Alimatul Qibtiyah. Madrasah Perempuan Berkemajuan diinisiasi oleh LPPA kurang lebih dua tahun dengan tujuan untuk membagikan pengalaman serta pandangan 'Aisyiyah. Pikiran-pikiran 'Aisyiyah yang berkemajuan seharusnya tidak hanya dinikmati oleh warga 'Aisyiyah tetapi juga dapat diketahui oleh masyarakat umum. 'Aisyiyah merintis "Madrasah Pimpinan Berkemajuan" untuk kajian-kajian tentang isu-isu kontemporer yang dikaitkan dengan perspektif Islam, bagaimana politik dengan Islam, dan sebagainya. Hal ini masih digodog dan akan di *share* ke seluruh wilayah 'Aisyiyah. Madrasah Pimpinan Berkemajuan ini baru satu angkatan dimulai tahun 2014 lalu.

Madrasah Pimpinan Berkemajuan ini diselenggarakan seminggu selama empat bulan. Pesertanya terbuka, tidak hanya kader dan anggota 'Aisyiyah, melainkan juga anak-anak muda. Menurut Ninin Karlina, (Kabid NA Sukoharjo) Madrasah Perempuan berkemajuan itu bertujuan bagaimana supaya peserta memahami hal-hal konservatif kemudian dia menjadi progresif setelah itu. Dengan kata lain, menerjemahkan ideologi Muhammadiyah lalu disesuaikan dengan konteks kekinian. Menurut Ninin Karlina dalam kegiatan ini peserta diberikan wawasan tentang peta ideologi Muhammadiyah diantara gerakan Islam kontemporer mulai dari radikalisme, konservatisme, dan Islamisme kontemporer⁷¹

8. Baret Merah: Pengalaman IMM

Baret Merah adalah kegiatan intelektual Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo (PC IMM Sukoharjo) untuk melakukan kaderisasi kaum muda yang berpikiran Islam moderat dan progresif. Baret Merah sudah mentradisi secara turun-temurun sejak tahun 2006. Kegiatan ini semacam sekolah filsafat yang diikuti oleh kader IMM tingkat Komisariat se-Indonesia. Baret Merah diselenggarakan satu kali per-semester dengan durasi waktu selama dua minggu (14 hari) dan biasanya bertepatan ketika liburan semester.

Kegiatan inti Baret Merah, yaitu mengkaji filsafat. Jadi metode pembelajaran yang diterapkan pada Baret Merah ini berupa presentasi bergantian oleh peserta Baret Merah yang dibagi menjadi dua kelompok. Tema yang dipresentasikan ialah; (1) Pendahuluan (pengertian filsafat, objek kajian filsafat, ciri berpikir filsafat, ontologi, epistemologi dan aksiologi), (2) Filsuf Pra-Sokrates/Filsuf Antroposentris (Tales, Anaximenes, Anaximander, Empedokles, Pythagoras, DLL). (3) Filsuf pasca Sokrates/Filsuf antroposentris (Sokrates, Plato, Aristoteles), (4) Filsafat Hellenisme, (5) Filsafat Skolastik, Aliran Pemikiran Filsafat beserta tokohnya (Idealisme, Empirisme, Rasionalisme, Positivisme, dll), filsuf Islam dan Filsuf kontemporer.

Kegiatan ini menjadi ajang kritisisme, pelatihan membangun argumentasi, kebiasaan berbeda pendapat, kebiasaan mendengar

⁷¹Wawancara Ninin Karlina, Ketua Kader NA Sukoharjo (15 Mei 2019).

pendapat orang lain yang berbeda sudut pandang, dilatih dan ditempa. Maka, banyak sekali lulusan Baret Merah yang dulunya kolot dalam pemikiran yang percaya akan kebenaran mutlak tentang apa yang dipelajarinya baik itu tentang agama atau ilmu lain, akan menjadi cair dan lebih mentolerir orang yang berbeda pendapat dengannya. Lulusan baret merah bukanlah orang yang anti dialog, melainkan orang yang sangat suka dialog. Jadi kedepannya, lulusan baret merah akan bisa menyelesaikan segala permasalahan nya cukup dengan dialog konstruktif dan tidak perlu melalui kekerasan fisik. Hal tersebut berimplikasi pada pemahaman keagamaan peserta yang ikut Baret Merah. Mereka lebih terbuka terhadap wacana, pemahaman, dan gagasan baru seputar agama Islam.⁷²

9. Kajian-kajian Akademis

Dari level Pusat, wilayah, daerah, hingga ranting, para aktivis Muhammadiyah berupaya menangkal ideologi Islam radikal. Bukan hanya melalui kaderisasi, tapi juga kajian-kajian, seminar, *workshop*, dan sebagainya. Hal tersebut diharapkan mampu menjadi upaya preventif dari segala bentuk infiltrasi ideologi radikal yang dehumanistik dan destruktif.

Di lingkungan IMM, misalnya, Abdul Musawir menjelaskan bahwa IMM menyelenggarakan pelbagai seminar di kalangan mahasiswa, dalam rangka menangkal radikalisme. Di samping itu dalam pelbagai programnya, IMM selalu memasukkan materi mengenai pentingnya meneguhkan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang harus dijaga.⁷³

B.3 Daya Tahan Muhammadiyah

Hal penting lainnya yang menarik untuk dibicarakan adalah daya tahan Muhammadiyah dalam menghadapi radikalisme. Topik ini mungkin terkesan sensitif, namun bagaimanapun juga kita harus berani membicarakan diri sendiri secara terbuka. Keberanian membicarakan diri sendiri akan membuka kemungkinan untuk mengambil langkah tepat ke depan.

Berdasarkan pengamatan Achmad Jainuri, selama ini di kalangan pimpinan Muhammadiyah steril dari segala bentuk infiltrasi ideologi destruktif, karena proses proteksi ideologis yang diupayakan Muhammadiyah telah melalui proses yang panjang. Terdapat mekanisme penyaringan pemimpin Muhammadiyah yang sangat ketat. Di tingkat pimpinan pusat, setelah melalui pemilihan, para calon pemimpin elit Muhammadiyah disaring melalui proses seleksi berikutnya, yang ditentukan oleh anggota *Tanwir* (musyawarah). Melalui proses ini, orang-orang yang tidak sesuai dengan visi-misi Muhammadiyah pasti akan tersingkir.⁷⁴

⁷²Wawancara eksklusif dengan Ketua Bidang Tablig PC IMM Sukoharjo, Yahya Fathur Rozy, Jum'at 24 Mei 2019 Pukul 09.00-09.40 WIB.

⁷³Abdul Musawir, Ketua DPD IMM Jawa Timur (6 Mei 2019).

⁷⁴Wawancara Achmad Jainuri, Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah (8 Mei 2019).

Daya tahan Muhammadiyah, terutama di level pengurus, juga disampaikan oleh Syamsuddin. Menurutnya, secara umum tidak ada pengurus Muhammadiyah yang terpengaruh oleh ideologi radikal, terutama mereka yang setiap hari menangani urusan struktural-organisasional. Sejak dari ranting, cabang, daerah, wilayah hingga pusat, para aktivis Muhammadiyah telah terseleksi oleh mekanisme organisasi yang ada.⁷⁵

Di tingkat daerah juga menunjukkan hal itu. Khozin menyatakan bahwa tidak ada pengurus inti yang terindikasi terpengaruh oleh ideologi radikal. Akan tetapi jika mereka yang pada mulanya memiliki latar belakang Islam garis keras kemudian bergabung dengan Muhammadiyah, mereka memang tidak mudah untuk sepenuhnya mengubah ideologi yang dimilikinya semula. Semua pengurus inti adalah orang-orang yang terseleksi dengan baik, terutama atas dasar ideologi yang dimiliki. Di samping itu, siapa saja yang akan menjadi calon pemimpin, masih harus mengikuti seleksi lebih lanjut yang lebih ketat. Mereka yang benar-benar memiliki ruh kemuhammadiyah yang kuat yang akan terpilih menjadi pemimpin.⁷⁶

Di sayap organisasi kemahasiswaan, Abdul Musawir mengklaim tidak ada anggotanya yang terpengaruh Islam radikal. IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) diyakini aman dari paham-paham yang destruktif tersebut karena proteksi ideologis yang ada di IMM sangat kuat. Setiap kader yang bergabung harus mengikuti serangkaian kegiatan pengkaderan, sehingga memiliki militansi ber-Muhammadiyah yang kuat.⁷⁷ Malah menurut Irsyad Majid, lebih banyak kader IMM yang memiliki pemikiran progresif daripada radikal.⁷⁸

Sedangkan di sayap gerakan pelajar, Maharina menjelaskan bahwa tidak ada kader IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) yang terpapar radikalisme apalagi terorisme. Kalau ada siswa sekolah Muhammadiyah yang melakukan tindakan radikal, bisa dipastikan yang bersangkutan tidak mengikuti proses kaderisasi IPM secara ketat.⁷⁹ Akan tetapi, penjelasan Hafizh Syafaaturrahman, Ketua DPP IPM, memberi informasi yang sedikit berbeda. Karena anggota IPM adalah para remaja yang sedang berada dalam masa transisi, mereka rawan terpengaruh kelompok lain. Mereka yang rawan terpengaruh adalah terutama yang bukan pengurus.⁸⁰

Sementara itu, di sayap gerakan perempuan muda Muhammadiyah, Aini Sukriah menjelaskan perbedaan antara kader asli dan pendatang.⁸¹ Proses radikalisasi mustahil mampu menembus pertahanan ideologis kader asli. Menurut Yenik Kholifatul, para kader asli ini telah mengikuti proses perkaderan yang selektif (DANA 1, DANA 2, DANA 3) dan bahkan ada yang

⁷⁵ Wawancara Syamsuddin, Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah (8 Mei 2019)

⁷⁶ Wawancara Khozin, Ketua Majelis Dikdasmen, PDM Kota Malang (11 Mei 2019).

⁷⁷ Wawancara Abdul Musawir Yahya, Kabid Keilmuan DPP IMM (6 Mei 2019).

⁷⁸ Wawancara Irsyad Madjid, Ketua PC IMM Malang Raya (7 Mei 2019).

⁷⁹ Wawancara Maharina Novia Zahro Kabid PIP PP IPM (6 Mei 2019).

⁸⁰ Wawancara dengan Hafizh Syafaaturrahman, Ketua DPP IPM, pada 13 Juni 2019

⁸¹ Wawancara Aini Sukriah, Ketua Umum PW Nasyiatul Aisyiyah Jawa Timur (6 Mei 2019).

sudah pernah mengikuti perkaderan di organisasi sebelumnya seperti IPM dan IMM.⁸²

Sekalipun demikian, Jainuri mengakui bahwa di akar rumput, ditemui beberapa warga Muhammadiyah yang terpengaruh ideologi radikal. "(Sebagian) orang Muhammadiyah mudah terpesona oleh rumput tetangga. Karena mereka barangkali fasih dalam menyampaikan materi dan kitab-kitab yang jarang mereka dengar di Muhammadiyah."⁸³

Sekalipun demikian, dalam pandangan Haeri Fadly, apa yang terjadi pada warga Muhammadiyah di bawah sesungguhnya tidak sampai pada tahap radikal, tapi konservatif-intoleran. Sekalipun ini membahayakan, namun jelas ada perbedaan antara intoleransi dengan radikalisme. Menurut Haeri, sejauh yang menimpa para aktivis Muhammadiyah di akar rumput adalah konservatisme keagamaan, tetapi mereka tidak radikal. Biasanya, hal tersebut teraktualisasi dalam bentuk perilaku yang tidak mudah menerima perbedaan, terlebih menyangkut masalah keyakinan (akidah). Menurut hemat Haeri, hal itu bisa terjadi oleh karena wawasan keagamaan yang dimiliki atau sudah meyakini doktrin keagamaan tertentu yang sangat tertutup (eksklusif).⁸⁴

Sementara itu Nurbani Yusuf mengungkap kasus yang berbeda. Di daerah di mana ia tinggal, ada orang Muhammadiyah yang terindikasi berideologi radikal. Orang-orang seperti ini biasanya akan menyeret-nyeret Muhammadiyah untuk mengikuti ideologi kekerasan yang dipeluknya. Orang seperti ini jika masuk sebagai pengurus justru membuat masalah di dalam.⁸⁵

Terdapat kasus lain, seperti yang diungkapkan oleh Idaul Hasanah, yakni perebutan pengelolaan masjid oleh warga Muhammadiyah dan mereka yang berafiliasi dengan aliran kanan. Menurut Haeri, seperti salah satu masjid di Malang, yakni Masjid Muhajirin, sempat tidak terurus dan pada akhirnya dikontrol oleh mereka yang cenderung konservatif. Meskipun pada akhirnya, pengelolaan masjid tersebut dapat diambil alih oleh warga persyarikatan.⁸⁶

Demikianlah, daya tahan Muhammadiyah terhadap pengaruh Islam radikal. Di kalangan pengurus, ideologi *wasathiyah* bisa dikatakan terjaga dengan baik. Sekalipun demikian, di warga bawah ditemukan adanya kerentanan dari pengaruh ideologi radikal, baik itu berwujud sikap intoleran maupun tindakan-tindakan yang terkategori sebagai radikal.

Salah satu kekuatan penting para warga dan pimpinan Muhammadiyah kepatuhan pada produk-produk resmi organisasi. Muhammadiyah memiliki media resmi yang menjadi bacaan pimpinan dan warganya yaitu Suara Muhammadiyah yang terbit setiap dua mingguan. Majalah ini menjadi rujukan utama warga dan pimpinan dalam

⁸²Wawancara Yenik Kholifatul Laila, Ketua Nasyi'atul Aisyiyah (NA) Kabupaten Malang (6 Mei 2019).

⁸³Wawancara Achmad Jainuri, Wakil Ketua PWM Jawa Timur (8 Mei 2019)

⁸⁴Wawancara Haeri Fadly, Anggota Majelis Tarjih PWM Jawa Timur (7 Mei 2019).

⁸⁵Wawancara Nurbani Yusuf, M. Sos, Ketua PDM Kota Batu (9 Mei 2019).

⁸⁶Wawancara Idaul Hasanah, SHI, MHI, Anggota Majelis Tabligh PDM Malang (6 Mei 2019).

bersikap dan berpikir. Majalah ini sampai detik ini dikelola langsung oleh Buya Syafii Ma'arif sebagai pimpinan umum, yang setiap minggu mengawal dalam rapat redaksi. Selain Buya, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir juga turut mengawal arah pemikiran majalah ini.

B.4. Tantangan-tantangan Muhammadiyah

Ada beberapa tantangan yang dihadapi Muhammadiyah dalam memoderasi Islam Indonesia. Tantangan itu bisa berasal dari dalam maupun luar. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi Muhammadiyah

1. Ketiadaan Panduan 'Islam Murni'

Salah satu tantangan Muhammadiyah dalam menghadapi kelompok-kelompok Islam garis keras adalah adanya kesamaan teologi puritanisme, *ar-ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah* (Kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah/Hadits). Kelompok Salafi, Ikhwanul Muslimin, dan kelompok-kelompok Islam lain yang selama ini dikenal intoleran dan radikal juga menggunakan slogan itu.

Sekalipun Muhammadiyah memiliki cara pandang yang berbeda atas teologi puritanismenya, namun kesamaan itu membuat banyak warga Muhammadiyah rentan terpengaruh kelompok-kelompok puritanis lain. Misalnya, di beberapa daerah, MTA berhasil menggerus jamaah Muhammadiyah, salah satunya karena adanya kesamaan teologis antara MTA dan Muhammadiyah.

Sebagaimana yang dinyatakan Sudarno Shobron, Anggota Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, "Saya pernah ditanya, 'Bolehkah saya sebagai Ketua Cabang Muhammadiyah juga ikut membangun MTA, karena model dakwahnya sama?' Saya jawab, 'Kalau etika organisasi, maka tidak boleh'. Ketika Musywil di Pati, juga ada laporan bahwa jamaah di sana aktif di pengajian MTA."⁸⁷

Syamsuddin berpendapat bahwa ada semacam hambatan psikologis dalam Muhammadiyah dalam hal perang melawan wacana radikalisme. Hal itu dikarenakan tokoh-tokoh radikal itu kebanyakan lulusan Timur Tengah dan memiliki irisan dengan Muhammadiyah, yaitu gerakan purifikasi.⁸⁸

Situasi ini semakin parah karena ketiadaan panduan yang bisa dijadikan pegangan hingga akar rumput. Maslahul Falah mengatakan, hambatan utama Muhammadiyah dalam menghadapi kelompok-kelompok radikal salah satunya adalah berkaitan dengan tidak adanya panduan hingga ke bawah.⁸⁹ Tidak heran jika warga Muhammadiyah seringkali merasa kebingungan jika ada kelompok lain yang memarkan ideologinya ke masjid-masjid atau lembaga-lembaga Muhammadiyah, karena mereka juga memiliki slogan yang sama.

⁸⁷Wawancara Sudarno Shobron, Anggota Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah (29 Mei 2019)

⁸⁸Wawancara Syamsudin, Wakil Ketua PWM Jawa Timur (8 Mei 2019).

⁸⁹Wawancara KH Maslahul Falah, Ketua Ranting Laren, Lamongan (8 Mei 2019).

2. Krisis Muballighdan Ulama

Ada kelemahan mendasar di tubuh Muhammadiyah jika ingin menjadi aktor penting dalam gerakan moderasi pemikiran dan sikap keberagamaan di Indonesia, yaitu krisis ulama atau da'i atau muballigh atau ustadz. Keluhan akan kurangnya ulama atau muballigh ini nyaris ditemukan pada semua informan dalam penelitian ini.

Sobrun Jamil, Pemuda Muhammadiyah, menyatakan bahwa Muhammadiyah kurang memiliki da'i yang siap berdakwah di akar rumput.⁹⁰ Dyah Puspita Rini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, bahkan menyatakan bahwa dia sangat kesulitan menemukan da'i atau ustadz Muhammadiyah untuk ditanyai persoalan agama.⁹¹

Krisis da'i Muhammadiyah juga dialami di berbagai daerah. Karena situasi ini, tidak jarang pengajian Muhammadiyah diisi oleh da'i-da'i non-Muhammadiyah dengan ideologi keislaman yang sangat keras, sementara Islam berkemajuan ala Muhammadiyah yang progresif dan moderat justru tidak tersampaikan ke warga Muhammadiyah.⁹²

Keluhan Muhammad Bardan, Ketua Majelis Kader PDM Sukoharjo, mungkin bisa menggambarkan hal ini dengan jelas. Menurutnya, Muhammadiyah sukses membangun ribuan masjid, sayangnya, banyaknya masjid tidak diikuti dengan ketersediaan da'i atau muballigh yang rutin menghidupkan masjid-masjid tersebut. "Muhammadiyah sering bangun masjid cuman tidak bisa mengurus masjidnya. Muhammadiyah itu pada intinya kekurangan mubaligh yang rutin melayani masjid-masjid. Sehingga diambil oleh kelompok lain," katanya.⁹³

Kiai Tafsir, Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, dengan sangat gamblang menjelaskan situasi ini.

Salah satu kelemahan Muhammadiyah, karena terlalu dipenuhi semangat berkemajuannya, akibatnya sangat minim yang menekuni dunia-dunia keislaman. Warga Muhammadiyah maunya kuliah di kedokteran, teknik, farmasi dan lain sebagainya. Begitu anak Muhammadiyah sekolah, mereka selalu ditanya, "Mau kerja apa? Besok jadi apa?". Ketika ingin masuk (Fakultas) Ushuluddin, misalnya, paling bisa ceramah.... Kalau sekolah Ushuluddin sesok *ameh dadi opo* (besok mau jadi apa, red.), seolah-olah lupa kalau Allah itu ada.... Akhirnya ketika momen cari mubaligh [Muhammadiyah kesulitan].... Jadi kesalahannya, tidak hanya di struktur, itu kulturenya juga salah. Sekarang gini, Muhammadiyah sudah menyediakan infrastruktur untuk memproduksi mubaligh, seperti Shabran dan PUTM, tapi berapa jumlah mereka? [Peneliti sekaligus Pembina Pondok Shabran memberi informasi bahwa yang mendaftar di Pondok Shabran seratus orang, tapi yang

⁹⁰Wawancara Sobrun Jamil, Ketua PDPM Malang Raya; Anggota PWPM Jatim (12 Mei 2019)

⁹¹Wawancara Dyah Puspita Rini (Ketua Umum PP Nasyiatul Aisyiyah (4 Juni 2019).

⁹²Wawancara Ninin Karlina, Ketua Bidang Kader Pimpinan Daerah Aisyiah Sukoharjo, (15 Mei 2019)

⁹³Wawancara Muh. Bardan, Ketua Majelis Pendidikan Kader PDM Sukoharjo (24 Mei 2019).

diterima cuma tiga puluh orang]. Problem setelah itu, siapa yang daftar ke sana? Yang masuk ke sana bukan anak elit Muhammadiyah. Yang masuk itu warga Muhammadiyah awam dan kurang mampu, yang elit masuk Fakultas Kedokteran. Sehingga mereka hanya kelas “KW 2” PUTM. Shabran itu “KW2”. Coba cari anak PUTM dan Shabran, itu berapa gelintir yang anaknya elit.... Maka harus ada pusat pendidikan ulama sehingga kebutuhan-kebutuhan pondok untuk pengasuh, bisa dipenuhi.... Sehingga, paham agamanya sesuai dengan yang digariskan oleh Muhammadiyah. Pendidikan ulamanya itu kayak Shabran itu, tapi jangan dibatasi. Siapa pun yang mau mondok, harus diterima, *nggak* usah dibatasi dan tidak usah diberi beasiswa sepenuhnya jika memang tidak sanggup. Yang penting kaderisasi ulamanya terbangun. Lha NU, di Ramadhan seperti ini, *direwangi nggowo kasur dewe kok* (sampai bawa kasur sendiri, red.) untuk mondok ketika liburan”.⁹⁴

Krisis da'i atau muballigh ini semakin diperparah dengan ketidakcakapan dai atau muballigh Muhammadiyah dalam menyampaikan pesan-pesannya. Mengapa Muhammadiyah Sukoharjo, misalnya, lebih sering mengundang da'i-da'i non-Muhammadiyah, salah satunya karena kajian ustadz-ustadz Muhammadiyah kurang menarik. Mereka juga tidak cakap mengemas materi sehingga mudah diterima jamaah.⁹⁵

Sebagai organisasi dakwah, Muhammadiyah selalu berikhtiar meluaskan dan mengembangkan sayap dakwah Islam progresifnya di tengah-tengah masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, dakwah Muhammadiyah kalah menarik dengan kelompok-kelompok lain karena da'i atau ustadz atau ulama Muhammadiyah kurang lentur, cenderung membosankan, dan bahasanya berat. Karena itu, nyaris tidak ada da'i Muhammadiyah yang menarik bagi anak-anak muda.⁹⁶

Keberadaan da'i Muhammadiyah sesungguhnya sangat dibutuhkan untuk menjaga warga Muhammadiyah dari pengaruh kelompok-kelompok radikal. Keberadaan da'i Muhammadiyah sangat penting dalam menjaga paham keagamaan warga Muhammadiyah supaya tetap sejalur dengan fatwa dan ideologi Muhammadiyah. Yang tidak kalah penting adalah kemasan dalam pengajian. Pengajian-pengajian yang tidak menarik membuat tidak sedikit warga Muhammadiyah yang bermigrasi ke kelompok lain.⁹⁷

3. Dakwah Media

⁹⁴Wawancara Tafsir, Ketua PWM Jawa Tengah (18 Mei 2019)

⁹⁵Wawancara Ninin Karlina, Ketua Bidang Kaderisasi Pimpinan Daerah Aisyiah (15 Mei 2019)

⁹⁶Wawancara Muhammad Taufik Hassan, Ketua PD IPM Surakarta (Selasa, 07 Mei 2019); Wawancara Isnaeni Shofianah, Sekretaris Umum PD IPM Sukoharjo (12 Mei 2019).

⁹⁷Di Surakarta, kebanyakan warga Muhammadiyah bermigrasi ke pengajian Majelis Tafsir Alquran (MTA), info didapat dari wawancara eksklusif dengan Sudarno Shobron, Ketua Program Magister Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta (27 Mei 2019).

Sebagai organisasi modern, Muhammadiyah kini menghadapi realita baru masyarakat milenial di mana media adalah salah faktor yang sangat menentukan. Sayangnya, Muhammadiyah justru lemah di bidang ini. Media-media yang dikembangkan Muhammadiyah kalah dengan media kelompok-kelompok Islam garis keras, sebut saja, *eramuslim.com*. Bahkan, di kalangan anak-anak muda Muhammadiyah yang familiar dengan isu-isu jurnalistik pun, media tidak berkembang dengan baik.

Kelemahan Muhammadiyah di bidang media ini secara tak langsung juga diamini Mu'arif, salah seorang redaktur senior *Suara Muhammadiyah* (SM), media resmi Muhammadiyah. Dia mencontohkan mengapa SM kurang berpengaruh dibandingkan media Islam lainnya, hal itu salah satunya karena pembaca SM hanya dari internal Muhammadiyah. Itu pun tidak semua pengurus membacanya. Mestinya, Muhammadiyah harus berani memasarkan pikiran-pikirannya ke luar melalui berbagai kanal media alternatif lain.⁹⁸

Sebanarnya Muhammadiyah sudah merambah ke dunia digital. Majalah SM memiliki *suaramuhammadiyah.id*, ada *muhammadiyah.or.id* sebagai narasi resmi. Di PW Muhammadiyah Jawa Timur mempunyai *pwmu.co*, sedangkan di PW Muhammadiyah Jawa Tengah punya *tabloidcermin.com*, sedangkan Soloraya ada *mentarinews.com*. Akan tetapi, mayoritas atau secara umum situs-situs muhammadiyah masih didominasi berita-berita kegiatan organisasi dan terlalu berorientasi ke internal. Sehingga kurang *powerful* untuk mendesiminasikan ideologi dan paham keagamaan Muhammadiyah baik ke jamaahnya maupun ke ruang publik. Belakangan muncul media yang dikelola oleh anak-anak muda Muhammadiyah seperti *ibtimes.id*, *tanyajawabagama.com* yang lumayan gencar mempromosikan gagasan Islam moderat Muhammadiyah.

Kelemahan Muhammadiyah di bidang media ini pada akhirnya menghambatnya dalam pembentukan wacana publik yang saat ini nyaris semuanya disalurkan melalui media. Menurut Syahrul, salah satu hambatan IPM, dalam perang wacana dengan kelompok radikal adalah media-media yang dimiliki IPM tidak semenarik yang dimiliki oleh kelompok-kelompok radikal.⁹⁹

Belum lagi kelemahan ini diperberat dengan miskinnya konten keislaman kreatif yang diproduksi Muhammadiyah. Jika dibanding dengan kelompok salafi, misalnya, Muhammadiyah bisa dikatakan tertinggal jauh dalam mengembangkan media sebagai kanal berdakwah Islam moderat.¹⁰⁰ Bahkan, di media sosial pun, suara Muhammadiyah kalah gaung dibanding kelompok-kelompok Islam radikal. Inilah salah satu pekerjaan rumah Muhammadiyah saat ini.¹⁰¹

Perembesan wacana keislaman radikal yang masuk ke dalam media resmi Lembaga menurut Najib Hamid belum ada. Ia melanjutkan, kalau ada pasti melakukan perlawanan. Kalau ada berbeda sikap itu biasa. Namun,

⁹⁸Wawancara Mu'arif, redaksi senior *Suara Muhammadiyah* (24 Juni 2019).

⁹⁹Wawancara Syahrul Ramadhan, Ketua PW IPM Jawa Timur (5 Mei 2019).

¹⁰⁰Wawancara KH Tafsir, Ketua PWM Jawa Tengah (18 Mei 2019).

¹⁰¹Wawancara Syahrul Ramadhan, Ketua PW IPM Jawa Timur (5 Mei 2019).

menurutnya soal media, Muhammadiyah memang masih kalah. Muhammadiyah Jatim punya PWMU yang online, Matan yang offline. Ada Walida offline. PWMU TV online, tapi tidak terlalu survive karena itu industri kapitalis yang luar biasa. Ketika TV harus dikembangkan dengan materi dakwah, berhadapan dengan iklan-iklan.

4. Politik Identitas

Dalam menjalankan misi moderasi keislaman, salah satu tantangan yang dihadapi Muhammadiyah adalah dinamika internal organisasi. Di tubuh Muhammadiyah, terdapat berbagai varian pandangan, termasuk pandangan politik. Keragaman pandangan politik ini tidak jarang dibawah masuk ke dalam organisasi dan menungganginya. Varian-varian ini biasanya mengalami kristalisasi ketika terjadi peristiwa politik tertentu, baik internal maupun eksternal. Peristiwa internal misalnya, adalah suksesi kepemimpinan, dan dari eksternal misalnya, terkait dengan momentum politik elektoral. Karena Muhammadiyah adalah organisasi keislaman, tidak jarang kepentingan politik ini dibungkus dengan narasi-narasi keislaman sehingga mengakibatkan pengerasan.¹⁰²

Momentum politik yang sangat kuat mengusung sentimen keagamaan sebagai strategi membangun politik identitas berdampak pada pengerasan sikap keagamaan di Muhammadiyah adalah Pilpre 2019 beberapa waktu lalu. Agama diseret ke ranah politik praktis dan menjadi alat untuk membuat garis batas antara 'kami' dan 'mereka'. Agama yang semetinya menebar nilai-nilai kemanusiaan universal dimiskinkan menjadi semata-mata alat politik. Akibat yang ditimbulkan dari menguatnya politik identitas berbasis agama adalah pengerasan wacana dan sikap keagamaan umat.¹⁰³

Situasi ini sebetulnya telah terjadi sebelum Pilpre 2019, terutama apa yang terjadi pada Pilgub DKI 2016. Perseteruan antara pendukung Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dengan Anis Baswedan sarat dimuati dengan berbagai narasi keislaman yang sangat eksklusif dan intoleran. Perbedaan politik digunakan untuk membuat garis batas antara Muslim dan non-Muslim. Dukungan kepada salah satu calon dianggap sebagai jihad. Kuatnya politik identitas dengan memainkan sentimen agama ini terus berlanjut pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.¹⁰⁴

Di tubuh Muhammadiyah, situasi ini memberi dampak yang bisa dirasakan. Setidaknya, inilah yang diakui oleh Jainuri. Dia berpendapat bahwa menguatnya eksklusivisme dan intoleransi di tubuh Muhammadiyah sangat bisa dirasakan sebagai akibat dari menguatnya politik identitas dalam event politik elektoral. Secara lugas, dia menyatakan, "Secara umum, ya [terjadi radikalasi]. Kalau kita baca di Whatsapp ada kecenderungan itu, mendorong kita untuk bersikap radikal. Apalagi kalau kita melihat keseharian

¹⁰²Wawancara Abdul Mut'i, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah (13 Juni 2019).

¹⁰³Wawancara Mukayat al-Amin, Ketua Umum PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur (14 Mei 2019).

¹⁰⁴Wawancara Syamsul Arifin, Ahli sosiologi agama (7 Mei 2019).

teman, para pejabat tinggi yang vulgar tentang pilihan politik. Mau bagaimana?."105

Dalam pandangan kaum muda, Yahya Fathur Rozy mengatakan umat Islam yang puritan (misal FPI, Tarbiyah, eks-HTI, dan umat Islam puritan dari organisasi moderat), bahwa pesta demokrasi ini ialah salah satu rangkaian kegiatan yang bernuansa agama. Jika beda pilihan maka akan dianggap kafir, munafik, terlaknat, dan lain sebagainya.¹⁰⁶Pengakuan yang sama juga didapatkan dari Nurbani Yusuf, Ketua PDM Kota Batu. Akibat politik elektoral, terjadi pengerasan sikap keberagamaan di kalangan warga Muhammadiyah.¹⁰⁷Refleksi Syamsul Arifin, bisa menjadi bukti betapa pengerasan itu nyata terjadi.

Saya belum pernah menjumpai dalam politik elektoral bahwa ada gelombang keagamaan yang sebesar ini. Ada potensi bahaya karena umat Islam terbelah dan menjadi tidak nyaman hubungannya. Itu sampai pada *judgment* bahwa pihak tertentu lebih kental Islamnya, sementara pihak lain tidak begitu. Dan juga, ada kelompok-kelompok Muslim yang mengusung radikalisme dan bahkan terorisme.¹⁰⁸

Dari sini bisa dikatakan bahwa terjadi pengerasan sikap keberagamaan di kalangan warga Muhammadiyah sebagai akibat politik elektoral, terutama pada Pilpres 2019. Ini memang bukan hanya gejala Muhammadiyah secara eksklusif. Nyaris seluruh umat Islam di Indonesia terkena dampaknya. Namun, gejala ini tidak mungkin diingkari telah terjadi di lingkungan warga Muhammadiyah.

C. Kesimpulan

Dalam menyikapi fenomena menguatnya radikalisme keberagamaan di Indonesia sejak paca-Reformasi 1998, Muhammadiyah memiliki kepekaan dan perhatian yang besar. Sebagai organisasi keislaman *wasathiyah*(moderat), Muhammadiyah telah memberi respon yang tegas terhadap segala bentuk intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme dalam beragama.

Melalui konsep Islam berkamajuan, Muhammadiyah meneguhkan moderatismenya dalam beragama dan bernegara. Islam berkemajuan adalah Islam yang sepenuhnya memperjuangkan perdamaian dan mengakui serta menghormati kebhinnekaan. Dalam kerangka Islam berkemajuan ini pula Muhammadiyah meneguhkannya bahwa NKRI yang ber-Pancaia adalah negara kesepakatan (*dar al-ahd*), di mana Muhammadiyah dituntut untuk menjadikannya sebagai lahan persaksian (*dar al-syahadah*) atas seluruh perjuangannya dalam membangun negara

¹⁰⁵Wawancara Achmad Jainuri, Wakil Ketua PWM Jawa Timur (8 Mei 2019)

¹⁰⁶Wawancara Yahya Fathur Rozy, Ketua Bidang Tabligh PC IMM Sukoharjo (25 Mei 2019).

¹⁰⁷Wawancara Nurbani Yusuf, Ketua PDM Kota Batu (9 Mei 2019).

¹⁰⁸Wawancara Syamsul Arifin, Ahli sosiologi agama(7 Mei 2019).

yang adil makmur di bawah ampunan Tuhan (*baldatun thayyibatun a rabbun ghafur*).

Dalam menghadapi radikalisme, ekstremisme dan terorisme, Muhammadiyah memilih pendekatan moderasi Islam. Tidak ada program khusus yang dikembangkan Muhammadiyah dalam melawan radikalisme, namun ada beberapa hal yang bisa dianggap sebagai upaya Muhammadiyah dalam membangun kehidupan keagamaan moderat, yang diasumsikan berdampak pada deradikalisasi. Langkah-langkah itu bisa berwujud kebijakan-kebijakan yang bersifat struktural (Melahirkan konsep Islam berkemajuan; *Ahl al-Ahd wa al-Syahadah*; pengajian, kaderisasi, kajian, dsb) maupun berbagai gerakan Muhammadiyah kultural (gerakan moderasi yang dikembangkan kaum muda Muhammadiyah, seperti Ma'arif Institute, JIMM, dsb.).

Bagaimanapun juga, Muhammadiyah berbagai tantangan yang tidak mudah. Beberapa data di lapangan menunjukkan bahwa pengaruh ideologi radikal (dengan derajat yang beragam) merasuk ke warga Muhammadiyah. Bahkan, ditemukan adanya migrasi warga Muhammadiyah ke kelompok lain.

Fenomena ini salah satunya disebabkan oleh ketiadaan "panduan-pembeda" antara slogan *al-ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah*" yang dimiliki Muhammadiyah dengan kelompok-kelompok Islam puritani lain yang saat ini banyak menjadi pendukung dan aktor tindakan-tindakan intoleran dan radikal. Situasi ini ditambah dengan adanya krisis da'i Muhammadiyah. Krisis muballigh ini menyebabkan tidak sedikit pengajian Muhammadiyah yang justru diisi oleh dai-da'i non-Muhammadiyah yang memiliki ideologi keislaman yang bertentangan dengan Muhammadiyah.

Minimnya pengembangan media juga menjadi tantangan tersendiri bagi Muhammadiyah dalam membangun wacana Islam *wasathiyah* di ruang publik. Yang juga tidak bisa diabaikan adalah dampak politik elektoral yang memainkan isu agama. Isu-isu keagamaan yang dijadikan sebagai instrumen membangun politik identitas dalam *event* politik elektoral memberi sumbangan terhadap pengerasan kehidupan beragama. Hal ini tidak terkecuali terjadi di dalam tubuh Muhammadiyah.[]

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya bisa dinyatakan bahwa NU dan Muhammadiyah memiliki komitmen kuat terhadap Islam *wasathiyah* (moderat). Moderatisme NU dan Muhammadiyah terwujud dalam ketegasan sikapnya terhadap radikalisme keagamaan. Kedua ormas ini menolak tegas segala bentuk intoleransi dan kekerasan atas nama agama.

NU mendasarkan moderatismenya pada gagasan *ahlus sunnah wal-jama'ah* yang termanifestasikan ke dalam prinsip *tawazun* (seimbang), *tawassuth* (moderat), dan *tasammuh* (toleran), serta sejarah dakwah Wali Songo di Nusantara. Gagasan ini terinstitusionalisasi ke dalam konsep Islam Nusantara yang tercermin dalam ajaran keislaman yang dikembangkan oleh para ulama pesantren. Islam Nusantara yang berjalan beriringan dengan tradisi lokal membuat NU dengan mudah mengapresiasi kebhinnekaan bangsa Indonesia hingga pengakuan bulat atas keabsahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berasaskan Pancasila.

Sementara itu, Muhammadiyah mendasarkan moderatisme pada gagasan dan semangat kemodernan Muhammadiyah yang tercermin dalam keseimbangan antara puritanisasi dan dinamisasi. Puritanisme Muhammadiyah bukanlah puritanisme destruktif, tapi puritanisme yang dibangun di atas semangat kemurnian Islam tanpa menolak kemodernan dan realitas sosial-budaya di sekitarnya. Semangat kemodernan dan pencerahan Muhammadiyah terinstitusionalisasi ke dalam konsep Islam berkemajuan dalam konteks cita-cita Indonesia yang lebih maju. Gagasan keindonesiaan Muhammadiyah tercermin dalam konsep *darul ahdi was syahadah*. Konsep ini merupakan institusionalisasi resmi pandangan Muhammadiyah atas keabsahan Indonesia dengan seluruh keragamannya. Indonesia adalah negara yang disepakati bersama sebagai ladang persaksian atas seluruh nilai-nilai kebaikan dan lahan ijtihad menuju terwujudnya *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* (negara sejahtera di bawah naungan ridha Allah).

Pandangan keduanya diwujudkan dalam beberapa upaya moderasi keagamaan, baik upaya-upaya programatik struktural, maupun gerakan-gerakan kultural yang dilakukan oleh para pengikut kedua organisasi tersebut.

Respon NU terhadap fenomena radikalisme secara eksplisit tertuang dalam keputusan forum tertinggi organisasi, yaitu Muktamar NU ke-33 di Makasar tahun 2010. Dari sini, sikap NU terus-menerus ditegaskan. Dari sini pula NU mengambil langkah-langkah konkret untuk menangkal radikalisme, antara lain: Melakukan konsolidasi ideologi dan gerakan melalui kaderisasi yang massif di internal kepengurusan dan warga; meneguhkan moderatisme Islam Indonesia melalui konsep Islam Nusantara; menerbitkan buku; memperkuat media; pengarusutamaan anti-radikalisme pada seluruh program; serta berbagai forum pengajian.

Berbagai upaya ini membuat NU, setidaknya di level kepengurusan, memiliki daya tahan relatif baik terhadap pengaruh ideologi radikal. Sekalipun demikian, kuatnya arus radikalisasi membuat sebagian kecil warga NU (umat maupun kiai) terpengaruh ideologi radikal. Menghadapi kuatnya arus radikalisasi ini, ada beberapa tantangan yang dihadapi NU, salah satunya adalah kuatnya penyebaran konten-konten intoleran dan radikal melalui media sosial. Kenyataan ini diperparah oleh rendahnya kreativitas dakwah NU dalam mengimbangi dakwah kelompok

intoleran-radikal, serta minimnya dukungan pemerintah, baik dukungan langsung maupun ketegasan kebijakan dalam melawan kelompok-kelompok intoleran-radikal.

Sementara itu, respon Muhammadiyah terhadap fenomena radikalisme keagamaan di Indonesia lebih *soft*. Bagi Muhammadiyah, peneguhan moderatisme keislaman Muhammadiyah adalah cara terbaik untuk radikalisme keagamaan. Karena itu, tidak ditemukan adanya program khusus yang digagas Muhammadiyah dalam melawan radikalisme.

Respon resmi Muhammadiyah lahir saat Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang 2005. Di sini Muhammadiyah meneguhkan dirinya sebagai gerakan pencerahan yang melawan kekerasan dan terorisme. Gagasan ini kemudian tertuang dalam konsep Islam Berkemajuan yang diluncurkan saat Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta 2010. Roda terus menggelinding hingga saat deligitimasi atas NKRI dan Pancasila sedemikian kuat, Muhammadiyah pada Muktamarnya ke-46 menyatakan dengan tegas bahwa NKRI yang ber-Pancasila adalah *dar al-ahdi wa al-syahadah* (negara konsensus dan persaksian).

Memang tidak ada program atau tim khusus yang dibentuk Muhammadiyah untuk menghadapi radikalisme, namun berbagai kegiatan yang dilakukan Muhammadiyah bisa dipandang sebagai upaya Muhammadiyah dalam menangkul radikalisme. Upaya-upaya itu antara lain: melakukan konsolidasi ideologi melalui pelatihan dan sosialisasi keputusan-keputusan organisasi terhadap pengurus dan warga; program-program tertentu terutama yang dijalankan oleh organisasi otonomnya; pengajian keagamaan; dan kajian-kajian akademis. Dalam konteks ini perlu juga dilihat berbagai aktivitas pencerahan dan perdamaian yang dilakukan oleh organisasi atau komunitas yang secara ideologis berafiliasi ke Muhammadiyah, misalnya Ma'arif Institute, JIMM, dsb.

Peneguhan komitmen atas Islam moderat ini membuat Muhammadiyah secara umum relatif imun dari pengaruh ideologi radikal, setidaknya hal ini berlaku pada kader atau pengurus inti. Namun, di kalangan sebagian warga dan pengurus ditemukan pengerasan keagamaan yang bisa menuju ke arah sikap intoleran. Pengerasan ini setidaknya terjadi karena dua hal: moment politik elektoral yang memainkan jargon-jargon agama dan infiltrasi kelompok Salafi-Wahabi ke dalam Muhammadiyah karena memiliki jargon teologis yang sama (*al-ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah*). Terkait dengan ini pula, ditemukan di beberapa tempat adanya keanggotaan ganda, yaitu menjadi Muhammadiyah dan pada saat yang sama aktif di kelompok Salafi-Wahabi, di mana tidak jarang yang ditemukan adalah doktrin-doktrin keislaman yang secara diametral berlawanan dengan moderatisme keislaman Muhammadiyah.

Hal ini juga menunjukkan beberapa tantangan yang dihadapi Muhammadiyah. Muhammadiyah krisis muballigh yang bisa memandu warganya di bawah agar bisa membedakan antara puritanisme Muhammadiyah dengan kelompok lain. Tidak mengherankan jika tidak jarang ditemukan pengajian Muhammadiyah diisi oleh muballigh Salafi-Wahabi. Krisis ini juga diperberat dengan belum maksimalnya pengembangan media, padahal kelompok-kelompok intoleran-radikal justru sangat gencar mendakwahkan pahamnya melalui media.

Apapun kisah dari kedua organisasi ini, keduanya mengakui bahwa mereka tidak bisa menghadapi radikalisme sendirian. Mereka memerlukan dukungan dari kelompok lain, baik dari pemerintah maupun sesama organisasi moderat. Keduanya juga mengaku lemah di media. Kebutuhan mendasar lain dari dua organisasi Islam moderat ini dalam menghadapi menguatnya radikalisme adalah akses terhadap media. SDM memang selalu muncul sebagai salah satu kebutuhan penting dalam

menghadapi kelompok intoleran-radikal. Namun SDM di sini lebih memperlihatkan sebagai minimnya individu-individu yang memiliki kecakapan dalam memproduksi, mengemas, dan memasarkan narasi Islam moderat di saat sekarang, di mana narasi-narasi keagamaan nyaris semuanya diproduksi dan disebarluaskan melalui media.

B. Kebutuhan Dukungan dan/atau Rekomendasi

Ada beberapa rekomendasi untuk memperkuat NU dan Muhammadiyah dalam mengarusutamakan Islam wasathiyah di Indonesia:

Internal

Internal	
Muhammadiyah	Nahdlatul Ulama
Membangun dan memperkuat jaringan kerja antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah (serta ormas-ormas moderat lain) untuk bersama-sama (baik melalui skema kerja sama maupun sinergi) dalam menangkal intoleransi-radikalisme, terutama dalam bidang pendidikan, media, dan pengembangan sumber daya manusia.	
Memperkuat ideologi Islam moderat (Islam berkemajuan) di kalangan para kader Muhammadiyah secara lebih massif, sistematis dan terstruktur.	Memperluas konsolidasi ideologi dan gerakan melalui berbagai pelatihan/kaderisasi, tidak hanya kepada pengurus, tapi juga warga.
Memperkuat kaderisasi ulama Muhammadiyah yang secara teguh memegang moderasi keislaman Muhammadiyah, dan siap untuk menjaga moderatisme warga Muhammadiyah di bawah.	Memperkuat dakwah melalui media dengan kemasan yang lebih kreatif sehingga bisa menjangkau generasi milenial dan kelompok Muslim urban
Memperkuat media (termasuk media sosial) sebagai wahana penyebaran Islam moderat.	
Peningkatan kualitas para da'i agar dalam menyampaikan dakwah dan pesan-pesan Islam menurut paham Muhammadiyah di masyarakat lebih menarik.	

Eksternal

Eksternal
Untuk mendukung upaya-upaya NU dan Muhammadiyah dalam melakukan moderasi kehidupan keagamaan, pemerintah hendaknya membuat regulasi yang

tegas untuk melindungi aset, fasilitas, sarana, dan prasarana negara (termasuk sekolah negeri, kampus negeri, BUMN, dan berbagai lembaga negara lain), agar tidak menjadi wilayah inkubasi ideologi intoleran dan radikal.

Pemerintah hendaknya memastikan posisi-posisi strategis dalam kementerian, lembaga negara, termasuk BUMN bersih dari kelompok-kelompok radikal, salah satunya melalui pengembangan *tools* deteksi intoleransi dan radikalisme dalam proses rekrutmen.

Pemerintah hendaknya menyediakan dana hibah yang bisa diakses oleh NU dan Muhammadiyah untuk membuat berbagai kegiatan moderasi keagamaan, misalnya, pelatihan jurnalisme, penelitian, festival, termasuk dukungan kepada pesantren atau lembaga pendidikan yang perlu dukungan khusus.

Pemerintah hendaknya memfasilitasi da'i-da'i NU dan Muhammadiyah untuk dapat mengakses media mainstream terutama di segmen pengajian agama.

Melalui Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia, pemerintah hendaknya memastikan konten keagamaan moderat pada berbagai tayangan acara di media.

Pemerintah hendaknya melibatkan NU dan Muhammadiyah dalam menyusun dan mengambik kebijakan terkait dengan isu-isu intoleransi, radikalisme, dan terorisme.

Pemerintah hendaknya mengambil langkah-langkah tegas terhadap ASN yang terbukti berideologi radikal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. "Agama dan Pancasila dalam Identitas Keindonesiaan," dlm Muamaroh dan Benni Setiawan, eds. *Negara Pancasila, Darul 'Ahdh Wasy-Syahadah: Perspektif Teologis dan Ideologis*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2017: 79-103.
- _____. "Muhammadiyah's Experience in Promoting Civil Society on the Eve of the 21st Century," dlm. Mitsuo Nakamura, Sharon Siddique and Omar Farouk Bajunid, *Islam and Civil Society in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS. 2001: 43-56.
- _____. "Paham Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah dalam Era Transformasi Teologis di Tengah Tantangan Kemanusiaan Universal," *Berita Resmi Muhammadiyah*, No. 22/1990-1995 (Maret 1995): 48-49.
- Abdullah, Irwan, "Politik Bhinneka Tunggal Ika dalam keragaman budaya Indonesia," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 5, No. 2 (2003): 1-13.
- Abdurrahman, Asjmundi. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Abdurrahman, Moeslim. *Islam sebagai Kritik Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.
- _____. *Politik Kaum Modernis, Perlawanan Muhammadiyah terhadap Kolonialisme Belanda*. Jakarta: Al-Wasat, 2010.
- Al-Shaybani, Muhammed ibn al-Hasan. *The Islamic Law of Nations*, diterjemahkan Majid Khadduri. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press, 1966.
- Ali, Muhamad. "The Muhammadiyah's 47th Congress and "Islam Berkemajuan", *Studi al-Islamika*, Vol. 22, No. 2, 2015.
- Amar, Faozan dan Dinan Hasbudin Apip. "Darul-'Ahdh Wasy-Syahadah: Makna dan Implementasi," dlm. Faozan Amar et.al. eds. *Darul-Ahdh Wasy-Syahadah: Konteks, Makna dan Aktualisasi untuk Indonesia Berkemajuan*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2017.
- Assyaukanie, Lutfi. "Unholy Alliance: Ultra-Conservatism and Political Pragmatism in Indonesia," *Thinking ASEAN Issue*. 19 Januari 19 2017. <http://www.thcasean.org/read/articles/327/Unholy-Alliance-Ultra-Conservatism-and-Political-Pragmatism-in-Indonesia> Diunduh 30 Agustus 2018.
- Asyari, Suaidi. "A Real Treath from Within: Muhammadiyah's Identity Methamorphosis and the Dilemma of Democracy," *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 1, No. 1 (2017).
- Bachtiar, Hasnan, Haeri Fadly dan Moh. Nurhakim, "Visi Kosmopolitanisme Islam di Lingkungan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah," *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 2: 455-485.
- Baidhawiy, Zakiyuddin, 2016. "Pancasila Tauhid Sosial dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara," *Maarif*, 11. 1 (2016): 41-78.
- _____. "The Muhammadiyah's Promotion of Moderation," *The American Journal of Islamic Social Sciences* 32. 3 (2015): 69-91.
- Barton, Greg. "Indonesia," dalam. Barry Rubin, ed. *Guide to Islamist Movements*. New York: ME Sharpe, 2010: 133-148.
- _____. *Indonesia's Struggle, Jamaah Islamiyah and the Soul of Islam*. Sydney: University of New South Wales Press, 2004.

- Bayat, Asef, ed. *Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Beck, Herman L. "The Borderline between Muslim Fundamentalism and Muslim Modernism: An Indonesian Example," dlm. Jan Willem van Henten dan Anton Houtepen, eds. *Religious Identity and the Invention of Tradition*. Assen, the Netherland: Royal Van Gorcum, 2001. 279-291.
- _____. "Islamic Purity at Odds with Javanese Identity: the Muhammadiyah and the Celebration of the Garebek Maulud Ritual in Yogyakarta" dalam Jan, Platvoet., dan Toorn, Karel Van der. (peny.), *Pluralism and Identity: studies in ritual behaviour*. Leiden: Brill, 1995.
- _____. *Fenomenologi Islam Modernis: Kisah Perjumpaan Muhammadiyah dengan Kebhinnekaan Perilaku Beragama*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.
- Biyanto. "Pluralisme Keagamaan dalam Perspektif Kaum Muda Muhammadiyah (Suatu Tinjauan Sosiologi Pengetahuan)", *Disertasi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2008.
- Boy ZTF, Pradana, M. Hilmi Faiq dan Zulfan Barron, (eds.), *Era Baru Gerakan Muhammadiyah*. Malang: UMM Press; Jakarta: Al-Ma'un Institute, 2008.
- _____. *Fatwa in Indonesia: An Analysis of Dominant Legal Ideas and Mode of Thought of Fatwa Making Agencies and Their Implications in the Post-New Order Period*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018.
- _____. *In Defence of Pure Islam: Conservative-Progressive Debate within Muhammadiyah*. Thesis, The Australian National University, 2007.
- Bsoul, Labeeb Ahmed. "Theory of International Relations in Islam," *Digest of Middle East Studies* 16 (2007): 71-96.
- Burhani, Ahmad Najib. "Absennya Muhammadiyah dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK," *Koran SINDO*. 13 November 2014.
- _____. "Liberal and Conservative Discourses in the Muhammadiyah: The Struggle for the Face of Reformist Islam in Indonesia," dlm. Martin van Bruinessen, ed. *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn"*. Singapore: ISEAS, 2013. 105-144.
- _____. "The Ideological Shift of Muhammadiyah from Cultural into Puritanical Tendency in 1930s," *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 3. 1 (2006): 1-22.
- _____. *Muhammadiyah Berkemajuan: Pergeseran dari Puritanisme ke Kosmopolitanisme*. Bandung: Mizan, 2016.
- _____. *Muhammadiyah Jawa*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.
- _____. "Islam Murni VS Islam Progresif di Muhammadiyah: Melihat Wajah Islam Reformis Indonesia", dalam Bruinessen, Martin van. *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*. Bandung: Mizan, 2014.
- _____. "Pluralism, Liberalism and Islamism: Religious Outlook of Muhammadiyah", *Studia Islamika*, Vol. 25, No. 3, 2018, 457-458.
- Darban, Ahmad Adaby. *Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.
- Denny JA. *Melewati Perubahan: Sebuah Catatan Atas Transisi Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: LKIS, 2006.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas dan Eksistensi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- El-Fadl, Khaled Abou. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj. Helmi Mustofa. Jakarta: Serambi, 2006.

- F. Hamsah. "Dasar Pemikiran Islam Berkemajuan Muhammadiyah 1912-1923".
Tesis. Makasar: UIN Alauddin, 2016.
- Fachrudin. *Boeah Fikiran Kijahi H.A. Dachlan*. Jakarta: Global Base Review STIEAD Press, 2015.
- Fauzia, Amelia. *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. Leiden: Brill, 2013.
- Fealy, Greg. "Bigger than Ahok: Explaining the 2 December Mass Rally," *Indonesia at Melbourne*. 7 Desember 2016.
<http://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/bigger-than-ahok-explaining-jakartas-2-december-mass-rally/> Diunduh pada 31 Agustus 2018.
- _____. "Islamisation and Politics in Southeast Asia: The Contrasting Cases of Malaysia and Indonesia," dlm. Nelly Lahoud dan Anthony H. Johns, eds. *Islam in World Politics*. London; New York: Routledge, 2005: 152-169
- Fenton, A., dan D. Price, "ISIS, jihad and Indonesian law: Legal impacts of the January 2016 Jakarta terrorist attacks," *Issues in Legal Scholarship*, Vol. 14, No. 1 (2016): 1-26.
- Ford, Christopher A. "Siyar-ization and Its Discontents: International Law and Islam's Constitutional Crisis," dlm. Mashood A. Baderin, ed. *International Law and Islamic Law*. Aldershot, Hampshire, England; Burlington, Vermont: Ashgate, 2008: 19-53.
- Fuad, Ahmad Nur. "Kontinuitas dan Diskontinuitas Pemikiran Keagamaan Dalam Muhammadiyah (1923-2008): Tinjauan Sejarah Intelektual", *Disertasi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2010.
- Galamas, F., "Terrorism in Indonesia: an overview," *Research Papers*, Vol. 4 (2015): 215.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Bagian II. Jakarta: Pustaka, 1981.
- Hadikusuma, Ki Bagus. *Islam sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin*. Djogdjakarta: Pustaka Rahaju, t.t.
- Hadiz, Vedi R. *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Hadrawy, Ulil Abshar (Editor), *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU*. Jakarta: LTN PBNU, 2012.
- Hakim, Lukman, ed. *Dari Muhammadiyah untuk Indonesia: Pemikiran dan Kiprah Ki Bagus Hadikusumo, Mr Kasman Singodimedjo, dan KH Abdul Kahar Mudzakkir*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013.
- Hakim, Sudarnoto Abdul. "Muhammadiyah dan Kebudayaan Kita," dlm. Alpha Amirrachman, Andar Nubowo dan Azaki Khoiruddin, eds. *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia: Refleksi dan Agenda Muhammadiyah ke Depan*. Bandung: Mizan, 2015: 50-67.
- Hassan, Riaz. *Faithlines: Muslim Conception of Islam and Society*, (Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Hefner, Robert W., *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press, 2001.
- Hendrianto, Stefanus. *Law and Politics of Constitutional Courts: Indonesia and the Search for Judicial Heroes*. Oxon; New York: Routledge, 2018.
- Horowitz, Donald L. *Constitutional Change and Democracy in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Hosen, Nadirsyah. *Shari'a & Constitutional Reform in Indonesia*. Singapore: ISEAS, 2007.

- Immanuel, Jimmy Marcos dalam *When the Outsiders Become Insiders: Roles of Muhammadiyah in Shifting the Apeman through State Power and Society* ([https://www.academia.edu/3486524/When the Outsiders Become Insiders Roles of Muhammadiyah in Shifting the Apeman through State Power and Society](https://www.academia.edu/3486524/When_the_Outsiders_Become_Insiders_Roles_of_Muhammadiyah_in_Shifting_the_Apeman_through_State_Power_and_Society), akses 16 Sept 2018).
- İnalçık, Halil. "Dār al-'Ahd," in P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, dan W.P. Heinrichs, eds. *Encyclopaedia of Islam*, Second Edition. 3 September 2018. http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_1698 Diunduh pada 6 September 2018.
- Indrayana, Denny. *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution Making in Transition*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Intan, B.F., *Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis*. New York: Peter Lang, 2006.
- Irawan, I.A., "Pergeseran orientasi terorisme di Indonesia 2000-21018," kumparan.com 17 Mei 2018, <https://kumparan.com/erucakra-garuda-nusantara/pergeseran-orientasi-terorisme-di-indonesia-2000-2018> (Diakses 7 Juni 2019).
- Islam, Maidul. *Jamaat-e-Islami in Contemporary India and Bangladesh*. Delhi, India: Cambridge University Press, 2015.
- Jainuri, Achmad. "The Formation of the Muhammadiyah's Ideology 1912-1942" *Ph.D. Dissertation*. Canada: McGill University, 1997.
- _____. "The Muhammadiyah Movement in Twentieth-Century Indonesia: A Socio-Religious Study", *Thesis*. Canada: McGill University, 1992.
- Jurdi, Syarifuddin, eds. *1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*. Jakarta: Kompas, 2010.
- _____. *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Kamali, Mohammad Hashim. *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford; New York: Oxford University Press, 2015.
- Khadduri, Majid. "Islam and the Modern Law of Nations," dlm. Mashood A. Baderin, ed. *International Law and Islamic Law*. Aldershot, Hampshire, England; Burlington, Vermont: Ashgate, 2008: 3-17.
- _____. "The Islamic Theory of International Relations and Its Contemporary Relevance," dlm. Harris Proctor, ed. *Islam and International Relations*. London; Dunmow: Pall Mall Press, 1965: 24-39.
- _____. "Translators's Introduction," dlm. Muhammed ibn al-Hasan al-Shaybani, *The Islamic Law of Nations*, diterjemahkan Majid Khadduri. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press, 1966.
- Khoirudin, Azaki. *Teologi al-'Ashr: Etos dan Ajaran KHA Dahlan yang Terlupakan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.
- Kim, Hyung-Jun. *Reformist Muslim in a Yogyakarta Village: The Islamic Transformation of Contemporary Socio-Religious Life*. Canberra: ANU E Press, 2007.
- _____. "Praxis and Religious Authority in Islam: The Case of Ahmad Dahlan, Founder of Muhammadiyah", *StudiIslamika*, Vol. 17, No. 1, 2010.
- Klinken, Gary van, *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*. London; New York: Routledge, 2007.
- KRH Hadjid, *Pelajaran KHA Dahlan, 7 Falsafah Ajaran dan 17 Kelompok Ayat al-Qur'an* (ed. Budi Setiawan dan Arief Budiman Ch. Yogyakarta: LPI PP Muhammadiyah, 2005.

- Kumparan, "Moeldoko: 590 WNI masih berada di Suriah untuk gabung ISIS", kumparan.com 22 Mei 2018, <https://kumparan.com/@kumparannews/moeldoko-590-wni-masih-berada-di-suriah-untuk-gabung-isis> (Diakses 7 Juni 2019).
- Kuntowijoyo, "Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah", dalam Rais, Amin. dkk (ed), *Pendidikan Muhammadiyah dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: PLP2M, 1985.
- _____. *Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*. Bandung: Mizan, 2001.
- Kurzman, Charles, ed. *Modernist Islam 1840-1940, A Sourcebook*. Oxford; New York: Oxford University Press, 2002.
- Latief, Hilman. *Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah and Politics in Indonesia*. Dissertation, University of Utrecht, 2012.
- _____. *Post-Puritanisme: Pemikiran dan Arah Baru Gerakan Islam Modernis di Indonesia 1995-2015*. Yogyakarta: LP3M UMY, 2017.
- Maarif, Ahmad Syafii. "Antara Pembantu dan Penentu," in Abdul Mu'ti et.al. eds. *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015: 427-438.
- _____. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: Mizan, 2009.
- Madjid, Nurcholish, "Islamic Roots of Modern Pluralism: Indonesian Experience," *Studia Islamika*, Vol. 1, No. 1 (1994).
- _____. *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 2008.
- Magouirk, J., S. Atran, dan M. Sageman, "Connecting terrorist networks," *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 31, No. 1 (2008): 1-16.
- Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah dan Langkah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.
- Masduqi, Irwan. *Berislam secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama*. Bandung: Mizan, 2011.
- Mas'udi, Farid Masdar, *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam*. Ciputat: Pustaka Alvabet, 2010.
- Menchik, Jeremy, *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Mietzner, Marcus dan Burhanuddin Muhtadi. "Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation," *Asian Studies Review*, 42. 3 (2018): 479-497.
- _____. "Indonesia's Growing Islamist Populism," *Carnegie Council for Ethics in International Affairs*. 19 December 2016 <https://www.carnegiecouncil.org/studio/multimedia/20161219-indonesias-growing-islamist-populism> Diunduh pada 30 Agustus 2018.
- Movanita, A.N.K., "671 orang WNI bergabung dengan kelompok teroris di Irak dan Suriah," nasional.kompas.com 20 September 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/20/07582791/671-orang-wni-bergabung-dengan-kelompok-teroris-di-irak-dan-suriah?page=all> (Diakses 7 Juni 2019).
- Mu'ti, Abdul, et.al. eds. *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015.
- Muhajir, Anton, "Lamongan, Daerah Asal Pelaku Bom Bali itu Kini Kantong Rekrutmen ISIS," *Benar News*, 20 Maret 2017, <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/laporan-khusus/lamongan-isis->

- 03202017183538.html (diakses pada 23 Juni 2019). Bandingkan pula dengan data-data sebelumnya yang diajukan dalam bab pertama penelitian ini.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Marhaenis Muhammadiyah*. Yogyakarta: Galang Press, 2010.
- Mu'tasim, Radjasa. *Agama dan Pariwisata: Telaah Atas transformasi Keagamaan Komunitas Muhammadiyah Borobudur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Islam Murni dan Masyarakat Petani*. Yogyakarta: PustakaPelajar, 2000).
- Mun'im DZ, Abdul. *Piagam Perjuangan Kebangsaan*, (Jakarta: Setjen PBNU-NU Online, 2011).
- . *Hasil-hasil Muktamar 32 Nahdlatul Ulama*, (Letjen PBNU: Jakarta, 2011),
- Mutohharun Jinan, "GerakanPurifikasi Islam di Pedesaan: Studitentang Majelis Tafsir Al-Qur'an Surakarta", *Disertasi*. Yogyakarta: UIN SunanKalijaga, 2010.
- Nadjib, Emha Ainun. *Saat-saat Terakhir Bersama Soeharto: 2,5 Jam di Istana*. Yogyakarta: Bentang, 2016.
- Najib, Muhammad dan KS. Himmaty. *Amien Rais dari Yogya ke Bina Graha*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Nakamura, Mitsuo. *The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town, c.1910-2010, 2nd Enlarged Edition*. Singapore: ISEAS, 2012.
- Nashir, Haedar. "Muhammadiyah Membangun Integrasi Keislaman dan Kebangsaan Menuju Indonesia Berkemajuan," dlm. Faozan Amar et.al. eds. *Darul-Ahdi Wasy-Syahadah: Konteks, Makna dan Aktualisasi untuk Indonesia Berkemajuan*. Jakarta: Al-Wasat Publishing House, 2018: 19-32.
- . "Muktamar Teladan dan Muhammadiyah Berkemajuan," dlm. Abdul Mu'ti et.al. eds. *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015: 1-9.
- . *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.
- . *Revitalisasi Gerakan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1999.
- . *Memahamildeologi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, **2013**.
- Oak, G.S., "Jemaah Islamiyah's fifth phase: the many faces of a terrorist group," *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 33, No. 11 (2010): 989-1018.
- Peacock, James L. *Muslim Puritans: Reformist Psychology in Southeast Asian Islam*. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press, 1978a.
- . *Purifying the Faith: The Muhammadiyah Movement in Indonesian Islam*. Menlo Park, California: Benjamin/Cummings Pub Co, 1978b.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. "Data Amal Usaha Muhammadiyah," dlm. *Muhammadiyah* <http://www.muhammadiyah.or.id/content-8-det-amal-usaha.html> Diunduh pada 6 September 2018.
- . *Indonesia Berkemajuan: Rekonstruksi Kehidupan yang Bermakna*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015.
- . *Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015.
- . *Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015.
- . *Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010.

- Piscatori, James. *Islam in a World of Nation-States*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- POLRI, *Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris* (Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar, 2017).
- PPIM UIN Jakarta dan Convey, *Api dalam Sekam: Keberagaman Muslim Gen-Z, Survei nasional tentang Keberagaman di Sekolah dan Universitas di Indonesia*. Jakarta: PPIM UIN Jakarta and Convey Indonesia, 2018.
- Peacock, James L. *Purifying the Faith: the Muhammadiyah Movement in Indonesian Islam*. California: The Benjamin/Cumming Publishing Company, 1978.
- Qodir, Zuly. *Muhammadiyah Studies: Reorientasi Gerakan dan Pemikiran Memasuki Abad Kedua*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Rais, Amien. *Moralitas Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta: Dinamika, 1995.
- Rais, Imam Mujadid. "Pengantar Redaksi," *Maarif*, 11. 1 (2016): 4-15.
- Ramage, D.E., *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the ideology of tolerance*. London; New York: Routledge, 2002.
- Ramakrishna, K. dan S.S. Tan, *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia*. Singapore: World Scientific and Institute of Defence and Strategic Studies, 2003.
- Ricklefs, Merle C. "Foreword to the Second Edition: A Changing Society and a Changing Muhammadiyah," dlm. Mitsuo Nakamura, *The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town, c.1910-2010, 2nd Enlarged Edition*. Singapore: ISEAS, 2012.
- Robison, Richard dan Vedi R. Hadiz. "Indonesia: A Tale of Misplaced Expectations," *The Pacific Review* 30. 6 (2017): 895-909.
- Rumadi dkk., *Hasil-hasil Mukhtar ke-33 NU* (Jakarta: LTN NU, 2016).
- Saeed, Abdullah. "Trends in Contemporary Islam: A Preliminary Attempt at a Classification," *The Muslim World* 97. 3 (2007): 395-404.
- Safi, Omid. *Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralism*. Oxford: Oneworld, 2003.
- Salim, Arskal. *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2009.
- Schulze, K.E., "Laskar Jihad and the conflict in Ambon," *The Brown Journal of World Affairs*, Vol. 9, No. 1 (2002): 57-69.
- _____. "The 'ethnic' in Indonesia's communal conflicts: violence in Ambon, Poso, and Sambas," *Ethnic and Racial Studies*, Vol. 40, No. 12 (2017): 2096-2114.
- Singh, B. "The challenge of militant Islam and terrorism in Indonesia," *Australian Journal of International Affairs*, Vol. 58, No. 1 (2004): 47-68.
- Sofwan, Rinaldy, "Keluarga Amrozi dan Jihad yang Tertunda dari Lamongan," *CNN Indonesia*, 17 Januari 2017, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170116100503-20-186546/keluarga-amrozi-dan-jihad-yang-tertunda-dari-lamongan> (diakses pada 23 Juni 2019).
- Solahudin. *The Roots of Terrorism in Indonesia: From Darul Islam to Jema'ah Islamiyah*, translated by Dave McRae. Sydney: UNSW Press, 2013.
- Steenbrink, K.A., "The Pancasila ideology and an Indonesian Muslim theology of religions," *The Muslim World*, Vol. 85, No. 3-4 (1998).
- Subhan, M. "Pergeseran orientasi gerakan terorisme Islam di Indonesia (Studi terorisme tahun 2000-2015)," *Journal of International Relations*, Vol. 2, No. 4 (2016): 59-67.

- Sukma, R., J. Ma'ruf, dan K. Abdullah, "The attitude of Indonesian Muslims towards terrorism: an important factor in counter-terrorism?," *Journal of Human Security*, Vol. 7, No. 1 (2001).
- Sukma, Rizal, "Ethnic conflicts in Indonesia: causes and the quest for solution," dlm. Kusuma Snitwongse (ed.), *Ethnic Conflicts in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2005, h. 1-41.
- Sundoko, H.F., R. Akbar, D. Zulkaidi, dan T.A. Argo, "Toward a Defensive Global City: Urban (In) security in an Age of Terror—The Case of Jakarta, Indonesia," in *Metropolitan Governance in Asia and the Pacific Rim*. Singapore: Springer, 2018: 33-56.
- Suparlan, Parsudi, "Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman sukubangsa atau kebudayaan?," *Antropologi Indonesia*, Vol. 72 (2003).
- Suratman, Y.P., "The effectiveness of de-radicalization program in Southeast Asia: does it work? The case of Indonesia, Malaysia, and Singapore," *Journal of Asian Studies*, Vol. 5, No. 2 (2017): 135-156.
- Syamsuddin, Din. "Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan: Refleksi, Proyeksi dan Rekomendasi," dlm. Abdul Mu'ti et.al. eds. *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015a: 10-26.
- Syamsuddin, Din. "NKRI: Negara Perjanjian dan Kesaksian," dlm. Akhmad Sahal dan Munawir Aziz, eds. *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Konsep Historis*. Bandung: Mizan, 2015b: 278-286.
- Syamsuddin, Din. "Tafsir Islam atas Negara Pancasila," dlm. Muamaroh dan Benni Setiawan, eds. *Negara Pancasila, Darul 'Ahdī Wasy-Syahadah: Perspektif Teologis dan Ideologis*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2017: 160-166.
- Syuja. *Islam Berkemajuan: Kisah Perjuangan KH Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Masa Awal*. Jakarta: Al-Wasat, 2009.
- Saleh, Fauzan. "The Development of Islamic Theological Discourse in Indonesia: A Critical Survey of Muslim Reformist Attempts to Sustain Orthodoxy in the Twentieth Century". *Dissertation*. Canada: McGill University, 2001.
- Shihab, Alwi. *Membendung Arus: Respon Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1999.
- Siddik, Achmad. *Norma-Norma Pancasila Menurut Pandangan Islam*, (tth).
- Sitompul, Einar Martahan. *NU dan Pancasila*. Jakarta: Sinar Harapan, 1989.
- Sukidi, "Max Weber's Remarks on Islam: The Protestant Ethic among Muslim Puritans", *Islam and Christian-Muslim Relations*, Vol. 17, No. 2, 2006, 195–205.
- The Jakarta Post, "Central Java Police investigate failed suicide bombing in Kartasura," [thejakartapost.com](https://www.thejakartapost.com/news/2019/06/04/c-java-police-investigate-failed-suicide-bombing-in-kartasura.html) 4 Juni 2019, <https://www.thejakartapost.com/news/2019/06/04/c-java-police-investigate-failed-suicide-bombing-in-kartasura.html> (Diakses 7 Juni 2019).
- The Wahid Foundation, *A Measure of the Extent of Socio-Religious Intolerance and Radicalism within Muslim Society in Indonesia*. Jakarta: Wahid Foundation and Lembaga Survei Indonesia, 2017.
- _____, *Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute, 2016.
- _____, *Annual Report Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2009*. Jakarta: The Wahid Institute, 2009.
- _____, *Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Intoleransi 2012*. Jakarta: The Wahid Institute, 2012.

- _____, *Laporan Kebebasan Beragama dan Toleransi di Indonesia 2011*. Jakarta: The Wahid Institute, 2011.
- _____, *Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi 2010*. Jakarta: The Wahid Institute, 2010.
- _____, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2013*. Jakarta: The Wahid Institute, 2013.
- _____, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2014*. Jakarta: The Wahid Institute, 2014.
- _____, *Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute, 2015.
- _____, *Laporan Tahunan The Wahid Institute 2008: Pluralisme Beragama/Berkeyakinan di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute, 2008.
- Thohari, Hajriyanto. "Ia Bukan Muadzin Lagi," dlm. Muhammad Najib et.al., *Suara Amien Rais, Suara Rakyat*. Jakarta, Gema Insani Press, 1999: 103-106.
- _____. "Trisula Baru Gerakan Muhammadiyah," dlm. Abdul Mu'ti et.al. eds. *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015: 329-333.
- Wahid, Abdurrahman, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: Wahid Institute, 2009.
- West, B., "Collective memory and crisis: the 2002 Bali bombing, national heroic archetypes and the counter-narrative of cosmopolitan nationalism," *Journal of Sociology*, Vol. 44, No. 4 (2008): 337-353.
- White, Jenny B. *Islamist Mobilization in Turkey: A Study in Vernacular Politics*. Washington, DC: The University of Washington Press, 2002.
- Yamien, M. Nurul. "Muhammadiyah dan Masyarakat Informasi," *Republika*. 3 Mei 2010.
- Zora, A.S., "Terrorism in Indonesia: A review on rehabilitation and deradicalization," *Journal of Terrorism Research*, Vol. 6, No. 2 (2015): 36-56.

PERJANJIAN KERJA SAMA

001/003/68/INFID/II/2019

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan merupakan kesepakatan antara :

Nama : **Mugiyanto**
Jabatan : Plt. Direktur Eksekutif
Lembaga : INFID
Alamat : Jl. Jatipadang Raya Kavling 3 No. 105, Jakarta

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**, dengan

Nama : **Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag**
Alamat : Star Safira Regency B3/22 Suko, Sukodono, Sidoarjo
Lembaga : UIN Sunan Ampel
Jabatan : Pengajar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. Dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dan mengadakan perjanjian dalam kegiatan **Research on The Role of Moderate Islamic Organizations in Preventing Violent Extremism; NU and Muhammadiyah Case.**

Pasal 1 **Jenis Pekerjaan**

Jenis pekerjaan yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini adalah untuk menjadi **Ketua Penelitian** dalam kegiatan **Research on The Role of Moderate Islamic Organizations in Preventing Violent Extremism; NU and Muhammadiyah Case** yang ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan TOR terlampir.

Pekerjaan dimaksud dalam ayat 1 adalah menjadi Koordinator Peneliti yang bertugas:

- (1) Bersama INFID mengawal substansi dari kegiatan penelitian INFID.
- (2) Mengoordinasikan dan memastikan kualitas pekerjaan dari Peneliti Senior.
- (3) Memastikan kualitas dari penelitian, baik secara substansi maupun teknis.
- (4) Mereview laporan-laporan dari Peneliti Senior.
- (5) Menyusun laporan akhir secara lengkap.
- (6) Melakukan pemeriksaan ke lapangan (*spot checking*) bila diperlukan.
- (7) Menghadiri pertemuan internal maupun eksternal secara online maupun offline terkait dengan kegiatan ini.

Pasal 2
Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan jenis pekerjaan yang dimaksud pada Pasal 1 adalah terhitung sejak **tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 1 Juni 2019**

Pasal 3
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan hasil laporan lengkap beserta dengan lampiran-lampiran yang telah ditentukan di dalam ToR yang dilakukan PIHAK KEDUA
- (2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan hasil revisi laporan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan masukan dari PIHAK PERTAMA jika diperlukan.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan honor dan biaya kegiatan sebesar **Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)**. Pembayaran akan dilakukan 3 (3) termin pembayaran:
 - a. Pembayaran termin 1 (satu) Rp 24.000.000 dilakukan setelah tanda tangan kontrak,
 - b. Pembayaran termin 2 (dua) Rp 18.000.000 setelah draft 1 laporan diberikan.
 - c. Pembayaran termin 3 (dua) Rp 18.000.000 setelah laporan final diberikan.
- (4) Pembayaran honor dan biaya penelitian dilakukan ke Bank MANDIRI KCP Ponorogo **No Rekening : 144-00-0681842-8** atas nama :**AHMAD ZAINUL HAMDI, M.Ag.**

Pasal 4
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima honor seperti yang tersebut pada Pasal 3 ayat 2 yaitu **Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)** yang diterima dalam 3 (tiga) termin pembayaran sebagaimana tertera dalam pasal 3 ayat 2
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu sebagaimana uraian tugas dan pekerjaan yang telah disepakati.

Pasal 5
Pajak

Sebagai Wajib Pajak Badan, PIHAK KEDUA wajib melakukan pemotongan pajak atas honor dan hadiah yang dibayarkan kepada PIHAK TERKAIT yang terlibat dalam Kompetisi yaitu sebesar 2,5% (dua setengah persen) bagi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3% (tiga persen) bagi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). PIHAK KEDUA akan memberikan salinan bukti pembayaran pajak kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah.
- (2) Jika penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak dapat dicapai maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menurut peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 7
Penutup

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dan dibuat rangkap dua dengan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai acuan PARA PIHAK dalam menjalin kerjasama
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini berakhir masa berlakunya setelah PARA PIHAK memenuhi semua kewajiban dan menerima haknya masing-masing seperti diatur dalam pasal-pasal di Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian, dan untuk itu akan dibuat suatu Addendum.

Jakarta, 1 Februari 2019

PIHAK PERTAMA

Mugiyanto



Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag

Jakarta, 2 September 2021

SURAT KETERANGAN

707/SK/INFID/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sugeng Bahagijo
Jabatan : Direktur Eksekutif INFID

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag
Jabatan : Ketua Jurusan Studi Agama-agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya dan Peneliti

adalah benar sebagai **Koordinator Penelitian dan Senior Reseracher** dalam kegiatan penelitian INFID sepanjang tahun 2019 – 2021 dengan rincian berikut:

1. Ketua Penelitian dalam kegiatan “*The Role of Moderate Islam Organization in Preventing Violent Extremism: Study case of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah*”, tahun 2019.
2. Peneliti dalam kegiatan “*Develop Research Instrument for Intolerance and Radicalism In State Universities*”, tahun 2019.
3. Koordinator Penelitian dalam kegiatan “*Survei Persepsi dan Sikap Generasi Muda terhadap Radikalisasi dan Ekstremisme Kekerasan*”, tahun 2020.
4. *Senior Researcher* dalam kegiatan penelitian “*Peta Gerakan Penyebaran Ekstremisme Pasca Berlakunya Perppu No. 2 Tahun 2017*”, tahun 2021.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Sugeng Bahagijo



Sugeng Bahagijo
Direktur Eksekutif INFID